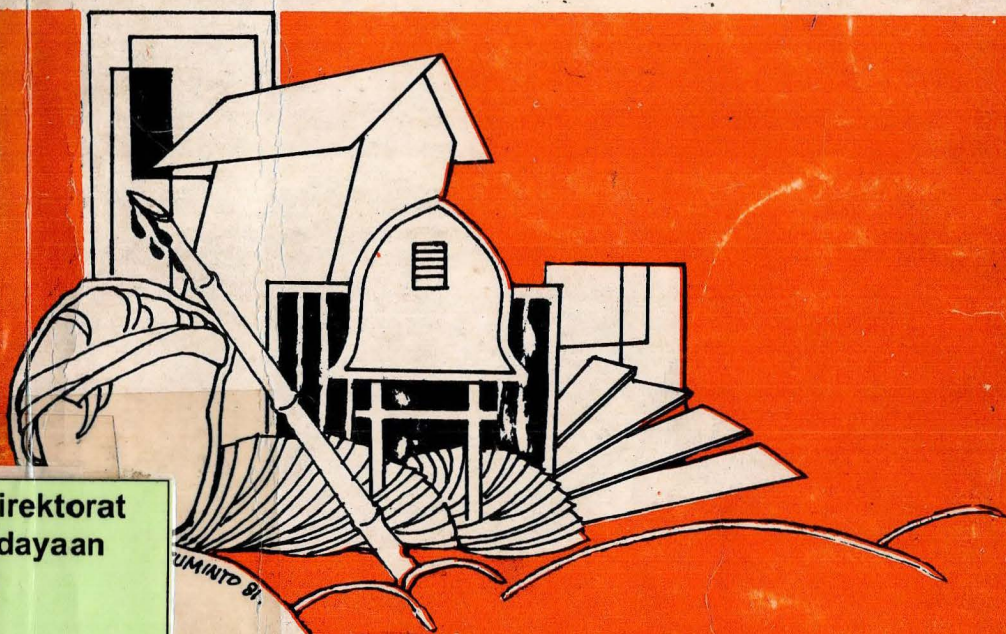




SEJARAH

REVOLUSI
KEMERDEKAAN
(1945-1949)

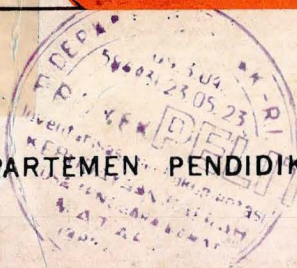
**DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT**



Direktorat
Kebudayaan

5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945-1949) DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Editor : Sutrisno Kutoyo.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH

1979 / 1980

PRAKATA

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Nusa Tenggara Barat Tahun 1979/1980 yang dahulu bernama Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3 - KD), mendapat tugas untuk mengadakan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat yang meliputi lima aspek yaitu :

1. Adat Istiadat Daerah, dengan thema "Sistim Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan".
2. Geografi Budaya Daerah, dengan thema "Aspek Geografi dalam wilayah Pembangunan".
3. Sejarah Daerah dengan thema, "Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Pisik)".
4. Ceritera Rakyat Daerah, dengan thema "Tokoh Mitologis dan Legendaris".
5. Permainan Rakyat Daerah.

Proyek ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1977/1978.

Sesuai dengan ketentuan yang ada penulisan naskah untuk kelima aspek tersebut dikontrakkan kepada suatu Team yang anggota - anggotanya terdiri dari personalia-personalia di Kantor Wilayah Departemen P dan K, maupun anggota masyarakat yang dianggap mampu dalam penulisan masing - masing aspek.

Sebenarnya pekerjaan ini harus dikontrakkan kepada Perguruan Tinggi setempat. Namun karena di Nusa Tenggara Barat belum ada Perguruan Tinggi yang sesuai untuk kelima aspek tersebut, maka pengangkatan anggota Team dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan memperhatikan ketentuan di atas.

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani antara Pemimpin Proyek IDKD Nusa Tenggara Barat tahun 1979/1980 dengan Team, maka naskah-naskah harus sudah selesai dicetak masing - masing sebanyak 40 exemplar pada akhir Desember 1979 dengan kewajiban masih harus menambah kekurangan data jika ternyata terdapat kekurangan setelah diadakan Evaluasi oleh Team Pusat.

Adapun jangkauan penelitiannya harus memenuhi Team of Reference (TOR) yang sudah ditetapkan, serta petunjuk pelaksanaannya.

Wilayah penelitiannya meliputi seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Naskah - naskah ini mungkin masih banyak kekurangannya, namun dengan telah selesainya naskah ini kami selaku Pemimpin Proyek IDKD NTB 1979/1980 menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua anggota Team, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya pekerjaan ini.

Terima kasih pula kami ucapkan khusus kepada Bapak - bapak Camat dan Kepala Desa yang secara langsung membantu dalam kegiatan ini terutama pada waktu pengumpulan data di daerah-daerah, baik dalam pemberian fasilitas maupun bantuan lain serta kerjasama yang diberikan.

Mudah - mudahan naskah ini ada manfaatnya bagi pembangunan Bangsa umumnya dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya. Terima kasih.-

Mataram, 31 Desember 1979
Pemimpin Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah Nusa Tenggara Barat
Tahun 1979/1980

Sri Yaningsih
NIP.130342147

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah : naskah : **Sejarah Masa Revolusi Fisik Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 1979/1980.**

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tarap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu - waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : **Lalu Wacana BA., Drs. Abd. Wahab H.I., Drs. Lalu Ahmad Muhidin, Djoko Sumpeno BA.**

dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : **Drs. Abdurrahman Surjomihardjo, Drs. AB Lopian, Drs. Bambang Sumadio, Sutrisno Kutoyo, Drs. M. Soenjata Kartadarmadja, Drs. Mardanas Safwan, Drs. Frans Hitipeuw, Masjkuri, Drs. Sumardi, Dra. Sri Soetjiatiningsih.**

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.-

Jakarta, 28 Januari 1982.

Pemimpin Proyek

Cap ttd.

(Drs. Bambang Suwondo)

NIP. 130117589

KATA SAMBUTAN
Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Nusa Tenggara Barat

Kami merasa bersyukur dengan terbitnya buku ini, karena memang sejak lama didambakan buku-buku kebudayaan terutama mengenai aspek-aspek kebudayaan Nusa Tenggara Barat.

Terlepas dari segala kekurangannya yang dapat disempurnakan pada penerbitan-penerbitan berikutnya, kami menganggap buku-buku seperti ini sangat bermanfaat bagi generasi muda kita yang wajib mengetahui, menghargai serta berbangga atas peristiwa dan aspek budaya yang pernah terjadi sehingga sekaligus merupakan usaha melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional kita. Setidak-tidaknya buku ini akan dapat berfungsi sebagai bahan bacaan yang bernilai ganda.

Semoga harapan-harapan yang terkandung dengan penerbitan ini tercapai adanya.

Akhirnya penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mempersiapkan naskah ini sampai kepada penerbitannya.-

Mataram, Juni 1982

Kepala Kanwil Departemen P dan K
Propinsi NTB,

ttd

ENDJO SUTARDJA
NIP. 130039758

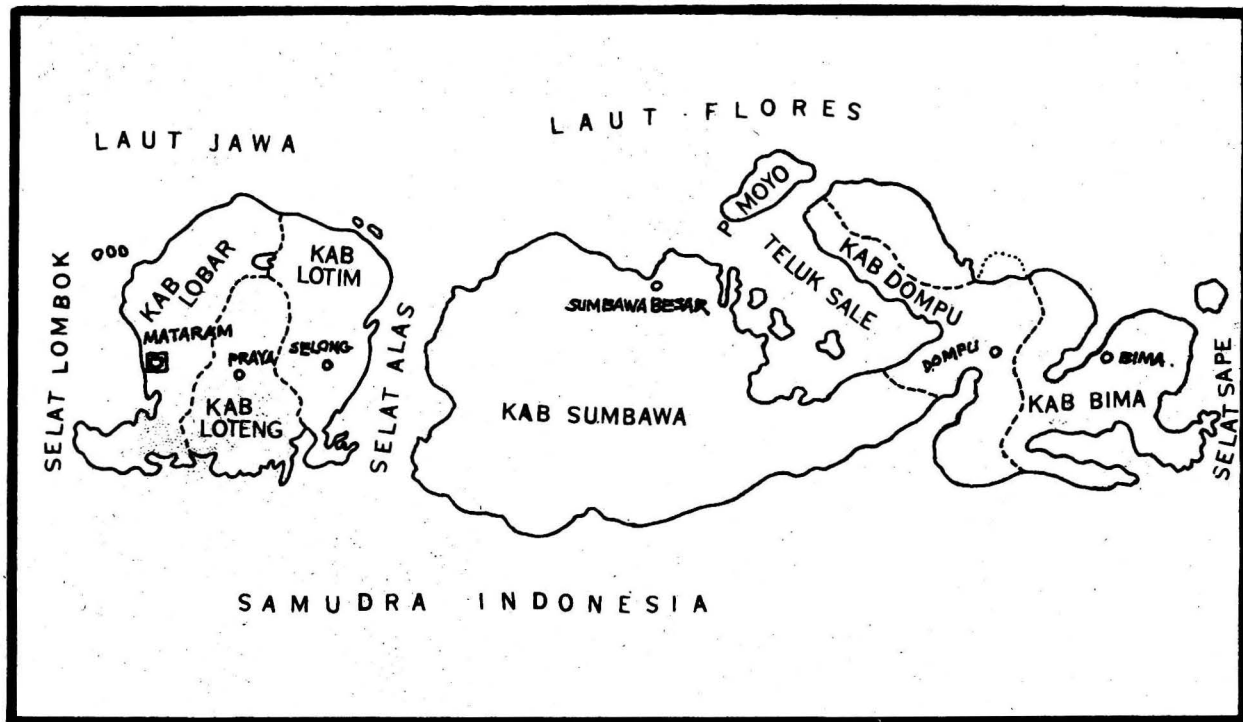
DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
PENGANTAR	iii
1. Kata Sambutan Kepala Kantor Wilayah Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Prop. N.T.B.	v
DAFTAR ISI	vii
 PENDAHULUAN	 1
A. TUJUAN PENELITIAN	6
B. M A S A L A H	7
C. RUANG LINGKUP	8
D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN	10
E. HASIL AKHIR	11
 Bab I : KEADAAN DIDERAH PADA MASA PEMERIN- TAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)	 12
A. BIDANG PEMERINTAHAN	12
B. BIDANG SOSIAL EKONOMI	14
1. Pertanian	14
2. Perdagangan, Industri dan Perhubungan	16
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA	18
1. Pendidikan	18
2. Seni Budaya	19
D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK/SOSIAL DAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL	22
 Bab II : KEADAAN DIDERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN	 27
A. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN AWAL DARI PROSES REVOLUSI KEMERDEKAAN (RE— VOLUSI FISIK) DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT	27
B. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMELITERAN (PERJUANGAN SENJATA)	30
C. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TEN- TARA NICA DI NUSA TENGGARA BARAT	33

Bab III : PERJUANGAN DI NUSA TENGGARA BARAT	39
A. PEREBUTAN SENJATA JEPANG	39
B. PERLAWANAN FISIK MENGUSIR NICA	43
Bab IV : PEMBENTUKAN NIT	50
A. PEMINDAHAN KEKUASAAN	50
B. GERAKAN PEMBERSIHAN OLEH NICA	52
C. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN	56
1. Tata Pemerintahan	56
2. Bidang Ekonomi	60
3. Bidang Sosial Budaya	62
Bab V : KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)	70
A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB	71
B. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN	72
1. Sosial, Ekonomi, Kebudayaan Dan Agama/Kepercayaan	71
2. K e p a r t a i a n	75
3. Bidang Pers	76
4. Bidang Kepemudaan	78
5. Bidang Kewanitaan	79
C. PELAKSANAAN HASIL KMB DI DAERAH	80
P E N U T U P	81
DAFTAR ARTI KATA (GLOSARIUM)	90
DAFTAR KATA DAN ISTILAH	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97
DAFTAR NAMA INFORMAN	98
LAMPIRAN - LAMPIRAN	102

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

1958 --- SEKARANG



PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah tahun 1979/1980 antara lain mencakup aspek sejarah daerah berupa penulisan tematis "Masa Revolusi Kemerdekaan" (Revolusi Fisik) 1945 - 1949 termasuk pula Daerah Nusa Tenggara Barat yang merupakan kelanjutan dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah tahun - tahun yang lalu.

Sebagaimana diketahui, bahwa daerah Nusa Tenggara Barat seperti halnya daerah - daerah lain di Nusantara ini, juga telah memegang peranan dalam perkembangan sejarah kebangsaan, sejak zaman pra - sejarah sampai saat ini. Hasil hutan, hasil bumi dan barang - barang tenunan mengakibatkan daerah ini ramai dikunjungi para pedagang pada masa - masa silam, sehingga tidak mengherankan bila kota - kota pelabuhan seperti Ampenan, Labuhan Haji, Labuhan Lombok, Alas, Sumbawa, Kempo, Sanggar, Bima dan Sape tumbuh dengan megahnya, justeru daerah ini merupakan jembatan yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.

Pada masa kebangkitan nasional, rakyat di daerah ini cukup memberikan andilnya dalam melawan kaum penjajah, antara lain terbukti dengan perlawanan rakyat Lombok pada tahun 1894 terhadap penjajah Belanda, Pemberontakan Undru tahun 1906 - 1907 di Sumbawa Besar, Perang Ngali tahun 1908 - 1909, Pemberontakan Donggo tahun 1910, Perang Dena tahun 1910 yang berlangsung di Bima.

Demikian pula peristiwa Sori Utu tahun 1942 di Dompu, peristiwa Sesait tahun 1943 di Lombok Barat, peristiwa Mamben tahun 1944, Lendang Marang, Labuhan Haji, Wanasaba tahun 1945, peristiwa Nggembe tahun 1945 di Bima, penyerbuan tangsi militer Belanda tahun 1946 di Selong Lombok Timur dan lain - lain lagi. 1)

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua buah pulau, yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa yang di sekitarnya dikelilingi oleh banyak pulau kecil, termasuk dalam gugusan pulau - pulau yang dahulu disebut Kepulauan Sunda Kecil dan kini lazim disebut Nusa Tenggara. Kepulauan ini sebagaimana diketahui telah dibagi dalam empat Propinsi Daerah Tingkat I, yaitu Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan terakhir Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Adapun pembentukan daerah ini bersama-sama Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kelanjutan dari Undang - undang Nomor 1 Tahun 1957 Lembaran Negara Nomor 6 - 1957 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak tanggal 18 Januari 1957 untuk seluruh wilayah Indonesia. 2)

Untuk jelasnya wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan ;

1. Undang - undang Nomor 64/1958, Lembaran Negara Nomor 115 -1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649, yang disahkan tanggal 11 Agustus 1958, yang diundangkan tanggal 14 Agustus 1958 dan disetujui D P R dalam Rapat Pleno terbuka ke - 85 tanggal 2 Juli 1958 pada hari Selasa, P 313/1958.
2. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat terbentuk, sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) RIS Nomor 21 tahun 1950 - Lembaran Negara RIS Nomor 59 tahun 1950, merupakan salah satu bagian dari Propinsi Nusa Tenggara dahulu, sedangkan pisahan lainnya ialah Daerah Tingkat I Bali dan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
3. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat meliputi Daerah Lombok Daerah Sumbawa yang lazim disebut "Daerah Pulau", sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dari staatsblad 1946 Nomor 143 (Pasal 1 ayat 2 a dan 2 b Undang - undang Nomor 64 tahun 1958), terletak di tengah - tengah/diapit antara Dati I Bali di sebelah barat dan N T T di sebelah timur dengan ibu kota pemerintahannya adalah kota Mataram, (pasal 2 - 1, UU. No. 64/1958) dan menurut Peta Bumi Nusa Tenggara Barat terletak di antara 115 derajat - 46', Bujur Timur, 119 derajat -46' Bujur Timur dan 8 derajat 5' Lintang Selatan, 9 derajat 5' Lintang Selatan, termasuk gugusan pulau - pulau Nusa Tenggara (dahulu bernama Sunda Kecil).
4. Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat meliputi enam buah Daerah Tingkat II, yaitu tiga buah di bekas Daerah Lombok dan tiga buah di bekas Daerah Sumbawa. Daerah - daerah Tingkat II ini dibentuk berdasarkan UU. No. 69 tahun 1958 (L.N.No.122 - 1958, Tambahan L.N.No.1655, disetujui D P R dalam rapat terbuka ke - 86 tanggal 2 Juli 1958 pada hari Selasa P 314/1958) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang disahkan pada tanggal 9 Agustus 1958 (UU. Nomor 69 tahun 1958, dua hari mendahului UU. No. 64

tahun 1958 tanggal 11 Agustus 1958) dan diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958.

Adapun ke enam Daerah Tingkat II tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Lombok Barat dengan diberi nama/menjadi Daerah Tingkat II Lombok Barat dengan ibu kota Mataram.
 - b. Wilayah Lombok Tengah dengan diberi nama/menjadi Daerah Tingkat II Lombok Tengah dengan ibu kota Praya.
 - c. Wilayah Lombok Timur dengan diberi nama/menjadi Daerah Tingkat II Lombok Timur dengan ibu kota Selong (a sampai c dimaksud Bijblad 14377).
 - d. Daerah Swapraja Sumbawa dengan diberi nama/menjadi Daerah Tingkat II Sumbawa dengan ibukota Sumbawabesar
 - e. Daerah Swapraja Dompu dengan diberi nama/menjadi Daerah Tingkat II Dompu dengan ibu kota Dompu.
 - f. Daerah Swapraja Bima dengan diberi nama/menjadi Daerah Tingkat II Bima dengan ibu kota Raba.
(pasal 1 - 2 dan 2 - 1, angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 UU Nomor : 69, tahun 1958).
5. Daerah - daerah Tingkat II ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari pasal 73 ayat 4 UU.No.1 Tahun 1957 dengan mengingat pasal 89, 131, 132, dan 142 UU Dasar Sementara RI dan setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat Panitia Negara dalam daerah - daerah Swatantra termasuk Kepres. No. 202 Tahun 1956, serta memperhatikan suara - suara rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan.
6. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Republik Indonesia tanggal 1 Juli 1978 Nomor 21 - 1978, Kota Mataram dijadikan Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara dengan ibu kota Mataram. 3)

Mengenai keadaan sosial budaya di daerah ini sama halnya dengan daerah - daerah lain di Nusantara yaitu pada masa penjajahan gerak - gerak masyarakat selalu diikuti dan diawasi, lebih-lebih lagi yang bersifat politis. Kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan sangat terbatas, justeru jumlah sekolah dan jenisnya terbatas pula di daerah ini. Sekolah - sekolah pada umumnya terdapat di kota Mataram, Praya, Selong, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima serta sebagian kecil di ibu kota Kedistrikan (Bima : Kenjelijan, Sumbawa : Kudemungan).

Sekolah - sekolah tersebut terdiri dari SD dan Sekolah Guru dua tahun, dan jika ada yang hendak meneruskan pelajaran setelah tamat sekolah tersebut harus mendapat persetujuan dari pimpinan pemerintahan (Sultan dan kaum penjajah). Demikian pula sekolah -sekolah swasta hanya beberapa buah seperti sekolah - sekolah agama antara lain Al - Irsyad, Al - Ittihad, Darul Ulum, Ibtidaiyah dan sekolah - sekolah umum : Schakelschool di Mataram dan Selong, Sekolah Cina yang didirikan oleh Chung Hwa Chung Hwi di Ampenan, Praya, Masbagik, Labuhan Haji, Sumbawa Besar dan Bima. 4)

Namun demikian setelah kemerdekaan, perkembangan dunia pendidikan di daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan angka perkembangan yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Penyebaran sekolah terutama SD, ke daerah - daerah terpencil, sehingga rakyat dapat menikmatinya.

Pada tahun ajaran 1979 anak usia sekolah sudah tertampung 86,9% . Jumlah SD 2.012 buah, SLP 125 buah, SLA 63 buah. 5) Jumlah ini belum termasuk sekolah - sekolah yang diselenggarakan oleh Departemen Agama maupun Departemen - departemen lainnya, juga belum termasuk sekolah - sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan swasta (Nahdatul Wathan, Muhammadiyah, Al-Maarif, Rabithah, Mahkamatusyariyah, Katholik, Hindu Dharma dan lain - lain). Pada tahun 1962 di daerah ini telah berdiri Universitas Mataram yang memiliki Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum dan Fakultas Peternakan ; di samping IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah juga pada tahun 1965 telah berdiri APDN. Selain itu terdapat pula IKIP yang memiliki Fakultas Pendidikan, Universitas Nahdatul Wathan, Perguruan Tinggi Keguruan Fakultas Ilmu Dakwah Cabang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kesemuanya itu diselenggarakan oleh swasta.

Adapun pembinaan kesehatan masyarakat jika dibandingkan dengan masa penjajahan dahulu, maka di Nusa Tenggara Barat cukup menggembirakan. Di tiap - tiap Kabupaten telah memiliki sebuah Rumah Sakit Umum, demikian pula di tiap kecamatan telah memiliki sebuah Puskesmas dan di samping itu ada pula Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Katholik. Dalam hal pelayanan Keluarga Berencana, daerah ini mendapat prioritas pertama dari Pemerintah Pusat dan saat ini di tiap Kabupaten telah berdiri BKK-BN Daerah Tingkat II Kabupaten, di samping itu BKKBN Daerah Tingkat I Propinsi yang berdiri sejak 1 April 1974.

Daerah Nusa Tenggara Barat adalah daerah agraris, karena itu mata pencaharian penduduknya sebagian besar berasal dari pertanian dan peternakan, di samping perikanan, perdagangan, kepegawaian, perburuhan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya daerah ini terkenal akan hasil eksportnya seperti sapi, kuda, kerbau kambing ; di samping hasil pertanian seperti kacang kedelai, kacang hijau, bawang merah/bawang putih dan lain-lain, sedangkan padi hanya untuk kebutuhan sendiri.

Dari segi kebudayaan dapat dikemukakan bahwa daerah Nusa Tenggara Barat adalah suatu daerah administratif yang di dalamnya tergabung berjenis - jenis kebudayaan, kesenian, peradaban, karakter, hukum adat dan adat - istiadat dan berbagai suku bangsa yang berlain - lainan, sehingga dapat dikatakan bahwa daerah ini bukan suatu daerah kultural yang berasal dari masyarakat adat. Itulah sebabnya kita tidak dapat mengatakan, bahwa kebudayaan yang ada saat ini di Nusa Tenggara Barat adalah kebudayaan Nusa Tenggara Barat, sebab bukan merupakan satu kesatuan yang bulat. Hal ini dapat dilihat dari susunan penduduk di Nusa Tenggara Barat yang secara etnologis terdiri dari empat suku bangsa asli yaitu :

1. suku bangsa Sasak yang bertempat tinggal di pulau Lombok.
2. suku bangsa Bali yang bertempat tinggal di Lombok Barat.
3. suku bangsa Sumbawa yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa.
4. suku bangsa Bima yang bertempat tinggal di Kabupaten Bima dan Dompu. 6)

Sedangkan suku - suku bangsa lainnya adalah merupakan bangsa pendatang seperti suku - suku bangsa Jawa, Sunda, Bugis, Melayu dan sebagainya. Dan sebagai akibat suku bangsa yang berlain - lainan ini menggambarkan/melahirkan kebudayaan suku bangsa tersebut. Sebagai contoh kebudayaan daerah (lokal) dapat dikemukakan :

1. Kebudayaan Sasak
2. Kebudayaan Bali
3. Kebudayaan Sumbawa
4. Kebudayaan Bima
5. Kebudayaan Pendatang.

Demikian pula dalam hal bahasa, terdiri dari bahasa daerah :

1. Bahasa Sasak
2. Bahasa Bali
3. Bahasa Sumbawa

4. Bahasa Bima

5. Bahasa - bahasa Pendatang. 7)

Selain dari pada itu dalam bidang keagamaan, di daerah Nusa Tenggara Barat hidup berdampingan agama Islam, Hindu Dharma Nasrani, Budha dan sebagian kecil agama Kong Fu Tse.

Terakhir mengenai batas wilayah/letak daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Nusa Tenggara Barat terletak antara 115 derajat 46' Bujur Timur dan 119 derajat 46' Bujur Timur, 8 derajat 5' Lintang Selatan dan 9 derajat 5' Lintang Selatan, termasuk gugusan pulau-pulau Nusa Tenggara (pulau - pulau Sunda Kecil dahulu).
2. Luas wilayah Nusa Tenggara Barat 19.855 km². Pulau Lombok 4.594,5 km² dan pulau Sumbawa 15.260,5 km².
3. Batas - batasnya, di sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah timur Selat Sape (Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur), di sebelah selatan Samudera Indonesia dan di sebelah barat Selat Lombok (Propinsi Daerah Tingkat I Bali).
4. Pulau Lombok dikelilingi pulau - pulau kecil yang disebut : Gili antara lain Gili Trawangan, Lawang, Sulut, Peteg, Maningki, Malaya, Batu, Nusa, Soro, Gede, dan lain - lain.
5. Pulau Sumbawa dikelilingi pulau - pulau kecil antara lain pulau Sorong, pulau Belang, Monta, Kalong, pulau Panjang, pulau Seringgi, Air Tawar, Kromo, Medang, Moyo, Sangiang dan Gilibanta. Dan di samping itu di Teluk Saleh terdapat pula pulau-pulau kecil antara lain Pulau Denger Besar, Pulau Liang, Ngali, Tengar, Kelapang, Dompou dan lain - lain.
6. Tinggi beberapa kota dan permukaan air laut :
 - a. Mataram : 16 meter.
 - b. P r a y a : 101 meter.
 - c. Selong : 148 meter.
 - d. Sumbawa : 20 meter.
 - e. B i m a : 13 meter.
 - f. D o m p u : 50 meter.

A. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan sejarah Tematis Daerah Zaman Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) tidak lain adalah :

1. Untuk menggali, mengumpulkan, mencatat, meneliti dan mengolah segala sumber sejarah/peristiwa sejarah di daerah guna dijadikan bahan pelengkap sejarah nasional.
2. Untuk mengumpulkan, mencari dan mengolah data-data sejarah Daerah baik yang baru, yang telah maupun yang belum pernah diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan yang merupakan pencerminan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan dan sasaran pola kebijaksanaan Kebudayaan Nasional.
3. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat, bahwa di Daerah Nusa Tenggara Barat pada Zaman Revolusi tidak kurang pentingnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia dalam rangka mengadakan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan terhadap kaum penjajah.
4. Untuk memperoleh gambaran dan data-data kepahlawanan di daerah ini guna bahan penelitian lebih lanjut.
5. Dan lain-lain tujuan yang bermanfaat dan berfaedah bagi kepentingan ilmu pengetahuan, masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu dalam penyusunan sejarah daerah ini kami berusaha untuk menampilkan materi/sumber apa adanya yang kami peroleh di daerah Nusa Tenggara Barat dan semata-mata kami menghindari hal-hal yang tidak pada tempatnya atau yang tidak pernah terjadi. Namun demikian kami mengakui dan menyadari, bahwa data-data sejarah yang kami peroleh belum lengkap, hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada pada kami, sehingga untuk sementara apa yang kami susun ini kami menganggap sudah memadai.

B. MASALAH.

Seperti kita ketahui, bahwa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi fisik) merupakan sebagian sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, justeru revolusi ini terjadi pada saat-saat di mana bangsa Indonesia sedang menata dan menyusun kekuatan di segala bidang baik moril maupun material sebagai kelanjutan/penjabaran dari pada negara dan bangsa yang telah diproklamasikannya itu.

Perjuangan dan perlawanan terhadap kaum penjajah bukan saja pada masa-masa ini, tetapi jauh sebelum itu, namun karena terjadinya penggalangan kehidupan bangsa dan negara, maka re-

volusi fisik ini mempunyai nuai kesejarahan yang penting. Nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia tercermin pada masa itu, sebab zaman ini merupakan zaman cobaan/ujian, apakah negara Indonesia dapat dipertahankan ataukah tidak.

Itulah sebabnya, perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia terjadi di mana - mana di seluruh pelosok tanah air, termasuk pula di Nusa Tenggara Barat, meskipun corak dan ragamnya berbeda - beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Proses perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia di daerah ini (pulau Lombok dan pulau Sumbawa) mempunyai ciri - ciri tersendiri di mana kaum pergerakan dan para pejuang menitik - beratkan perjuangan mereka kepada usaha - usaha yang bersifat sosial, sedangkan kepada soal - soal yang bersifat politik mereka sangat berhati - hati dalam segala tindak - tanduknya. Justeru organisasi massa/partai politik tidak dapat berkembang di daerah ini karena gerak - geriknya selalu diawasi/ditekan oleh pemerintah Belanda, namun anggota - anggota dari partai politik ini dengan diam - diam tersiar juga. Mereka mengikatkan diri dalam perkumpulan kematian, perkawinan, selamatan, sunatan dan sebagainya termasuk usaha sosial yang bersifat mendidik masyarakat misalnya dalam pengajian ilmu agama, maupun ilmu pengetahuan umum. Dari hasil penggemblengan melalui pendidikan inilah nantinya muncul pejuang - pejuang kemerdekaan yang gigih menentang kaum penjajah.

Jadi jelas, bahwa proses perjuangan kemerdekaan nasional di daerah ini pada dasarnya mempunyai tujuan satu yaitu mengusir kaum penjajah dari persada Nusantara, meskipun untuk mencapai tujuan itu menggunakan ciri - ciri, strategi dan taktik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi tematis Sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah Nusa Tenggara Barat, disesuaikan dengan sistematika yang telah ditentukan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Karena itu pembahasannya dititik - beratkan kepada segi - segi kehidupan tata pemerintahan, kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama/kepercayaan dan lain - lain sebagainya. Dan selain dari pada itu materi pembahasan bersifat ke-

daerahan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten se Nusa Tenggara Barat.

Oleh sebab itu dalam penulisan ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Pendahuluan.

Menguraikan tentang tujuan penelitian, masalah, ruang lingkup dan pertanggung-jawaban ilmiah prosedur penelitian.

Bab I : Keadaan di daerah pada masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942 - 1945).

Menguraikan tentang pemerintahan, sosial ekonomi, sosial budaya, dan interaksi di daerah dengan kegiatan organisasi politik/sosial dan kejadian bersejarah tingkat nasional.

Bab II : Keadaan di daerah sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Menguraikan tentang kegiatan masyarakat yang relevan dengan ataupun yang merupakan awal dari proses Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah, pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di daerah, pembentukan organisasi Kemiliteran (perjuangan bersenjata) di daerah dan kedatangan tentara Sekutu dan tentara Nica di daerah.

Bab III : Perjuangan di daerah.

Menguraikan tentang perebutan senjata Jepang. Masa Aksi Militer Belanda dan periode Perang Gerilya ; Interaksi di daerah dengan berbagai kejadian bersejarah tingkat nasional dan perjuangan masyarakat pada berbagai bidang kegiatan/kehidupan.

Bab IV : Pembentukan NIT.

Menguraikan tentang pemindahan kekuasaan, gerakan pembersihan oleh Nica, tata pemerintahan, dan sosial-budaya serta kehidupan agama dan kepercayaan pada periode itu.

Bab V : Keadaan di daerah menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik).

Menguraikan tentang masa menjelang persetujuan KMB, sikap masyarakat terhadap konperensi antar Indonesia, sikap masyarakat terhadap cita - cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan dan pelaksanaan hasil KMB di daerah.

Penutup.

Menguraikan tentang ringkasan atau rangkaian dari seluruh nas-
kah, daftar kata, apendix, daftar sumber dan lampiran.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN.

Penelitian dan penulisan sejarah daerah Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 6 Juli 1979 Nomor : 505/C.II/Sp. (salinan terlampir).

Dalam pada itu untuk melaksanakan tugas ini anggota Tim mendapat pengarahan/penjelasan dari Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Dan dalam bulan Juni 1979, Ketua Tim (Penelitian dan Penulisan Sejarah Daerah "Masa Revolusi Kemerdekaan") dipanggil oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Proyek Pusat) untuk mengikuti penataran bagi penulisan sejarah daerah ini. Dengan bahan dan hasil dari penataran ini Tim mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan guna menentukan langkah yang harus dipersiapkan dalam penulisan ini antara lain perencanaan program kerja, pembagian tugas dan lain sebagainya.

Sesuai dengan tujuan penulisan ini agar mendapatkan data-data yang cukup memadai, maka Tim menggunakan metoda wawancara yang sebelumnya diawali dengan metoda kepustakaan. Kedua metoda inilah yang digunakan oleh Tim, sehingga memperoleh bahan - bahan yang diperlukan, kemudian diolah dan dianalisa sebagaimana mestinya. Dapat dikemukakan, bahwa pengumpulan bahan/data, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan masalah dan ruang lingkup yang akan digarap. Hal ini disesuaikan pula dengan daerah penelitian/penyelidikan, justeru di Nusa Tenggara Barat secara etnis terdiri dari empat suku bangsa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Oleh karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan para anggota tim, demikian pula karena terbatasnya tulisan, artikel maupun buku yang berhubungan dengan penulisan ini, maka metoda wawancara yang banyak digunakan. Selain tidak adanya arsip pers daerah dan terlebih - lebih karena terbatasnya waktu, maka

pengujian fakta belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya, penulisan ini barulah merupakan taraf penampilan peristiwa - peristiwa sejarah yang dengan sendirinya memerlukan penelitian dan penyelidikan lebih lanjut pada masa mendatang demi kesempurnaan dan perbaikan dari pada naskah sejarah ini.

E. HASIL AKHIR

Naskah asli buku ini dikerjakan oleh suatu Tim di daerah sesuai dengan kerangka yang dibuat oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi kebudayaan daerah di Pusat kemudian diarahkan penilaian yang dilakukan oleh para tenaga ahli, tenaga Proyek di Pusat dan di daerah.

Berdasarkan penilaian tersebut dilakukan penyempurnaan selanjutnya disusun dengan pekerjaan editing. Hal - hal yang diperhatikan dalam editing ialah segi - segi : kebahasaan, seperti ejaan serta penggunaan istilah, supaya terpenuhi persyaratan kebahasaan. Juga diperhatikan segi pendekatan, dalam hal ini diusahakan agar memenuhi asas regiosentris yang telah disepakati.

Naskah ini merupakan hasil usaha inventarisasi dan dokumentasi kesejarahan perihal Revolusi kemerdekaan (Revolusi Fisik) 1945 - 1949 di daerah Nusa Tenggara Barat. Diakui bahwa dalam naskah ini belum semua kejadian yang berkenaan dengan tema tersebut tercakup di dalamnya. Naskah ini masih belum sempurna dan belum tuntas sepenuhnya, mengingat usaha ini adalah bersifat perintisan. Diharapkan usaha ini akan mendorong kegiatan penelitian dan penulisan kesejarahaan di daerah - daerah selanjutnya.

CATATAN

1. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Tahun 1978/1979, Sejarah Kebangkitan Nasional Nusa Tenggara Barat Tahun 1979, hal. 1.
2. Tim Penyusunan Monografi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Monografi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Jilid I, Tahun 1975, halaman 2 - 3.
3. Wawancara dengan Sekretaris Walikota Kota Administratif Mataram, tanggal 20 Desember 1979.
4. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Tahun 1978/1979, *op.cit.* halaman 3.
5. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pengumpulan Data Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1979.
6. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Tahun 1978/1979, *op.cit.* halaman 4.
7. *Ibid*, halaman 4.
8. *Ibid*, halaman 5.
9. Tim Penyusunan Monografi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Tahun 1975, *op.cit.* halaman 5.

B A B I

KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

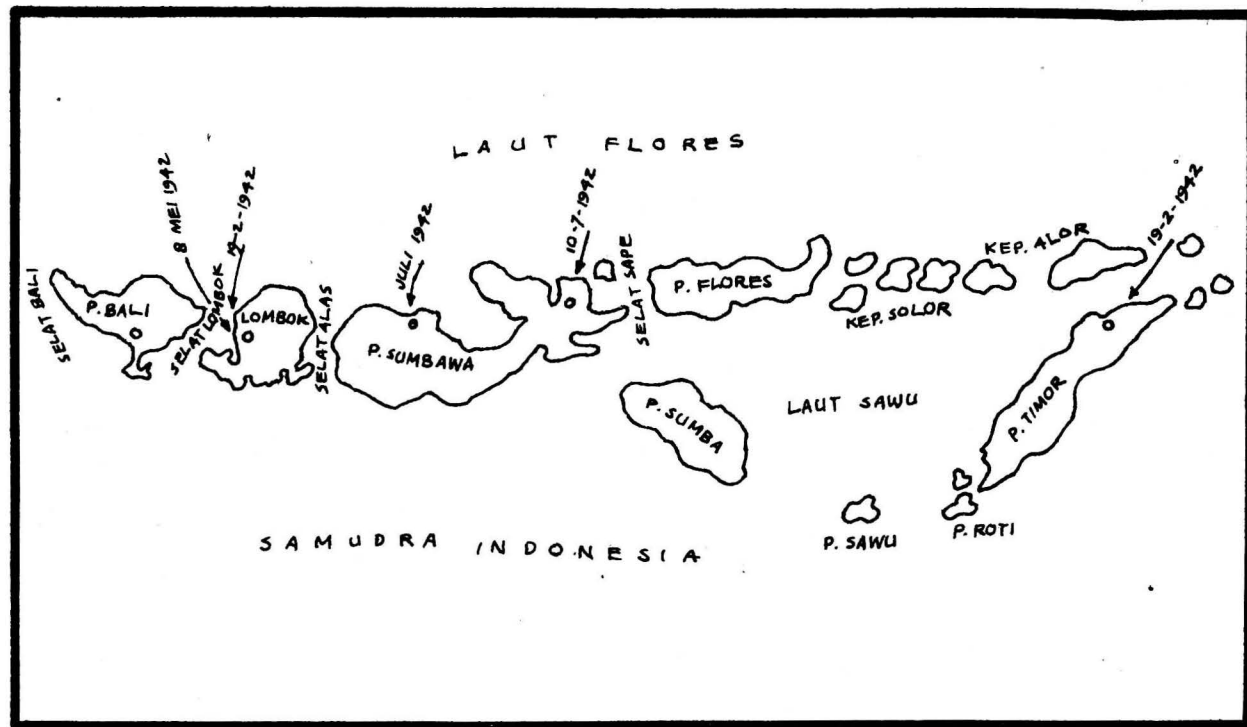
Dengan jatuhnya Bali, 19 Pebruari 1942 1) dan Timor 19 Pebruari 1942 2), maka daerah Lombok dan Sumbawa masing-masing bagian dari Karesidenan Bali dan Lombok serta Karesidenan Timor dan daerah wilayahnya, maka pendaratan Jepang di kedua pulau tersebut tidak ada masalah lagi. Kedua pulau tersebut tidak dijaga sama sekali oleh Pemerintah Belanda. Antara kejatuhan Bali dan Timor dengan waktu pendaratan Jepang di Lombok dan Sumbawa yang sekarang lebih terkenal dengan nama Nusa Tenggara Barat terdapat tenggang waktu beberapa bulan lamanya Setelah Bali bala tentara Jepang tidak langsung mendarat di Nusa Tenggara Barat, tetapi segala perhatian dicurahkan sepenuhnya terhadap usaha penaklukan pulau Jawa. 3)

Selama itu di pulau Lombok dan pulau Sumbawa seolah - olah terdapat vakum kekuasaan. Pejabat - pejabat pemerintah Belanda sibuk mengurus keselamatan diri dan keluarganya. Mereka tidak menghiraukan urusan pemerintahan lagi. Maka menjelang pendaratan balatentara Jepang di Lombok untuk mengisi kekosongan pemerintahan itu pejabat - pejabat pribumi mengambil alih pimpinan pemerintahan. 4) Semua Kepala Distrik di pulau Lombok di bawah pimpinan Mamiq Mustiarep, dalam pertemuan mereka di Selebung - Mantang menetapkan pulau Lombok diperintah oleh Presiden dengan Presiden I dijabat oleh Mamiq Wiranom. Kepala Sekretariat dijabat oleh Lalu Srinata dan I Gusti Bagus Ngurah. Tiap onder afdeeling diperintah oleh seorang Kepala Pemerintah, masing - masing :

1. Lombok Timur diperintah oleh Mamiq Mustiarep.
2. Lombok Tengah diperintah oleh Lalu Wirantanus.
3. Lombok Barat diperintah oleh Lalu Darwisah.

ZAMAN JEPANG

PENDARATAN BALA TENTARA JEPANG DI SUNDA KECIL (1942-1945)



Demikianlah pada waktu pendaratan Jepang di Lombok pemimpin pemerintahan sudah berada di tangan pejabat - pejabat pribumi yang otonom lepas dari pulau Bali. Demikian pula pimpinan pemerintahan di pulau Sumbawa, masing-masing bekas **onder afdeeling** Sumbawa diambil-alih oleh Swapraja Sumbawa dengan Sultannya Muhammad Kaharuddin, dan **onder-afdeeling** Bima-Dompu kembali sepenuhnya di dalam kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin pada 5 April 1942. Pendaftaran Jepang di pulau Lombok dilakukan dalam dua gelombang.

Pada tanggal 8 Mei 1942 Angkatan Laut Jepang mendarat di Ampenan (Lombok Barat) dan Angkatan Daratnya mendarat di Labuhan Haji (Lombok Timur) pada tanggal 12 Mei 1942. 5)

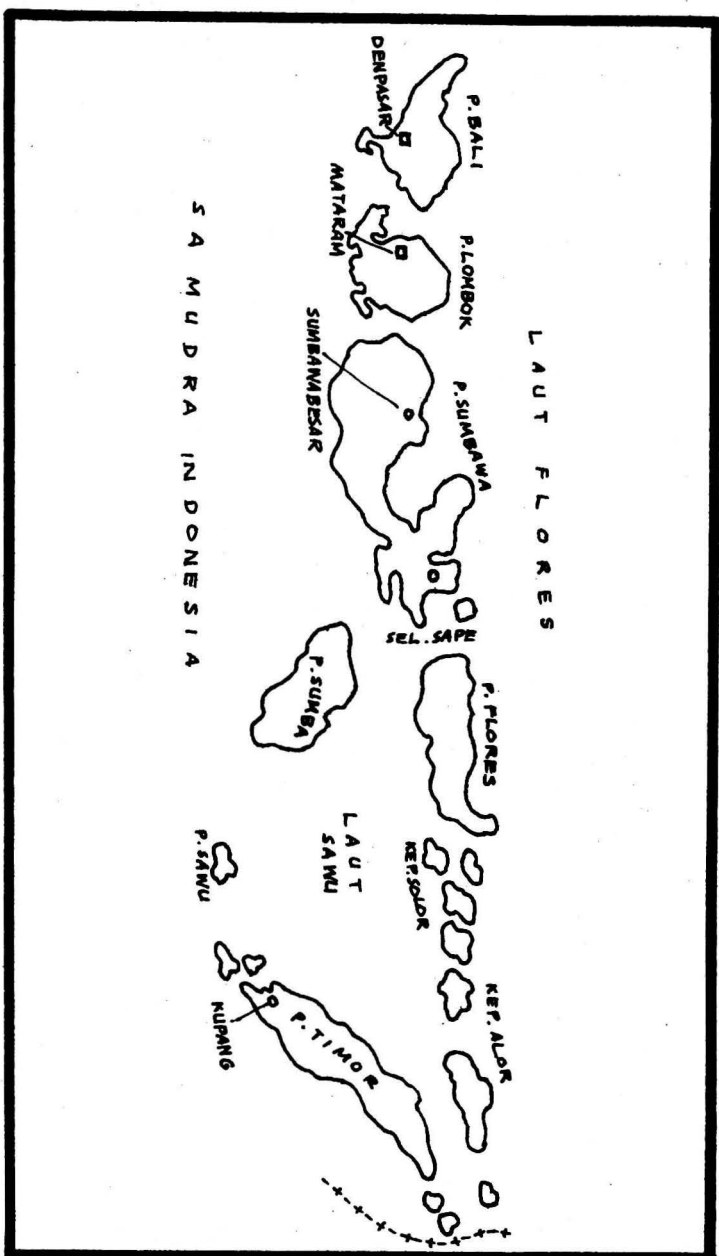
Di pulau Sumbawa baru mendarat pada bulan Juli 1942. Pendaratan di Bima pertama pada tanggal 17 Juli 1942 dipimpin oleh Kolonel Saito. Yang kedua di Sumbawa Besar pada bulan Juli yang dilakukan oleh Angkatan Darat. 6) Pendaratan Jepang di kedua pulau di atas tanpa mendapat perlawanan sedikit pun juga. Kedatangannya disambut dan dielu - elukan oleh pejabat pemerintah dan rakyat banyak. Sekalian orang Belanda ditangkap dan dikumpulkan di Mataram. Kecuali di Sumbawa sebab sejak April 1942 semua Belanda sudah melarikan diri ke Lombok. Pulau Lombok dan Sumbawa berada di bawah kekuasaan **Kaigun**, Armada Selatan Kedua. 7)

Struktur organisasi pemerintahan pun segera disusun. Perubahannya tidak seberapa bedanya dari pada struktur organisasi pemerintahan di zaman Belanda. Beberapa orang personal diganti tanpa mengindahkan aspirasi rakyat. Pulau Lombok dibagi dalam tiga daerah Bagian yang masing - masing disebut **Bun Ken**, masing - masing Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Demikian juga pulau Sumbawa dibagi atas dua buah **Bun Ken**, masing - masing Sumbawa **Bun Ken** dan Bima **Bun Ken**.

Pucuk pemerintahan yang tertinggi di Lombok **Ken** dijabat oleh seorang **Ken Kanrikan** yang berkedudukan di Mataram. **Ken Kanrikan** pulau Sumbawa berkedudukan di Raba - Bima. **Ken Kanrikan** Sumbawa **Ken** dijabat oleh Wakatsuki. Tiap **Ken** dibagi atas **Bun Ken**. Daerah bawahan **Bun Ken** meliputi **Gun** dan **Son**. **Gunco** dan **Sonco** dijabat oleh pejabat pribumi.

Untuk melancarkan usaha pemerintahannya di pulau Lombok di tiap **Ken** dan **Bun Ken** ditempatkan pejabat pribumi yang didatangkan dari pulau Bali masing - masing untuk di Lombok **Ken I Gusti Oka**, dan untuk di tiap **Bun Ken** Lombok Timur, Lombok Te-

SUNDA KECIL SYU ZAMAN JEPANG (1942-1945)



ngah dan Lombok Barat, berturut - turut I Gusti Made Mudra, I Gusti Made Kante dan I Gusti Bagus Ngurah. 8) Lombok **Ken** dan Sumbawa **Ken** masuk di dalam wilayah Sunda Kecil Syu (Keresidenan Sunda Kecil). Semasa pemerintahan Hindia Belanda pulau Lombok masuk Keresidenan Bali dan Lombok, sedangkan pulau Sumbawa masuk ke dalam Keresidenan Timor dan Daerah wilahnya.

Seluruh Dinas/Jawatan dipegang oleh orang Jepang. Hampir di tiap Dinas/Jawatan tingkat **Bun Ken** ada pejabat Jepang. Urusan keamanan dipegang oleh Polisi balatentara Nippon. Organisasinya yang terkecil sampai di tingkat **Gun** dengan nama **Nippon Gun Keisatsu Tai**. Kantor Pusat di tingkat **Bun Ken** disebut **Cikutai Honbu**. Dalam urusan pertahanan khusus di Bima **Bun Ken** yang berhadapan langsung dengan Australia ditempatkan seorang Panglima Sumbawa Timur (**Higasi Sumbawa Cikutai Co**) yang dijabat oleh Mayor Jeneral Tanaka.

B. BIDANG SOSIAL - EKONOMI

1. Pertanian.

Sejak Perang Dunia II pecah slogan Jepang yang terkenal dengan sebutan : Kemakmuran Bersama Di Asia Timur Raya, 9) sudah mulai terdengar di seluruh Nusantara. Peneterasi perdagangan Jepang terhadap Indonesia selama depresi ekonomi dalam tahun digapuluhan telah menarik simpati rakyat kecil kepada Jepang. Barang - barang **made Japan** pada saat itu dijual dengan murah. Sebagian besar rakyat Indonesia menganggap orang Jepang adalah bangsa yang pemurah dan yang beriktikad hendak meringankan beban rakyat yang sedang dihipit oleh sistem ekonomi Eropa yang telah menindas mereka beratus - ratus tahun lamanya.

Tetapi kemudian setelah Jepang menguasai Indonesia kenyataannya menjadi terbalik. Kebijakan Jepang di bidang ekonomi merupakan "kebijaksanaan perampokan". 10) Seluruh sektor ekonomi mereka kuasai. Terutama sektor ekonomi yang sangat vital diawasi dengan keras yang diatur di dalam undang - undang atau maklumat yang dikeluarkan oleh **Gunseikanbu**. Dengan dalih demi untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang berusaha mengumpulkan segala jenis barang ekonomi seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, bahkan perhiasan, besi dan senjata tajam. 11)

Padi yang dihasilkan harus diserahkan kepada Jepang dengan harga murah. Pengumpulan padi diselenggarakan oleh Mitsui. Menurut peraturan padi yang harus diserahkan hanya 10 %, tetapi di dalam praktek hampir separuhnya, tanpa melihat jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Sehingga tidak mengherankan kalau sebagian besar rakyat hidup kekurangan makanan.

Adalah suatu ironi yang tidak dapat dibantah di satu pihak rakyat kekurangan makanan, di pihak lain padi bertumpuk - tumpuk hampir di setiap kantor sonco (Kantor Kepala Desa). Seperti padi, hasil palawija pun dikumpulkan yang diselenggarakan oleh suatu badan yang disebut Cibono. Jepang juga mengadakan monopoli atas kapas. Rakyat tidak mempunyai hak atas kapas kecuali sebagai penggarap. Untuk usaha perkapasan ini Jepang menunjuk suatu badan usaha yang disebut Nanko. Rakyat tidak boleh memintal dan menenun atas namanya sendiri. Banyak sekali rakyat yang berpakaian karung dan tapis.

Untuk mensukseskan usaha Nanko pemerintah Jepang memberikan pengamanan dan fasilitas. Kekuasaan yang diberikan kepadanya hampir sama dengan militer. Nanko dapat mengerahkan tenaga rakyat sejumlah yang diperlukannya dengan upah yang rendah dan dapat menghukum mereka yang dianggap tidak disiplin atau pemalas. Tidak sedikit rakyat yang bekerja di ladang/perkebunan kapas yang mendapat hukuman dan cambukan. Tindakan Jepang demikian itu dinilai oleh rakyat sangat kejam dan bertentangan dengan adat lembaga yang sudah berlaku. Inilah yang menimbulkan perlawanan di desa Sesait Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat tahun 1943 yang dipelopori oleh Amaq Jaliah (penghulu Sesait). Perlawanan itu menimbulkan korban satu orang Jepang tewas dan belasan rakyat desa Sesait yang disiksa dan dipenjara tanpa prikemanusiaan. Mereka yang dipenjara sampai selesai Perang Dunia II hilang tiada tentu rimbanya.

Ternak yang dimiliki rakyat didaftar dan sebagian terutama yang besar - besar harus dijual kepada Jepang dengan harga yang amat rendah. Bahkan kadang - kadang ternak itu diambil saja oleh Jepang dan kaki tangannya tanpa ganti rugi. Urusan pengumpulan hewan diserahkan kepada Taiwan Taikutsang.

Keadaan pertanian mundur. Sebab - sebabnya antara lain karena petani kehilangan gairah oleh harga pasar yang amat rendah dan juga sebagian tanah pertanian terbengkalai karena pengerahan romusya untuk membangun pertahanan Jepang.

Seperti yang diatur di dalam **Osamu Screi No. 7** tentang harga pembelian padi sangat merugikan para petani karena harga terlalu rendah dibandingkan dengan harga barang - barang kebutuhan lainnya. Harga franko pabrik : padi bulu a' 100 kg f 3,80, padi cere a' 100 kg f 3,45 dan gabah f 4,15. 12) Larangan berlaku bagi pengangkutan beras antar desa, antar daerah dan antar pulau. Peraturan di atas sangat memberatkan penghidupan rakyat. Terutama rakyat di kota sangat kekurangan makanan sedangkan rakyat di desa kekurangan kopi dan gula yang mereka butuhkan. 13)

Kebijaksanaan Jepang di bidang pertanian ialah selain untuk memenuhi kebutuhan juga adalah untuk memenuhi kebutuhan perang. Maka rami dan jarak pun harus ditanam oleh rakyat yang mengurangi produksi palawija. Setiap tanah kosong terutama pekarangan harus ditanami jarak. Hasilnya diserahkan kepada Jepang dengan imbalan jasa yang rendah dan kebanyakan rakyat tidak menerimanya. Di samping itu Jepang juga mengusahakan perkebunan jarak dan kapas dengan mengerahkan tenaga rakyat.

Di daerah - daerah kritis usaha Jepang ini sangat bermanfaat bagi rakyat karena terbukanya lapangan pekerjaan baru. Kebun kopi milik rakyat dan swasta seperti yang terdapat di Mantang, Seteling dan Tambora diawasi dengan ketat. Distribusinya disalurkan melalui pemerintah atau berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Perdagangan, Industri dan Perhubungan.-

Termakan oleh propaganda Jepang bahwa di bawah kekuasaan Jepang harga barang - barang akan serba murah maka menjelang pendaratan Jepang di pulau Lombok dan Sumbawa toko - toko mengobral barang - barang dengan harga yang murah. Pedagang-pedagang yang cerdik menyembunyikan atau menanam barang-barang di dalam rumah.

Ketika Jepang mendarat di pulau Lombok dan di pulau Sumbawa toko - toko sudah kosong. 14) Pada periode ini pada umumnya perdagangan menjadi lumpuh. Barang - barang kebutuhan semakin langka. Maka untuk mencegah kenaikan harga barang-barang yang melampaui batas sementara segala alat pembayaran yang berlaku di zaman Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Barang - barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui penyalur - penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk mencegah manipulasi setiap jenis barang ditentukan harganya. Setiap kali diadakan operasi

penggeledahan atas toko - toko yang dicurigai menyimpan barang-barang. Peredaran barang - barang di seluruh daerah diawasi dengan ketat. Secara lokal setiap **Son** melaksanakan autarki. Pengangkutan beras antar desa yang tanpa izin dilarang. Bagi yang melanggar kalau kedapatan berasnya dirampas. **Seinendan** dan **Keibodan** bertindak sangat tegas dan keras, kadang - kadang meliwati batas. Urusan impor dan ekspor dipegang langsung oleh Jepang. Tetapi karena faktor keamanan dan blokade Amerika Serikat kedua usaha di atas dapat dikatakan lumpuh.

Sehingga untuk mencukupkan kebutuhan perang maupun kebutuhan rakyat sehari - hari diusahakan dari produksi dalam negeri. Tetapi karena faktor musim di beberapa tempat seperti di Sumbawa Barat dan di daerah Bima produksi padi berkurang. Menurut produksi juga disebabkan oleh karena kekurangan tenaga kerja. Pengerahan **romusya** secara paksa telah menimbulkan malapetaka yang menimbulkan akibat berantai. Produksi menurun, bahaya kelaparan mengancam penduduk. Penyakit kulit dan kutu badan berjangkit. Tingkat kesehatan dan kebersihan sangat rendah. Di samping kekurangan makanan rakyat juga kekurangan pakaian, sehingga kebersihan sulit terjamin. Di antaranya ada yang berpakaian karung dan tapis. Usaha perkapasan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan. Distribusi diadakan dengan memakai karcis yang terbatas. Kain - kain distribusi mutunya sangat rendah. Kesulitan pakaian itu juga disebabkan oleh kesalahan kebijaksanaan pemerintah. Sistem monopoli yang dijalankan pemerintah di bidang perkapasan telah menekan inisiatif masyarakat untuk bertenun karena ketakutan akan hukuman dari pihak pemerintah. Di desa - desa yang mempunyai tradisi bertenun, mengusahakan pertenunan secara sembunyi - sembunyi yang sangat menghambat produksi. Selain itu bahan bakunya sulit didapat karena Jepang mengharuskan rakyat menjual kapasnya hanya kepada Pemerintah saja.

Akibatnya harga barang kebutuhan pokok di pasaran gelap tidak terkendalikan lagi. Pada waktu itu di Lombok Barat pernah seseorang menukar selembur kain batik dengan sebidang sawah seluas 0,50 Ha. 15) Selain harganya mahal, barang - barang sandang langka sekali. Barang - barang industri lainnya seperti gula di salurkan dengan memakai kupon. Kebanyakan terbatas teruntuk bagi pegawai negeri dan dibagi setiap awal bulan.

Di bidang perhubungan juga mengalami kemunduran. Alat-alat pengangkutan kurang sekali. Selain jumlahnya hanya sedikit bahan bakarnya juga memakai arang. Alat selebihnya ialah dokar,

cikar dan sepeda dengan ban buntu. Perhubungan antar pulau menjadi sepi karena keamanan di laut tidak terjamin lagi. Perhubungan pantai dilakukan dengan sampan bercadik dan perahu layar. Sarana komunikasi demikian pula. Kebanyakan orang menyampaikan berita dengan mengirim utusan dan untuk jarak dekat dilakukan dengan alat-alat tradisional yaitu : beduk/tong-tong. 16)

C. BIDANG SOSIAL - BUDAYA

1. Pendidikan.

Sampai pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda keadaan pendidikan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa dibandingkan dengan daerah lain tergolong masih mundur. Ketika Jepang mulai berkuasa Mei 1942 diskriminasi pendidikan dihapus. Semua pendidikan tingkat Sekolah Dasar kecuali yang letaknya terpencil dijadikan Sekolah Rakyat 6 tahun. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Untuk memenuhi kebutuhan guru bagi Sekolah Rakyat yang ada Jepang membuka Sekolah Guru 2 tahun (**Syoto Syihan Gakko**) di Mataram, Selong, Sumbawa Besar dan Raba, Sekolah Guru 4 tahun (**Guto Syihan Gakko**) di Praya kemudian dipindahkan ke Selong. Sekolah Menengah 3 tahun juga dibuka di Mataram.

Murid - murid digembleng mental dan fisiknya. Semangat Jepang (**Nippon Seisyin**) ditanam secara intensif di setiap dada mereka, guru - guru dilatih dan diisi dengan semangat Jepang. Mereka diajar bahasa Jepang dan **Taiso** serta baris - berbaris.

Di semua tingkat sekolah digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran yang utama. Bahasa Jepang juga diajarkan mulai kelas 3. Bahasa daerah terdesak dan hanya di pergunakan sebagai bahasa pengantar sampai kelas 3.

Dalam usaha pembinaan fisik dan mental murid - murid diharuskan kerja bakti (**kinrohosi**). Mereka bergotong - royong menanam padi, menunai, membersihkan tempat - tempat ibadah, jalan-jalan dan lain - lain. Setiap pagi sewaktu hendak masuk kelas terlebih dahulu harus mengucapkan janji pelajar dalam bahasa Jepang. Dan setiap hendak memulai pelajaran dan sewaktu akan pulang anak - anak **seikeire** ke arah istana **Tenno Haika** di Tokyo. Juga setiap apel bendera murid - murid harus menghormati bendera Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, **Kimigayo**, lagu-lagu lain dan mars perjuangan anti Inggris dan Amerika. Murid-murid diajar **Taiso** dan baris - berbaris dengan kepala gundul dan pet terbuat dari tapis. Perang - perangan juga diajarkan dengan menyandang tongkat bambu sepanjang 1½ meter.

Demikianlah sistem dan pelaksanaan pendidikan di Zaman Jepang diselenggarakan secara militer. Murid - murid digembleng fisik dan mentalnya dalam rangka memenangkan perang Asia Timur Raya. Mereka diajarkan bertindak, bersikap dan bertingkah laku militer. Guru - guru pun mirip pelatih/instruktur dari pada seorang pendidik. Mereka juga adalah propagandis di sekolah dan di masyarakat. Mereka itu dilatih di Selong, Sumbawa Besar, Bima dan Mataram.

Selain sekolah negeri sekolah swasta juga diberi berkembang di bawah pengawasan pemerintah. Sekolah Agama di Pancor dan Kediri berjalan sebagai biasa. Tetapi ketika murid - murid sekolah swasta juga harus *seikeire*, *taiso* dan baris - berbaris maka pesantren di Kediri di bawah Tuan Guru Haji Muhammad Hafidz membubarkan diri. Sekolah - sekolah Agama di daerah pulau Sumbawa berjalan biasa di bawah asuhan PIB (Persatuan Islam Bima) Muhammadiyah dan Sekolah - sekolah swasta yang langsung diselenggarakan oleh kesultanan.

Sekolah asing Cina dan Arab pun diberi kesempatan berkembang dengan wajar. Yayasan sekolah Cina yang terbesar ialah **Chung Hwa Chung Hwi** yang berpusat di Ampenan (Lombok Barat). Sekolahnya terdapat di Ampenan Cakranegara (Lombok Barat), Praya (Lombok Tengah) dan Labuhan Haji dan Masbagik (Lombok Timur). Di Sumbawa terdapat di Sumbawa Besar dan Bima.

Pada umumnya perkembangan sekolah mundur. Kuantitasnya tetap dan kualitasnya merosot. Ilmu pengetahuan tidak berkembang, mereka kebanyakan dilatih ketangkasan fisik. Prasarana dan sarana pelajaran kurang sekali bahkan lebih banyak sekolah yang sama sekali tidak mendapat alat - alat pelajaran. Buku - buku pelajaran semakin berkurang karena rusak dan hilang. Pensil dan kertas tidak terdapat lagi di pasar. Distribusi pun tidak ada. Maka untuk memenuhi kebutuhan banyak sekolah yang menganjurkan murid - muridnya memakai kertas bekas dan pemecahan batu tulis pengganti anak batu tulis. Guru - guru menggunakan batu kapur sebagai kapurnya. Maka tidak mengherankan juga kalau di sekolah murid - murid lebih banyak bernyanyi, *taiso* dan baris - berbaris.

2. Seni Budaya.

Seperti pendidikan, kebudayaan pun mengalami kemandekan. Sebelum Perang Dunia II pada umumnya perkembangan kebudayaan, khususnya kesenian dan adat - istiadat ditunjang oleh aktivitas masyarakat dalam penyelenggaraan ritual dan *crisis rites*. Pada Zaman Jepang hampir semua aktivitas masyarakat ditujukan bagi

memenangkan Perang Asia Timur Raya. Keramaian dan upacara adat jarang sekali. Kebanyakan upacara adat dilakukan dengan sederhana sesuai dengan keadaan masyarakat yang dalam keadaan serba sulit. Masyarakat juga dalam keadaan serba ketakutan. Maka sesuai dengan tujuan kesenian pada waktu itu sebagai alat propaganda, yang banyak berkembang ialah sandiwara, kesenian ini diorganisasi oleh Badan Propaganda di bawah pimpinan Mamiq Padelah. Badan Propaganda ini mengadakan pementasan keliling sampai di pulau Bali.

Anak - anak sekolah pun dikerahkan untuk bermain sandiwara. Tema cerita kebanyakan mengenai peperangan atau diangkat dari cerita rakyat Jepang. Isinya mengandung propaganda yang menggelorakan semangat berjuang dan berkorban untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Penontonnya dikerahkan sebanyak-banyaknya terutama murid - murid sekolah dengan gratis. Bagi Jepang semakin banyak penonton semakin baik. Melalui kesenian Jepang ingin menanamkan dan menyebarkan seni budaya Jepang.

Perubahan nilai - nilai sosial yang mendadak telah membungkam masyarakat. Mereka berusaha sedapat mungkin tidak berhubungan dengan urusan pemerintah. Maka itu mereka berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan. Namun mereka tetap mempertahankan pola - pola masyarakat tradisional, walaupun perubahan - perubahan dari sekeliling mereka terus mendesak. Semuanya itu berlangsung sangat cepat dan di luar kekuasaan mereka menolaknya. Di antaranya ada yang sangat mendasar yang menyangkut adat - istiadat dan kepercayaan, seperti misalnya di Lombok, sebelum Perang Dunia II dianggap tidak sopan seseorang penduduk asli yang masuk kampung dengan memakai pantalon, dan tabu benar menurunkan padi dari lumbung pada hari Jum'at, atau naik lumbung lebih dari sekali sehari. Dan beberapa tabu lainnya dalam masyarakat telah dilanggar. Pola - pola lama terus terdesak oleh pola - pola baru yang ditimbulkan situasi perang yang sedang berkecamuk.

Mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal berlangsung dengan perlahan. Dalam masyarakat Sasak, Sumbawa dan Bima terdapat tiga lapisan sosial, yakni **kaula** (orang biasa), **priyayi** dan **bangsawan**. Di dalam lingkungan agama Islam terdapat golongan Islam Waktu Lima dan Islam Waktu Telu. Khusus Islam Waktu Telu ini terdapat di pulau Lombok. Di samping agama Islam ada juga agama Hindu, Budha - Budhi dan animisme seperti yang dianut oleh sebagian besar orang - orang Donggo di daerah Bima. Kaula merupakan golongan yang terbesar yang hidup sebagai petani di

desa - desa dan buruh kecil di kota - kota dan pelabuhan. Selebihnya menjadi nelayan dan tengkulak atau dagang kecil - kecilan. Golongan priyayi terdiri dari pegawai - pegawai rendah di kantor-kantor, guru - guru dan pegawai swapraja. Golongan bangsawan adalah keturunan raja - raja di zaman dulu yang turun - temurun sampai zaman Jepang memperoleh hak-hak istimewa dan prioritas untuk menjabat jabatan - jabatan desa dan Kepala Distrik. Golongan bangsawan ini juga di zaman Belanda dibebaskan dari kerja rodi

Golongan Islam Waktu Lima dan Islam Waktu Telu dibedakan oleh ketaatan mereka menjalankan syareat agama dan oleh pandangan hidup. Golongan Islam Waktu Lima adalah golongan yang konsekuen menjalankan ajaran agama seperti termaktub di dalam Al - Qur'an dan Hadist dan seluruhnya adalah mazhab Syafei. Sedangkan golongan Islam Waktu Telu menyerahkan urusan ibadahnya kepada pimpinan Agama yang disebut guru atau kiyai. Kiyai pun tidak sepenuhnya menjalankan syareat agama, misalnya mereka hanya sembahyang dalam waktu - waktu tertentu saja. Antara mereka tidak terdapat keseragaman. Seolah - olah terbagi dalam kelompok - kelompok menurut lingkungannya. Yang terpenting di antaranya antara lain : Kelompok Sembalun, Kelompok Tanjung, Bayan, Kelompok Pengadangan, Kelompok Pujut, dan Kelompok Rembitan. Tiap kelompok mempunyai perhitungan dan pandangan yang berbeda - beda dalam menetapkan mulai dan berakhirnya puasa pada bulan Ramadhan. Juga berbeda mengenai sembahyang mana yang terpenting. Para pengikutnya sama sekali tidak diwajibkan mengerjakan ibadah, kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat pada waktu seseorang laki-laki akan dinikahkan. Golongan Islam Waktu Telu ini juga tidak mengharamkan minuman keras dan berpegang teguh kepada pola - pola adat - istiadat tradisional.

Demikianlah kedua golongan masyarakat agama di atas masing - masing dibesarkan dalam lingkungan dan nilai moral yang berbeda. Kesemuanya mempengaruhi individu dalam bertindak dan bersikap yang membentuk kepribadiannya. Perbedaan kedua golongan ini mulai lahir di Lombok sejak mulai kebangkitan Agama Islam dari tidurnya pada awal abad ke - XX yang disertai dengan masuknya idiologi politik ke pedesaan pada tahun 1920.

Kedatangan Jepang di Lombok membawa perubahan. Sikap golongan Waktu Telu yang kurang penyesuaian dan selalu mengisolasi diri terhadap setiap pembaharuan dianggap oleh Jepang suatu sifat yang tidak baik. Terlanggarnya beberapa tabu telah membangkitkan kesadaran mereka bahwa adat - istiadat serta pola

fikiran tradisional tanpa ilmu pengetahuan sama sekali tidak dapat menanggapi tantangan zaman.

Rakyat mulai menyadari bagaimana Jepang mengambil pembantu - pembantunya, seperti : *seinendan*, *heiho*, (*kaigun* dan *rikugun*) *keibodan*, peta dan lain - lain itu kesemuanya adalah dipilih dari orang - orang yang sudah pernah bersekolah. Sedangkan orang - orang yang tidak berpendidikan cukup menjadi *romusya*. Dan rakyat pun menyadari bagaimana pendatang - pendatang dari luar yang membaurkan diri dengan penduduk pada umumnya adalah rata - rata orang yang berpendidikan dan menjadi agen pembaharuan di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

Banyaknya tabu yang terlanggar juga telah menimbulkan erosi kepercayaan dan alam fikiran dan menjelmakan sikap dari apatis menjadi sikap waspada. Hal - hal di atas merupakan unsur yang mendorong mereka bergerak ke arah pembaharuan sikap mental dari pasif menjadi aktif yang akan memberi corak baru bagi pembangunan masyarakat di masa mendatang

Pada zaman Jepang kesadaran mereka tidak dapat terwujud menjadi karya nyata karena selalu diliputi oleh rasa ketakutan dan keraguan dan serba ketidak - tahuan tentang keadaan dunia luar yang sebenarnya. Pemerintah Jepang sangat ketat mengendalikan media komunikasi massa. Surat kabar, majalah, radio dan sandi-wara diawasi dengan keras. Maka selain jumlahnya langka, juga isinya sangat sepihak. Rakyat tidak mendapatkan informasi yang jujur. Di Nusa Tenggara Barat surat kabar yang masuk antara lain Asia Raya, *Kan Po* dan terbitan lokal *Bali Shinbun*. Isinya disesuaikan dengan kehendak Jepang. Fikiran - fikiran atau pendapat yang tidak sesuai dengan kehendak Jepang dilarang.

Hal yang sangat menggembirakan pada Zaman Jepang itu adalah perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat. Pemakaiannya merata di semua kantor dan sekolah bahkan sampai masuk ke desa. Sifatnya yang demokratis memberikan dorongan kepada pemakainya untuk selalu mempergunakannya dalam setiap pembicaraan untuk menghindari penggunaan bahasa daerah yang dirasakan kurang demokratis.

D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK, SOSIAL DAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL.

Kemenangan Jepang atas Sekutu di Indonesia menimbulkan kekaguman di kalangan rakyat di Nusa Tenggara Barat. Rakyat te-

lah lama sebelumnya mendengar tentang kehebatannya sebagai bangsa Asia yang dapat menandingi bangsa Barat. Dan kini dia dapat menghancurkannya tanpa ampun. Rakyat telah melihat sendiri betapa kepanikan orang - orang Belanda sementara Jepang belum mendarat di Nusa Tenggara Barat. Semuanya terkesan pada setiap dada putera dan puteri Nusa Tenggara Barat bahwa mitos Belanda tidak terkalahkan menjadi sirna sama sekali.

Kini yang terbayang di dalam tiap hati mereka yang masih polos, bahwa kemakmuran di bawah Pemerintahan Jepang akan segera menjadi kenyataan. Kedatangan Jepang di Nusa Tenggara Barat disambut oleh rakyat dengan perasaan gembira. Sepanjang jalan yang dilaluinya rakyat berbaris mengeluh - elukannya sambil mengacungkan bendera **Hinomaru** di tangannya. Keramahan dan keterbukaannya memberi kesan dan menanamkan keyakinan bahwa kedatangannya benar - benar sebagai akan membawa kemakmuran seluruh rakyat.

Barulah timbul keragu - raguan setelah beberapa bulan kemudian. Kekerasan Jepang mulai tampak sejak ia mulai menata kembali pemerintahan. Tak satu pun aspirasi rakyat yang diwujudkan. Larangan demi larangan mulai tumbuh susul menyusul dan berapat dilarang. Sekolah - sekolah agama yang didirikan oleh suatu badan atau yayasan swasta diperiksa dan diteliti, kemudian kebebasannya dibatasi. Semua perkumpulan yang bersifat politis harus dibubarkan, kecuali perkumpulan - perkumpulan yang sifatnya hiburan (misalnya perkumpulan yang bertujuan pelesir dan senang - senang, gerak badan, kesenian, drama dan sebagainya). Tetapi sebelumnya pemimpinnya harus bersumpah bahwa tidak akan menjalankan aksi politik.

Sementara itu Pemerintah Jepang segera mempropagandakan Gerakan Tiga A (Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia). Pelaksanaannya diserahkan dan dipercayakan kepada suatu Badan Propaganda Pimpinan dan anggotanya terdiri dari orang Indonesia dan Asing yang berpengaruh di dalam masyarakat. Di antaranya badan propaganda yang terdapat di Lombok dipimpin oleh Mamiq Padelah dengan anggota - anggotanya : Lalu Durahman, Lalu Srinata, Mamiq Muhammad dan Go Sing Cong dan dari pulau Sumbawa ditunjuk antara lain : Idris M. Jafar, M. Amin Daeng Emo, dan Haji Abdulwahab.

Dalam melaksanakan tugasnya, badan ini mempergunakan kesenian sebagai media komunikasi dengan rakyat. Pertunjukkan selalu didahului dengan pidato - pidato yang menggerakkan dan

mendorong rakyat agar meningkatkan produksi pertanian dan menggiatkan usaha lainnya bagi kemenangan Perang Asia Timur Raya. Sebab kemakmuran Asia Timur Raya hanya akan tercapai apabila Perang Asia Timur Raya dapat dimenangkan.

Di samping itu juga membentuk organisasi khusus pemuda dengan nama **Fujinkai**. Tetapi karena sifat masyarakat Nusa Tenggara Barat waktu itu masih sangat tertutup dan tradisional, maka organisasi pemuda hampir tidak mendapat sambutan dari masyarakat. Di waktu itu wanita - wanita Nusa Tenggara Barat masih jarang sekali yang sudah berpendidikan dan karena sifat masyarakatnya yang sangat tradisional itu wanita - wanita masih agak tabu menampakkan diri dan berkumpul apalagi berbaris di muka umum. Terlebih lagi di zaman perang. Organisasi pemudanya pun semula tidak mendapat sambutan seperti yang diharapkan. Tetapi setelah melalui propaganda dan janji yang muluk - muluk banyak juga pemuda yang tertarik masuk **Seinendan** dan **Keibodan**. Yang menolak pun tak kurang pula karena pengaruh orang tua mereka yang masih kolot.

Para **Seinendan** dikerahkan untuk memobilisasi potensi sosial ekonomi masyarakat. Usaha yang utama ialah mengumpulkan barang - barang (besi tua, kuningan, keris, pedang, senter, emas, perak dan barang - barang logam lainnya), padi, kapas, jarak dan ternak. Semangat pengorbanan, persaudaraan dan berkarya nyata dibangkitkan sehebat - hebatnya melalui propaganda langsung maupun secara tak langsung melalui pertunjukkan kesenian (sandiwara dan lagu - lagu yang membakar semangat). Semua kekuatan sosial ekonomi dan kultural serta kekuatan politik yang ada dikerahkan bagi memenangkan Perang Asia Timur Raya. Dan agar **Seinendan** lebih aktif dan produktif kader - kader pimpinan **Seinendan** dilatih dan di pusat - pusat latihan **Seinendan** yang dalam bahasa Jepangnya disebut **Cou Sein** **Kurensyo**.

Meskipun maksud usaha Jepang membentuk **Seinendan** dan **Keibodan** adalah untuk mempersiapkan terbentuknya alat peperangan Jepang 17), tetapi mereka cukup berlatih dengan senapan bambu. Senjata mereka hanya cukup pisau dan pentung. Namun demikian mereka cukup disegani oleh rakyat.

Di samping itu Jepang juga menciptakan dua jenis barisan pekerja yaitu **Heiho** dan **Romusya**. **Heiho** adalah pembantu **Heita** yaitu pembantu tentara. Ia merupakan suatu barisan pekerja yang dimiliterisasi dan menjadi bagian langsung dari balatentara Jepang yang terbagi dalam kesatuan (kompi) dan diberi nomor kode seperti lazimnya pada organisasi ketentaraan Jepang serta dima-

sukkan kepada kesatuan Angkatan Perang yang menduduki daerah di mana kesatuan Heiho itu dibentuk atau kemudian ditempatkan. 18) Pangkat setinggi - tingginya adalah sersan. Mereka hanya dipersenjatai dengan sangkur. Karena maksud pembentukan bukan untuk berperang tetapi hanya sebagai tenaga pekerja.

Tetapi pada saat - saat terakhir perang Dai Toa ada juga yang dipersenjatai terutama yang ditugaskan berjaga di pantai - pantai dan yang mengawal kubu - kubu pertahanan. 19)

Jenis barisan pekerja yang kedua ialah Romusya. Yang arti sebenarnya adalah tidak lain dari tenaga pekerja atau kuli dalam bahasa Indonesia. 20) Pengerahan Romusya melalui Kepala Distrik untuk dipekerjakan di berbagai proyek balatentara Jepang. Ada yang membuat jalan, gua - gua, membuka tanah pertanian, lapangan terbang, pelabuhan dan sebagainya. Mula - mula pengerahannya secara baik - baik, tetapi setelah pengerahannya tidak lancar lagi menjadi suatu paksaan.

Jepang keliling dengan truk dan menangkap setia laki - laki di mana saja ia jumpai. Di jalan dan di pasar. Mereka langsung dibawa ke lokasi proyek tanpa memberitakannya kepada keluarganya. Banyak sekali di antara Romusya yang meninggal karena malaria atau disiksa oleh Jepang. Dari sejumlah 375 orang yang dikirim ke Kalimantan Timur, yang dapat kembali lagi hanya 40 orang. Di situ mereka hidup kekurangan makanan. 21)

Tindakan Jepang yang demikian itu menyebabkan rakyat hidup dalam ketakutan. Rakyat jarang yang berani melalui jalan raya. Hal itu menimbulkan kesulitan di bidang kehidupan sehari - hari. Peredaran hasil bumi dalam daerah menjadi terhalang. Di mana - mana Seinendan berkeliaran menjaga peredaran barang - barang terutama bahan makanan (beras) dan kapas antar desa.

Sekitar tahun 1943 Jepang mulai terdesak oleh Sekutu. Maka itu Jepang berusaha memberi janji - janji yang muluk-muluk untuk memikat hati rakyat. Untuk mendapatkan tenaga perang yang terlatih, Jepang membentuk tentara sukarela yang disebut Pembela Tanah Air (PETA) pada bulan September 1943, berdasarkan Osamu Seirei No. 44. Kemudian diselenggarakan latihan - latihan khusus untuk para perwira PETA yang terdiri dari tokoh - tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Indonesia maupun pemuda - pemuda pelajar. 22)

Dari Nusa Tenggara Barat ditunjuk untuk mengikuti latihan itu adalah Abdul Kahir Putera, putera Sultan Bima. Setelah mengikuti latihan itu di Jawa beliau kembali ke Bima dengan pangkat Daidanco. Di daerah Bima beliau membentuk Peta di tiap-tiap Ke-

jenelian (Kedistrikkan). Para prajuritnya dikerahkan dari pemuda-pemuda desa yang sudah berpendikan. Dengan didampingi oleh Tim perwira dan bintara Jepang, Putera Abdul Kahir melaksanakan latihan bagi calon-calon prajurit Peta yang berpusat di Nungga Kecamatan RasanaE. Komandan latihan dipegang oleh Hosino, seorang perwira Jepang.

Pada awal revolusi pemuda - pemuda eks-PETA tersebut sangat berguna bagi pembentukan tenaga inti BKR dan API. Di antara mereka itu antara lain : Abdul Majid, Abdul Hamid, Hasan Abbas, Ismail Abdurrahman, Yusuf Jafar, Landa Kumbe, Ahmad Hasanuddin, Ahmad Abdurrahman, Yakub Ompu Kali, Hasan Hoi H. Nur, Belumba Renda, Hasan Kempo, Bahnan. Singke Amin, Masran dan lain - lain.

CATATAN

1. Drs. Ktut Sudiri Panyarikan S.H., Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, Jakarta, 1967, halaman 27.
2. Drs. Makmun Salim, Ikhtisar Perang Dunia II, Jakarta, 1971, hal. 143.
3. I b i d, halaman 143.
4. Wawancara dengan H. Moh. Hijaz, tanggal 5 September 1979.
5. Wawancara dengan Bernadus, tanggal 20 September 1979.
6. Wawancara dengan A.D.Talu, tanggal 12 September 1979.
7. Margono, Ikhtisar Sejarah Pergerakan Nasional (1908 - 1945), Jakarta, 1971, Halaman 175.
8. Wawancara dengan Mamiq Padelah, tanggal 18 Oktober 1979.
9. Margono, *op.cit.* halaman 170.
10. Drs. Makmun Salim, *op.cit.* halaman 172.
11. Wawancara dengan H.M.Thayeb Abdullah, tanggal 11 September 1979.
12. Gunseikanbu, Buku Pengumpulan Undang - Undang, Jakarta, 2604, hal. 66 - 67.
13. Wawancara dengan Miji, tanggal 4 Nopember 1979.
14. a. Wawancara dengan H.Moh.Hijaz, tanggal 5 September 1979.
b. Wawancara dengan L.Mala, tanggal 10 Oktober 1979.
c. Wawancara dengan Saleh Ntobu, tanggal 10 September 1979.
15. Wawancara dengan H.Syahrudin, tanggal 20 Nopember 1979.
16. Wawancara dengan M.Saleh Popy dan Ibrahim Ibnu, tanggal 14 September 1979
17. Drs.C.S.T.Kansil S.H. dkk, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Jakarta, halaman 48.
18. Margono, *op.cit.* halaman 192.
19. Wawancara dengan Haji Akmaluddin, tanggal 6 September 1979.
20. Margono, *op.cit.* halaman 192.
21. Wawancara dengan Dahrin, tanggal 12 Oktober 1979.
22. Wawancara dengan A.D.Talu, tanggal 12 September 1979.
Wawancara dengan L.Manja Abdulmajid, tanggal 15 September 1979.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN DENGAN ATAU PUN YANG MERUPAKAN AWAL DARI PROSES REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK) DI DAE- RAH NUSA TENGGARA BARAT.

Sejak pecahnya Perang Dunia II komunikasi dengan pulau Jawa bagi umum hampir terputus sama sekali. Terutama mengenai berita kekalahan Jepang dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak s. orang pun yang dapat mengetahui tepat pada waktunya. Walaupun di daerah Bima berita kapitulasi Jepang kepada Sekutu dibocorkan oleh beberapa orang opsir Jepang, antara lain oleh Kapten Hasino, Inspektur PETA, tetapi sedikit pun tidak memberitakan mengenai Proklamasi. 1)

Beberapa peristiwa penting seperti penyerahan urusan pemerintahan kepada pejabat - pejabat bumiputera oleh Jepang sama sekali tidak memberi kesan bahwa situasi politik yang terpenting sudah terjadi. Di pulau Lombok Jepang menyerahkan urusan pemerintahan kepada anggota - anggota Syukai Gi In yang berpengaruh di masyarakat pada tanggal 18 Agustus 1945. 2)

Jabatan **Ken Kanrikan** diserahkan kepada Raden Nuna Nuraksa dan jabatan **Bun Ken Kanrikan** Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat masing - masing dijabat oleh Mamiq Padelah, Lalu Srinata dan I Gusti Bagus Ngurah. **Ken Koku Dosi Kai** atau Sumber Darah Rakyat (Sudara) dibubarkan. Anggota - anggota seperti Mamiq Ripaah, Mamiq Muhammad dan Lalu Abdurrahman (Durahman) dikembalikan kepada jabatannya yang semula, masing - masing sebagai asisten distrik dan kepala distrik (**gunco**). 3)

Di pulau Sumbawa kekuasaan diserahkan kepada Sultan masing - masing. Sultan Bima menerima kekuasaan pemerintahan dari Jepang pada tanggal 31 Agustus 1945. Pada rapat penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang kepada bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 di Mataram yang dipimpin langsung oleh **Ken Kanrikan**, beliau sama sekali tidak menyinggung latar bela-

kangnya kecuali menjelaskan hanya sedikit saja bahwa antara Jepang dengan Sekutu sudah diadakan perdamaian. Di beberapa tempat di pulau Sumbawa bendera putih dikibarkan Jepang sebagai tanda damai. Namun urusan keamanan yang menampakkan kekuasaannya masih di tangannya. Rakyat masih tetap menyenganya.

Berita mengenai Proklamasi 17 Agustus 1945 pertama kali diketahui di Nusa Tenggara Barat pada awal September 1945 dari pemuda - pemuda pelajar Bima, M.Nur Husain dkk. yang datang dari Singaraja. Kedatangan mereka di Lombok dan di pulau Sumbawa memang sengaja diutus oleh Ida Bagus Manuaba, Ketua Komite Nasional Indonesia Sunda Kecil di Singaraja. Mereka ditugasi membawa surat - surat yang ditujukan kepada Pimpinan Pemerintahan setempat dan kepada semua anggota Syukai Gi In asal Nusa Tenggara Barat, antara lain : Mamiq Padelah, Lalu Durahman, Lalu Srinata, Go Sing Cong, I Nengah Metra, Idris M. Jafar, M. Amin Daeng Emo dan Abdulwahab. Selain memberitakan tentang telah terjadinya proklamasi, juga surat berisi instruksi agar di Nusa Tenggara Barat segera dibentuk KNI dan pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih. 4)

Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan itu pun segera tersiar luas di kalangan pemimpin dan pemuda. Para pemuka masyarakat dengan didukung oleh para pemuda mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkrit untuk mewujudkan pemerintahan yang merdeka dan berdaulat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Pemerintah pun segera berunding dan mengutus Raden Nuna Nuraksa ke Bali menghadap Gubernur Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja yang diangkat oleh Presiden pada tanggal 22 September 1945. Gubernur Sunda Kecil menetapkan struktur dan organisasi pemerintahan di pulau Lombok dan mengangkat masing - masing sebagai berikut :

1. Raden Nuna Nuraksa, menjabat Kepala Daerah Lombok.
2. I Gusti Bagus Ngurah, Kepala Pemerintah Lombok Barat.
3. Lalu Srinata, Kepala Pemerintah Lombok Tengah.
4. Mamiq Padelah, Kepala Pemerintah Lombok Timur.

Pada akhir September 1945 Pemerintah Lombok menyelenggarakan rapat di Mardibekso Mataram yang dihadiri oleh wakil-

wakil seluruh masyarakat. Rapat menetapkan dan bertekad hendak menyelamatkan Proklamasi dan mendesak pemerintah agar segera membentuk Badan - badan Perjuangan. Pada tanggal 15 Oktober 1945 pengoperan kekuasaan pemerintahan secara resmi dari tangan Jepang kepada bangsa Indonesia dilaksanakan di Mardibekso Mataram. Bendera Kebangsaan dikibarkan pada hari itu dan Lombok menyatakan diri masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Penyerahan kekuasaan di Lombok ini sebenarnya adalah kelanjutan dari penyerahan kekuasaan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Kaigun Minseibu kepada Gubernur Sunda Kecil pada tanggal 8 Oktober 1945.

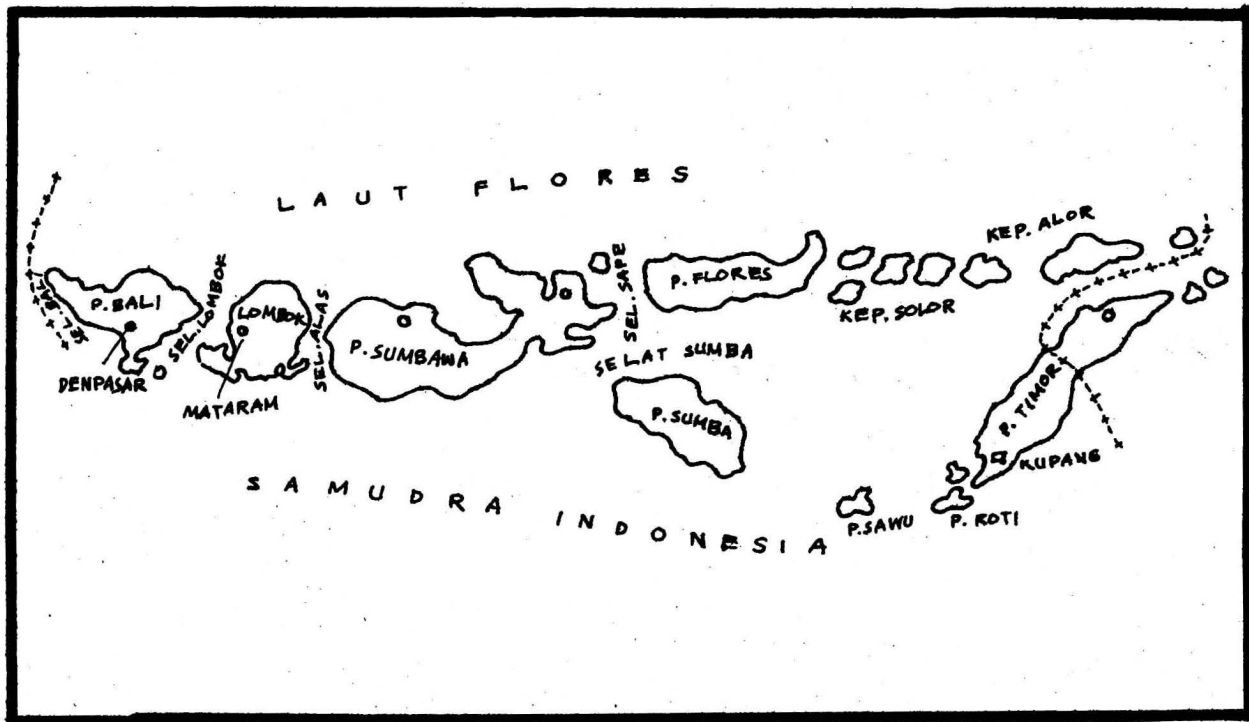
Sementara itu di Kecamatan Tente - Bima Panitia Komite Nasional Indonesia dibentuk oleh pemuda - pemudanya pada tanggal 24 September 1945 tanpa sepengetahuan Sultan Bima. Pada waktu itu Sulta masih ragu - ragu. Surat yang dikirim oleh Ketua KNI Sunda Kecil beliau simpan tidak disampaikannya kepada alamatnya. Di luar pusat pemerintahan berita mengenai Proklamasi tersebar luas yang dipropagandakan oleh Panitia Persiapan KNI Tente. KNI Tente juga berusaha mempengaruhi tokoh - tokoh pemerintah dan masyarakat agar KNI daerah Bima segera dibentuk.

Situasi politik juga semakin panas. Terpengaruh oleh situasi yang demikian itu memperlancar jalannya perjuangan. Baik Sultan Bima maupun tokoh - tokoh lain seperti Idris M. Jafar, Jeneli RasanaE dan M. Amin Daeng Emo Jeneli Dompu menyetujui pembentukan KNI seperti yang disarankan oleh para pemuda. Sedangkan pemerintah Jepang bersikap pasip. Pada tanggal 18 Nopember 1945 KNI Bima terbentuk selanjutnya disusul dengan pembentukan KNI di tiap - tiap Kejenelian di seluruh Bima.

Sementara itu datang pula ke Lombok, R. Hollan, utusan Gubernur Sunda Kecil dengan beberapa orang temannya dan dua orang utusan Bung Tomo dari Jawa masing - masing Sukardi dan Sunardi. Setelah memberikan petunjuk - petunjuk dan pesan dari Bung Tomo, Sukardani meneruskan perjalanannya ke Kesultanan Sumbawa. 5) Beliau tiba di sana pada awal September 1945 dan langsung berhubungan dengan Persatuan Pegawai Sumbawa (PPS) yang diketuai oleh Lalu Abdul Wahab.

Demikianlah pada awal Oktober 1945 KNI di Sumbawa terbentuk, di Lombok Komite Nasional Indonesia terbentuk pada tanggal 8 Oktober 1945. KNI Sumbawa diketuai oleh dr. Ariotejo dan Sekretarisnya Muhammad Zain Anwar. KNI Daerah Lombok dipimpin oleh Hasmo Soewignjo dan D.A.Komenit masing - masing sebagai Ketua dan Sekretaris.

PROPINSI SUNDA KECIL (1945-1946)



Dalam usahanya yang paling mendesak KNI memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk segera menyelenggarakan pengibaran bendera Merah Putih dan menyusun personil pemerintahan yang sesuai dengan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan untuk lebih memantapkan kesatuan pikir dan kesatuan gerak di dalam menghadapi suasana politik yang semakin hangat KNI daerah Sumbawa mengutus Lalu Mala dan Sumadi untuk menemui Pemerintah Pusat di Jakarta. 6)

Setelah bekerja keras dan meyakini sebagian besar rakyat yang telah bertekad hendak membela Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sang Saka Merah Putih pun dikibarkan secara resmi yang disaksikan oleh segenap lapisan masyarakat. Di Lombok pengibaran bendera kebangsaan secara resmi terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Di daerah Bima dengan mengambil tempat di halaman istana upacara pengibaran dilakukan dengan khidmat pada tanggal 31 Oktober 1945 yang dihadiri oleh Sri Sultan Bima, tokoh - tokoh masyarakat dan pemuda beserta dua ribu rakyat dengan semangat yang berkobar - kobar. 7)

Pada kesempatan itu telah berpidato berturut - turut Sultan M. Salahuddin, Idris M. Jafar, Ishaka Abdullah, M. Thayeb dan Muhammad, masing - masing menguraikan mengenai sebab - akibat pengibaran Sang Merah Putih, arti bendera, arti kemerdekaan dan pembelaan kemerdekaan. Berdasarkan surat perintah Sultan Bima tertanggal 31 Oktober 1945 keesokan harinya tanggal 1 Nopember 1945 upacara pengibaran bendera kebangsaan dilakukan di tiap kejenelian.

Tidak itu saja, bahkan pemerintah mengharuskan setiap pegawai, murid dan setiap anggota masyarakat memakai lencana Merah Putih, dan mempergunakan salam "Merdeka" di mana saja bila bertemu antara dua orang warganegara.

B. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN (PERJUANGAN SENJATA).

Pada waktu terbentuknya KNI badan - badan perjuangan lainnya seperti : Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Palang Merah Indonesia juga dibentuk. Tenaga intinya dikerahkan dari bekas Heiho, Seinendan, Keibodan dan PETA. Dalam waktu yang singkat BKR telah terbentuk sampai ke desa - desa yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan merelakan dan mendorong pemuda - pemudanya untuk menjadi anggota BKR. Ada pula pe-

muda - pemuda yang mengorganisasi dirinya dalam Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan badan - badan perjuangan dan politik lainnya seperti yang terdapat di daerah Lombok, antara lain : Badan Perjuangan Rakyat Indonesia (BPRI), Persatuan Umat Islam Lombok (PUIL), BASMI, Banteng Hitam dan Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan lain - lain. Pembentukannya sesuai dengan kondisi dan tingkat perjuangan. Demikianlah bentuk dan jenis badan-badan perjuangan dan politik itu berubah - ubah.

Pertama kali ketika BKR terbentuk di Bima dipimpin oleh M. Thayeb Abdullah. Dan kemudian setelah kedatangan lima orang pemuda utusan pemerintah Pusat, Ishaka Saleh, Husny Abbas, Henklary, Hermanus dan Kunanto dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah pimpinan Putera Abdulkahir dan Angkatan Muda Indonesia (API) di bawah pimpinan M. Thayeb Abdullah atas saran mereka sesuai dengan pengalaman mereka di Jawa. 8) TKR dan API menghimpun para pemuda yang terpecah dalam berbagai kelasykaran daerah.

Dalam keorganisasiannya TKR merupakan satu Batalyon dengan markas pusatnya di Cenggu - Belo. Batalyon dibagi atas beberapa Kompi dengan satu markas daerah RasanaE yang meliputi kota Bima, Raba di bawah pimpinan Ismail Abdullah dan Akhmad Abdullah.

API pun demikian pula. Selain Markas Pusat yang berkedudukan di Raba - Bima.

1. Markas daerah Woha yang meliputi Kejenelian Woha, Belo Monta yang berpusat di Tente dan dipimpin oleh Aman Yusuf, Abdurrahman Akhmad.
2. Markas daerah Bolo yang meliputi Kejenelian Bolo, Kejenelian Donggo, Kejenelian Dompu, Kejenelian Kempo, Kejenelian Sanggar dipimpin oleh Akhmad Anwar & Akhmad Hasanuddin
3. Markas daerah Sape yang meliputi Kejenelian Sape, Kejenelian Wawo, dipimpin oleh Mustamin A. Rahman dan Majid.

Di daerah Lombok BKR terbentuk pada tanggal 8 Oktober 1945 dengan pimpinan : Suwoco, Sukardi, Ramli, Munajit, Hanafiah dan lain - lain.

BKR daerah bagian Lombok Timur dipimpin oleh M. Asmo, Putrajab, Aci Harta, Hasan, M. Amin, H. Nasruddin dan lain - lain merupakan tenaga penggerak dan pembakar semangat perjuangan dengan melaksanakan prioritas utama bagi penyusunan barisan-barisan keamanan rakyat dan pasukan lasykar rakyat dari tingkat

daerah bagian, kedistrikan dan desa - desa. Tiap - tiap BKR di berbagai tingkat masing - masing membentuk pasukan tempur. Seperti BKR di Aikmel ibu kota Asisten Distrik Masbagik Timur di bawah pimpinan Lalu Jaya, Abdurrahim, Rawisah, Bapak Isna dan lain - lain membentuk suatu pasukan tempur yang diberi nama BASMI.

Di samping itu pada tanggal 16 Januari 1946 di Lombok Timur di bentuk pula Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang berpusat di Surabaya. Badan perjuangan API dibentuk atas anjuran dan dorongan pimpinan KNI daerah Lombok, Sukardi dan Ramli kembalinya dari menghadiri Kongres Pemuda seluruh Indonesia di Yogyakarta pada bulan Nopember 1945. Pemimpin API Lombok Timur dipercayakan kepada Hasan (Ketua), Lalu Thohir (Wakil Ketua), Rasyidi (Penulis) dan anggota masing - masing mereka itu adalah : Fatimah, Suwarso, Denah dan Nuraksi. 9)

Di Swapraja Sumbawa BKR terbentuk di bawah pimpinan Lalu Manja Abdul Majid (bekas PETA). Tenaga - tenaga intinya diambil dari bekas **Heiho**, **PETA**, **Seinendan**, **Keibodan**, **Butai & Sontai**.

Demikianlah di seluruh Nusa Tenggara Barat tidak satu pun daerah bagian yang tidak mendukung kemerdekaan dengan membentuk badan - badan perjuangan yang anggota - anggotanya terdiri dari orang - orang dan pemuda-pemuda yang ikhlas berkorban demi nusa dan bangsa.

Di mana - mana latihan badan perjuangan itu digiatkan. Para pelatihnya terdiri dari mereka yang bersemangat dan mahir serta terlatih dari Zaman Jepang. Dukungan rakyat dan seluruh pimpinan masyarakat memberi semangat dan moril yang tinggi kepada pasukan. Sebaliknya penampilan mereka dalam latihan - latihan di lapangan dan jalan - jalan telah memberi kebanggaan di kalangan masyarakat, sehingga simpati dan partisipasi masyarakat semakin bertambah - tambah juga karena sifat latihan yang demonstratif di medan terbuka sekaligus berfungsi sebagai alat **propaganda** dan pembinaan mental masyarakat dari semua lapisan **tak ada yang terkecuali**.

Suara dan pekikan "merdeka" berkumandang dan bergetar sampai ke pelosok - pelosok desa yang paling terpencil sekalipun. Sang Saka Merah Putih berkibar di tiap - tiap kantor dan sekolah. Setiap orang laki perempuan, bahkan setiap anak sekolah berusaha dan dengan perasaan bangga memakai lencana Merah Putih di dadanya. Semangat perjuangan semakin meningkat dan siap membela kehormatan dan martabat negara walaupun dengan hanya mempergunakan senjata tradisional dan bambu runcing.

Palang Merah Indonesia (PMI) demikian pula. Pengurusnya aktif berlatih dan mengusahakan dana bagi keperluan operasinya setiap saat diperlukan. Mereka bergerak membantu korban perang dan orang - orang yang menderita akibat keadaan yang ditimbulkan oleh perang. Di samping sebagai seorang humanis mereka juga adalah pejuang - pejuang yang menyediakan dirinya bagi kepentingan bangsa dan negaranya.

C. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI NUSA TENGGARA BARAT.

Sesuai dengan keputusan Konferensi Gabungan Kepala Staf Sekutu di Postdam pada bulan Juli 1945, pendaratan dan pendudukan Indonesia diserahkan kepada pasukan Inggris yang tergabung dalam SEAC (*South East Asia Command*) di bawah pimpinan Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten. Oleh karena wilayah SEAC terlampau luas (termasuk juga Birma, Muang Thai, Indonesia dan Semenanjung Malaya), khusus untuk Indonesia dibentuk komando baru yang disebut AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*) dengan panglimanya Letnan Jenderal Sir Philip Christison, sedangkan tugas pasukan Australia adalah untuk menduduki daerah Indonesia bagian Timur. Pasukan Australia ini berada di bawah pimpinan Jenderal Thomas Blamey. 10)

Sebelum pendaratan Jenderal Sir Thomas Albert Blamey memerintahkan penyebaran maklumat dan perintah dari udara kepada seluruh rakyat Indonesia yang berdiam di sebelah timur Selat Lombok dan Selat Makasar yang pada pokoknya berisi pemberitahuan dan perintah : 11)

1. Tanggal 2 September 1945 Kaesar Jepang menanda tangani surat penyerahan tanpa syarat di Tokyo.
2. Berdasarkan perintah umum no. 1 Tentara Laut dan Tentara Darat Jepang, semua tentara Jepang harus menyerah kepada Sekutu.
3. Di daerah Indonesia Timur Jepang harus menyerah kepada Jenderal Sir Thomas Albert Blamey.
4. Semua penduduk dan semua tawanan diperintahkan agar tetap tenang, tentara Serikat akan segera membebaskan mereka.

Maklumat Jenderal Sir Thomas Albert Blamey yang lain yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia bagian timur yang terdiri dari 7 pasal pada pokoknya berisi perintah agar Pemerintah Militer Jepang tetap menjaga keamanan, keselamatan rakyat dan

tawanan perang, seluruh perusahaan, hak milik umum maupun hak milik pribadi sampai pemerintah militer Jepang diganti oleh NICA (**Nederland Indies Civil Administration**). Semua pegawai harus membantu Pemerintah Militer Jepang di dalam melaksanakan tugasnya, karena Pemerintah yang sah (NICA) akan dipulangkan ke negerinya. Maklumat di atas disusul pula dengan perintah dari Jenderal Sir Thomas Albert Blamey yang menegaskan agar pemerintah militer Jepang melaksanakan semua perintah Sekutu agar memelihara keamanan, ketenteraman rakyat dan tawanan perang, sekalian harta benda milik perorangan maupun umum. Kepada semua pegawai dan seluruh rakyat agar ikut membantu Jepang. Seluruh rakyat dilarang keras melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang - undang yang mengganggu ketertiban dan kesejahteraan rakyat. 12) Kesemuanya untuk mempercepat pengembalian orang Jepang ke negerinya dan Pemerintah Belanda yang sah.

Dari maklumat dan perintah di atas yang disebarakan dari udara di seluruh wilayah, rakyat memahami bahwa Sekutu bermaksud hendak mengembalikan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Memang sejak semula Inggris sangat terikat oleh perjanjian Chequers yang lazim dikenal dengan nama **Civil Affairs Agreement** yang ditanda - tangani tanggal 24 Agustus 1945. 13)

Inggris akan membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Itulah sebabnya dalam setiap pendaratan tentara Sekutu, turut serta pasukan Belanda. Menyadari semuanya itu rakyat bertambah kesal. Seluruh kekuatan yang tergabung di dalam badan - badan perjuangan disiagakan terus. Rakyat tidak rela dijajah lagi, kecuali hanya sedikit saja rakyat yang mengharapkan kedatangan NICA. Antara rakyat yang pro dan kontra dengan NICA mulai saling curigai. Di antara yang pro berusaha mencari berbagai daya upaya untuk menghubungi Sekutu yang sudah mendarat di pulau Timor dan Flores. Ada yang dengan akal berdagang dengan mempergunakan perahu, berlayar memasuki daerah yang sudah diduduki Sekutu hendak mencari perhubungan dengan NICA. Orang - orang inilah yang sekembalinya menjadi mata-mata. 14)

Dari laporan mereka Sekutu dapat mengetahui kelemahan-kelemahan para pejuang Nusa Tenggara Barat. Mulai dari persenjataan yang serba tradisional sampai dengan keadaan organisasi kelasykaran yang masih serba lemah dan belum terkoordinasi. Antara pimpinan masih terdapat perbedaan pandangan, terutama antara golongan bangsawan dengan rakyat biasa, antara golongan

priyayi dengan golongan petani. Bahkan latar belakang historis antara suku yang satu dengan suku yang lain.

Semua itu mereka olah dalam bentuk senjata taktis untuk menghantam kesatuan rakyat yang baru mulai kompak. Melalui kaki tangan mereka yang disusupkannya ke tengah - tengah rakyat ditiup - tiup tentang segala kekurangan dan kekerdilan rakyat yang dapat menjatuhkan moril perjuangan yang baru mulai mekar. Sekali lagi mereka mengulangi politik *divide et impera* mereka yang terkenal itu.

Setelah mereka berhasil menteror moril perjuangan rakyat, mereka mulai mendekati para pengusaha yang berhati lunak termasuk pemimpin rakyat dan pemimpin pemerintahan. Di Sumbawa mereka mendekati para Sultan dan di pulau Lombok para pemimpin yang pada Zaman Hindia Belanda dulu terkenal orang-orang yang setia kepada Belanda. Metode pendekatan semacam itu dilaksanakan secara tidak langsung oleh sekutu, tetapi dengan perantaraan Pemerintah Jepang dan kaki tangan Belanda yang terdiri dari orang - orang Indonesia yang lemah jiwa dan orang - orang Indo Belanda.

Sesungguhnya sebelum Sekutu datang di Nusa Tenggara Barat pemerintah militer Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada orang - orang Indonesia seperti terlihat di depan. Tetapi kemudian karena takut kepada Sekutu, Jepang telah meminta kembali kekuasaan pemerintah itu dari tangan bangsa Indonesia. Di Swapraja Bima pada tanggal 24 Nopember 1945 bekas **Ken Kanrikan**, Wakatsuki dan Mayor Jenderal Tanaka, bekas panglima tentara Jepang di pulau Sumbawa tidak berhasil memperoleh kekuasaan itu kembali dari Sultan Bima karena dihalangi oleh KNI Daerah Bima.

Memang sejak pendaratan tentara Australia yang pertama di Bima pada tanggal 23 Nopember 1945 yang di dalamnya terdapat NICA, Sultan Bima M. Salahuddin sudah mulai bimbang. Kebimbangannya itu tampak, pada hari itu beliau tidak mengibarkan bendera Merah Putih di depan istananya, sehingga terjadi insiden bendera. Beberapa orang wakil KNI mendatangi istana, dan dengan setengah paksa bendera mereka kibarkan tanpa persetujuan Sultan. 15)

Melihat keraguan itu pada tanggal 25 Nopember 1945 KNI Daerah Bima segera bersidang yang memutuskan bahwa rakyat Bima tidak sudi dijajah lagi dan minta kepada Jepang supaya tidak mencampuri urusan pemerintahan Indonesia yang sudah merdeka. Keesokan harinya tanggal 26 Nopember 1945 keputusan ini diberi-

tahukan kepada Sultan Bima melalui wakil KNI, Idris M. Jafar. Dan KNI minta supaya dalam setiap menghadapi Jepang, KNI harus diikut sertakan mendampingi Sultan. 16)

KNI juga minta agar dalam melaksanakan tugasnya Sultan didampingi oleh Dewan yang demokratis. Semua usul KNI itu diterima baik oleh Sultan. Pada tanggal 27 Nopember 1945 Dewan Pemerintahan yang diusulkan KNI itu diumumkan di Kantor KNI Raba, Perdana Menteri (Menteri Utama) : Idris M. Jafar. Menteri Pertahanan/Pembelaan : Putera Abdul Kahir. Menteri Urusan Umum/Propaganda, Agama, Amal (Sosial) : A.D.Talu, Menteri Ekonomi/Keuangan/Kehakiman : Muhammad. Menteri Pengajaran dan Kesehatan : M. Hasan. Menteri Keamanan, Lalu Lintas, Pos, Telegraf dan Telepon : M. Amin Daeng Emo. 17)

Pada hari itu 27 Nopember 1945 Wakatsuki (**Ken Kanrikan Bima Ken**) dan Mayor Jenderal Tanaka sekali lagi meminta penyerahan kekuasaan pemerintahan atas perintah Sekutu tetapi Sultan yang didampingi KNI tetap menolak. KNI menyatakan kepada Jepang bahwa rakyat di Bima tidak sudi dijajah lagi. Sejak itu suasana bertambah panas. Karena takut kepada Sekutu maka pada tanggal 29 Nopember 1945 secara sepihak Jepang memberlakukan lagi pemerintahan **Minseibu**. Jepang menyerukan agar semua pegawai **Minseibu** Jepang masuk kerja kembali. Namun seruan ini tidak ada yang menghiraukannya. Kewibawaan Jepang sudah luntur di tiap dada rakyat. Maka untuk melunakkan perjuangan rakyat, Jepang mendekati Sultan Bima. Pada tanggal 4 Desember 1945 Putera Abdulkahir, Nazaruddin dan Amin Daeng Emo sewaktu dalam perjalanan kembali dari Sumbawa Besar ke Bima diculik di Lopok dan dipaksa menanda-tangani Sumpah Setia kepada Jepang. Sejak itu persatuan terpecah belah. Agen - agen NICA semakin aktif. Salah seorang agen NICA, Abidin Ibrahim ditangkap para pemuda dan ditahan di Kantor KNI Raba.

Sementara itu dari Jawa datanglah lima orang utusan Gubernur Militer Sunda Kecil, A.S.Pello yang berkedudukan di Yogyakarta. Kelima utusan tersebut adalah : Ishak Saleh, Husny Abbas, Henklary, Hermanus dan Kunanto. Kedatangan mereka itu membawa udara baru dan suasana baru bagi langkah - langkah selanjutnya dalam menghadapi NICA. Berdasarkan saran mereka TKR dan API dibentuk yang diwujudkan dari peleburan beberapa buah organisasi pemuda yang sudah ada sebelumnya.

Pihak Jepang semakin penasaran. Dari atas mereka selalu ditekan oleh Sekutu agar Jepang tetap bertanggung - jawab dalam

pemerintahan dan keamanan. Sekutu tidak mengizinkan adanya pemerintahan Indonesia di daerah Nusa Tenggara Barat. Jepang harus mengambilnya dari bangsa Indonesia. Tidak dapat secara kompromi, Jepang merampasnya secara sepihak dengan lebih dulu memecah belah antara pejabat dengan pejabat, antara pemerintah dengan rakyat, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Di Lombok dan Swapraja Sumbawa Jepang selalu mencampuri urusan pemerintahan dan menghalangi perjuangan rakyat.

Tujuannya yang utama hendak mengambil kekuasaan pemerintahan yang telah diserahkan dari tangan Indonesia. Pada tanggal 5 Desember 1945 seluruh utusan pimpinan badan perjuangan di Lombok mengadakan rapat kebulatan tekad di Dasan Tengak desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Seluruhnya hadir $\pm$ 150 orang antara lain : Ketua KNI Lombok, Hasmosuwigno, Sukardi dari BKR Lombok, Saleh Sungkar dari PUIL, Nangcik dan R. Sumantri dari BBI Lombok, Lalu Usman dan Lalu Alwi wakil Pemerintah Lombok dan beberapa tokoh lainnya dari Lombok Timur seperti : Jumhur Hakim, Jumadil dari Pemuda, Akbar, Inang bin Alam dari Polisi Lombok Tengah, Lalu Togog, Lalu Sedek dan Haji Hijaz. 18) Rapat memutuskan bahwa dalam keadaan bagaimana dan apa pun akibatnya kekuasaan pemerintahan tidak akan diserahkan kepada Jepang. Untuk menghadapi segala kemungkinan konsolidasi dan organisasi semua kekuatan harus ditingkatkan.

Melihat ini Jepang menjadi kelabakan dan dimulailah pertentangan dengan menteror persatuan dan kekompakan pimpinan pemerintahan melalui agen - agen NICA. Menjelang awal Januari 1946 seluruh kekuasaan pemerintahan dapat diambilnya kecuali Lombok Timur dan Swapraja Bima. Kedua kekuasaan pemerintah itu diusahakan Jepang mengambilnya melalui Raden Nuna Nuraksa, Kepala Daerah Lombok dan M. Kaharuddin, Sultan Sumbawa. Dalam kedua rapat berturut - turut yang pertama rapat di Timbunuh antara Raden Nuna Nuraksa kontra Mamiq Padelah (Kepala Pemerintah Lombok Timur), Mamiq Ripaah (Assisten Distrik Masbagik Timur) dan Mamiq Muhammad (Assisten Distrik Pringabaya) tidak berhasil. Rapat kedua pada tanggal 18 Januari 1946 di Selong yang dihadiri oleh semua unsur pemerintahan Lombok Timur, pimpinan BKR, KNI dan lain - lain malah menolak permintaan Raden Nuna Nuraksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Rapat mengambil keputusan tetap berdiri di belakang Republik Indonesia dan siap menanggung resiko apa pun yang akan terjadi. 19)

Begitu pula Sultan Sumbawa gagal mempengaruhi Sultan Bima (mertuanya) agar menyerahkan kekuasaan kepada Jepang karena dihalangi oleh KNI Daerah Bima beserta seluruh kekuatan rakyat yang berdiri di belakang KNI.

Namun semua itu mengakibatkan kekuatan rakyat mulai terpecah belah. Dan bagi Jepang sudah lepas dari tanggung jawab terhadap Sekutu. Pintu jalan masuknya NICA sudah mulai terbuka. Tinggal menunggu soal waktu saja lagi. Di daerah di luar Lombok Timur dan Bima semangat rakyat mulai mengendur. Jepang mengadakan kepungan politik terhadap daerah Bima dan daerah Bahagian Lombok Timur.

Australia mengancam dan mengintimidasi rakyat yang tidak mau tunduk kepada Jepang melalui surat - surat selebaran berupa perintah dan maklumat. Jepang dan Australia berusaha mematangkan situasi untuk melapangkan jalannya masuk bagi NICA (Belanda) ke Nusa Tenggara Barat.

CATATAN

1. H.M.Thayeb Abdullah, Detik Nadi Perjuangan RI di Bima dan Dompu halaman 1 Wawancara dengan Mamiq Ripaah, tanggal 18 Oktober 1979.
2. Wawancara dengan Mamiq Padelah, tanggal 18 Oktober 1979.
3. Wawancara dengan Mamiq Ripaah, tanggal 18 Oktober 1979.
4. Wawancara dengan H. Idris M. Ja'far, tanggal 13 September 1979.
5. Wawancara dengan I Gusti Ngurah Makerthia, tanggal 18 September 1979.
6. Ratsu, Hati Yang Membara, halaman 6.
7. H.M.Thayeb Abdullah, Riwayat Perjuangan Mempertahankan Proklamasi, 17 - 8 - 1945 di daerah Bima - Dompu.
8. a. Wawancara dengan H.M.Thayeb Abdullah, tanggal 11 September 1979.
b. Sunda Kecil, Kementerian Penerangan, Jakarta, 1953, hal. 137.
9. Hasan, Sejarah Singkat Perjuangan Rakyat di Lombok, halaman 7.
10. Drs. Tanu Suherly, Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia, hal. 6.
11. Maklumat dari Jenderal Sir Thomas Albert Blamey GBE, KCB, CMG, DSO, ED, Pemimpin Tinggi Dari Tentara Australia, hari kedua bulan September 1945.
12. Pemberian Taku Surat Perintah dari Pemimpin Tertinggi Tentara Australia kepada Sekalian Rakyat Indonesia yang berdiam di daerah - daerah sebelah Timur dari Selat Makasar dan Selat Lombok.
13. Drs. Tanu Suherly, *op.cit.* halaman 9.
14. Wawancara dengan H.M.Thayeb Abdullah, tanggal 11 September 1979.
15. H.M.Thayeb Abdullah, Detik Nadi Perjuangan RI di Bima dan Dompu, hal. 8.
16. *Ibid*, halaman 9.
17. H.M.Thayeb Abdullah, *op.cit.* halaman 9.
18. Hasan, *op.cit.* halaman 3.
19. Wawancara dengan Abdurrahim S.H., tanggal 10 Desember 1979.

BAB III

PERJUANGAN DI NUSA TENGGARA BARAT

A. PEREBUTAN SENJATA JEPANG.

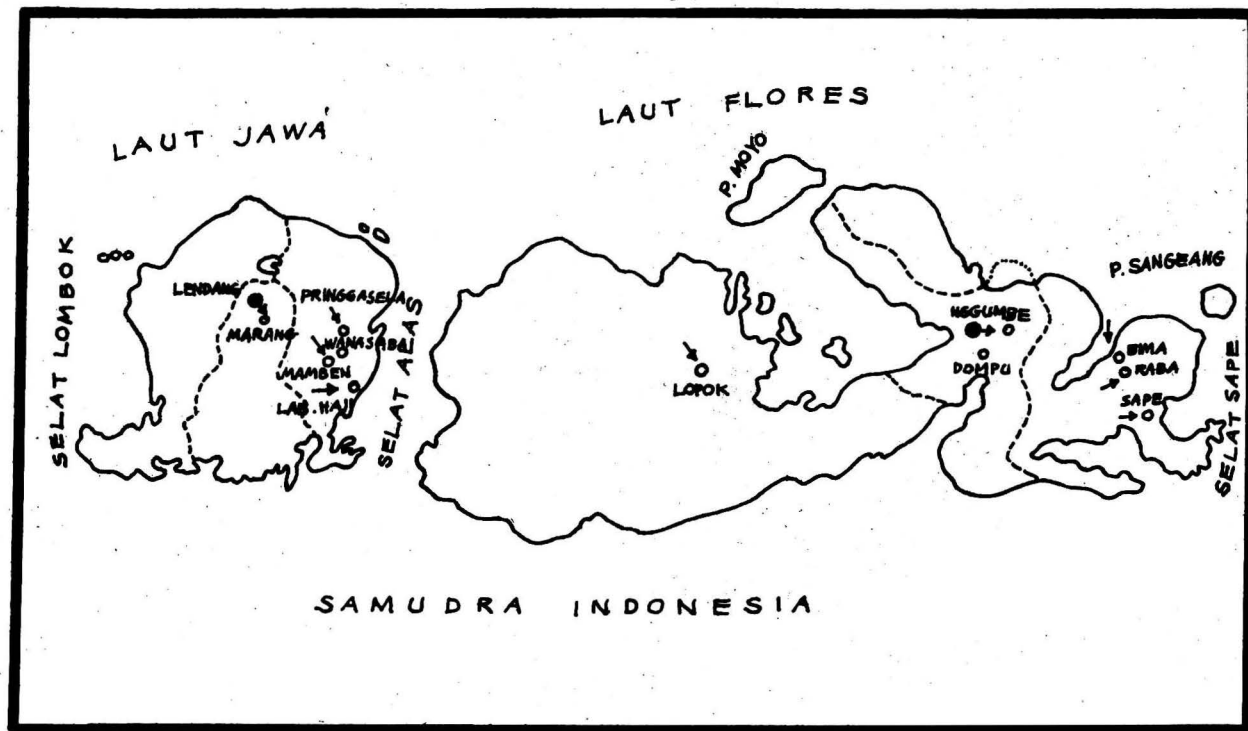
Tindakan Jepang yang selalu menghalangi kelancaran perjuangan sangat melukai hati rakyat yang cinta kepada kemerdekaan dan perdamaian. Dendam lama yang sudah terpendam bangkit kembali. Pasukan Jepang dalam mata rakyat selalu membawa malapetaka baik di waktu jayanya maupun di waktu lumpuhnya. Apalagi sejak mereka diberi wewenang kembali untuk memegang pemerintahan dan menjaga keamanan, ketenteraman wilayah, kesombongannya mulai nampak. Tentara Jepang yang sudah dikonversi di beberapa tempat mulai disebarkan lagi.

Kebencian rakyat mulai membara kembali. Apalagi rakyat sangat membutuhkan senjata, makanan dan pakaian. Dengan mempergunakan taktik gerilya rakyat mulai mengganggu tempat kedudukan mereka seperti di Selong, Labuhan Haji, Brangpanas dan Lendang Marang. Pusat - pusat perbekalan mereka diserbu pada malam hari oleh rakyat secara sembunyi - sembunyi. Insiden demi insiden terjadi silih berganti yang semakin menimbulkan ketegangan hubungan antara rakyat dengan Jepang. 1)

Serangan - serangan terorganisasi pun mulai direncanakan. Peristiwa pertama terjadi pada malam Selasa, 11 Desember 1945. Pasukan BASMI berpusat di Pringgasele (Lombok Timur) dengan kekuatan 85 orang di bawah pimpinan Sayid Saleh dan Rawisah pada jam 02.00 dengan hanya bersenjata keris, golok, pedang, tombak, dan bambu runcing menyerbu markas Jepang di Brangpanas. Dari kedua belah pihak menderita korban lima orang meninggal dunia masing - masing : Bapak Hawa, Bapak Minah, Bapak Muhammad, Bapak Selamat dan Alam. Korban lainnya seorang luka berat, Amaq Alisah asal desa Anjani. 2)

Mengenai tokoh Sayid Saleh, pemimpin BASMI, sebagai seorang ulama, beliau membangkitkan dan mengobarkan semangat perjuangan dengan meniupkan nafas keislaman yang membangun semangat patriotisme yang menyala - nyala. Pada saat - saat semangat anak buahnya menjadi lesu karena tekanan dan perang urat syaraf yang dilancarkan oleh musuh, beliau bangkitkan sema-

Perebutan senjata Jepang pusat konsignering BT. Jepang



ngat anak buahnya melalui fanatisme agama, sehingga dalam setiap penyerangan yang dilakukan oleh BASMI, sekalian anak buahnya melaksanakan dengan hati yang ikhlas penuh dan pengorbanan.

Kedudukan Jepang di Wanasaba (Lombok Timur) juga tidak luput dari gangguan rakyat. Walaupun gangguan - gangguan itu tidak mendatangkan korban yang besar, tetapi akhirnya pecah menjadi perang terbuka. Pada hari Senin, 17 Desember 1945 pukul 15.00 beratus - ratus orang rakyat menyerbu markas Jepang di Wanasaba. Mengetahui penyerbuan ini Jepang menyongsong musuhnya dan menantinya di medan terbuka. Pasukan rakyat yang bersenjatakan senjata tradisional itu diterima oleh Jepang dengan siraman senapan mesin sebelum sempat mendekat. Karena tidak tahan dengan desingan pelor yang membahana, pasukan penyerbuan mengundurkan diri secara teratur dengan merangkak - rangkak melalui parit dan balik - balik pohon. Pemimpin - pemimpin rakyat yang fanatik telah memilih mati fisabilullah dan terus maju menyongsong peluru yang menghujani mereka. Pertempuran itu berakhir dengan meninggalkan korban di pihak rakyat seorang luka berat, Haji Srijuddin dan enam orang gugur sebagai kesuma bangsa, masing - masing : Haji Tohir, Haji Samsudi, Amaq Zainur, Amaq Jahrah, Amaq Sapinah dan Amaq Maadah.

Sekalipun dalam setiap pertempuran korban selalu berguguran, tetapi semangat rakyat terus berkobar. Motifnya tidak lagi hanya mencari senjata dan perbekalan, tetapi jauh tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam hendak menuntut balas bagi teman - teman yang mendahului mereka. Kota Selong pusat pemerintahan di Lombok Timur tidak luput dari rencana penyerbuan. Namun rencana demi rencana selalu gagal oleh kaki tangan Jepang dan NICA yang berkedudukan sebagai pegawai dan alat negara. Mengkal karena kegagalan itu beberapa orang pemuda di bawah pimpinan Hasan dan Nuraksi menculik Ahmad, mata - mata Jepang, kemudian dipancung oleh Haji Muhammad dkk. di antara Pancor dan Sekarteja. Gagal menyerbu markas Jepang gudang Nanko di Selong pun tidak luput dari sasaran penyerbuan. Kedua peristiwa itu menambah kesiap - siagaan Jepang, sehingga sampai Jepang dikembalikan ke negerinya markas mereka di Selong tetap terpelihara.

Sasaran penyerbuan rakyat pun dialihkan ke markas Jepang di Labuhan Haji. Sasaran utama adalah untuk memperoleh senjata. Di bawah pimpinan Sayid Saleh dan koordinasi Putrajab pada malam Rabu, Januari 1946 seluruh kekuatan lasykar dari sekitar Se-

long, Pancor, Kelayu, Tanjung Teros, Penyaong, Rempung, Pringgasela, Lenek, Suralaga dan Labuhan Haji dengan kekuatan kurang lebih 1.000 (seribu) orang dihimpun menjadi satu kekuatan yang ditujukan untuk menghantam markas Jepang di Labuhan Haji. Pertempuran berhasil dengan selamat, tanpa meninggalkan korban dan dapat merampas tiga pucuk karabyn, lima pucuk pestol dan 17 (tujuh belas) peti peluru. 3) Semua senjata hasil rampasan itu disimpan baik - baik untuk menghadapi NICA jika jadi mendarat.

Sementara daerah Lombok Timur terus bergolak, di Bima juga terjadi insiden antara rakyat dengan militer Jepang yang masih tinggal di pos - pos. Mereka ditugaskan menjaga keamanan sampai NICA mendarat. Selebihnya dikonsinyasi di Lape Lopok Sumbawa Barat, seluruhnya berjumlah 43.000 orang. 4)

Akibat kemarahan rakyat yang menganggap Jepang sebagai penghalang kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pos-pos Jepang menjadi sasaran kemarahan itu. Serangan - serangan itu bermotifkan untuk memperoleh senjata. Pertama kali insiden terjadi di Nggembe, Kecamatan Bolo. Pada tanggal 25 Desember 1945 sepasukan rakyat menyerbu pos penjagaan Jepang, di mana tersimpan senjata dan bahan makanan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya dua orang pemuda dan beberapa orang Jepang. Peristiwa yang demikian itu sebelumnya telah diperhitungkan oleh Jepang akan terjadinya.

Sejak Jepang mengambil kekuasaan secara sepihak pada tanggal 29 Nopember 1945, semua pihak tidak senang. Seluruh badan perjuangan semakin giat berlatih. Pada tanggal 18 Desember 1945 Jepang mengeluarkan Surat Perintah No. 2/12/BTNP yang ditujukan kepada Sultan Bima agar memerintahkan semua **gunco** untuk mengumpulkan semua jenis senjata : senjata api, tombak, keris, bambu runcing yang dimiliki oleh rakyat. Surat perintah tersebut tidak diindahkan oleh Sultan. 5)

Karena tidak ada pelaksanaannya maka pada 24 Desember 1945 Jepang mengulangi perintahnya dengan surat perintah No. 12/3/BTNP yang disertai dengan intimidasi kalau Sultan tidak bertindak maka Jepang akan bertindak sendiri. Jepang meminta kepada Sultan agar melaporkan pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 1946.

Belum sampai 24 jam kemudian sejak keluarnya surat perintah itu, Nggembe diserbu para pemuda yang hanya bersenjatakan senjata - senjata tradisional. Peristiwa itu sangat mengecewakan Jepang dan memerintahkan balatentara Jepang mencari senjata-

senjata yang disimpan oleh rakyat. Pada tanggal 26 Desember 1945 Mayor Jenderal Tanaka mengulangi lagi perintahnya kepada Sultan Bima agar memerintahkan *gunco* - *gunconya* mencari dan mengumpulkan senjata - senjata yang dimiliki oleh rakyat. Dalam suratnya itu Tanaka menekankan bahwa segala akibat tidak dilaksanakannya surat perintah itu adalah tanggung jawab Sultan Bima.

Tetapi karena tidak ada pelaksanaannya juga maka pada tanggal 28 Desember 1945 Jepang mengeluarkan surat perintah lagi kepada Sultan dan kalau tidak dilaksanakan juga, ia mengancam akan bertindak sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh Australia.

Keempat surat perintah Mayor Jenderal Tanaka itu dianggap sepi oleh Sultan Bima dan KNI. Bahkan sebagai jawabannya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 1945 pos Jepang di Sape dikepung oleh berpuluh - puluh orang pemuda yang dibantu oleh beberapa orang gelarang masing - masing dengan rakyatnya. Serangan umum itu dipimpin oleh Mustamin Abdurrahim dibantu oleh Abdulmajid Yusri, Muhammad Abdulwahab dan M. Saleh Sarimin. 6)

Pasukan Jepang dibagi atas dua bagian. Barisan depan terdiri dari anggota - anggota TKR dan API. Barisan depan ini langsung dipimpin oleh Mustamin Abdurrahman. Barisan belakang terdiri dari rakyat yang dipimpin oleh gelarang masing - masing. Sasaran pengepungan ialah pos Jepang yang di Oy Maci dan pelabuhan Sape. Serangan terhadap kedua benteng itu berlangsung dari jam 02.00 sampai jam 10.30 keesokan harinya. Serangan ini bermaksud hendak melucuti senjata Jepang sebagai balasan atas tindakan balatentara Jepang yang hendak menggeledah asrama API di Sape pada tanggal 25 Desember 1945.

Pada tanggal 30 Desember 1945 jam 10.30 pengepungan itu di hentikan tanpa hasil setelah tembak menembak sejak malam hari karena perintah Sultan Bima. Barisan penyerang mundur dan membubarkan diri. Beberapa jam kemudian pukul 15.30, enam buah truk balatentara Jepang tiba di Sape. Tetapi API dan rakyat sudah terpecah - pecah sulit dikonsolidasi lagi. Balatentara Jepang segera mengadakan penangkapan - penangkapan atas perintah Sultan Bima. Mereka yang mengepung pos Jepang di Sape dianggap oleh Sultan sebagai pengacau. Karena merasa tidak aman Mustamin Abdurrahman dan Abdulmajid Yusri berusaha melarikan diri ke Bima, tetapi di dalam perjalanan mereka ditangkap dan dipenjarakan di Raba atas perintah Sultan Bima. Sejak itu kekuatan API di Sape lumpuh sama sekali.

Keganasan Jepang di Sape sama sekali tidak mengurangi semangat pemuda API yang lain. Sebaliknya karena peristiwa penangkapan besar - besaran yang dilakukan oleh Jepang di Sape menimbulkan amarah pimpinan pusat API yang bermarkas di Raba Pada tanggal 1 Januari 1946 markas balatentara Jepang di Raba diserang API. Dalam serangan itu gugur dua orang pemuda dan satu orang Jepang.

Keesokan harinya, tanggal 2 Januari 1946 markas API di Raba dikepung oleh Jepang. Berkat ketangkasan pemimpin kedua belah pihak pertumpahan darah dapat dihindarkan.

Melihat kenyataan ini balatentara Jepang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Tanaka semakin giat usahanya mengumpulkan senjata yang dimiliki oleh rakyat. Tindakan Jepang serupa itu menyebabkan kegagalan usaha netralisasi rasa permusuhan antara tentara Jepang dengan para pemuda. Pemuda pun semakin giat merebut senjata dari balatentara Jepang. Serang menyerang antara pemuda dengan balatentara Jepang terjadi lagi di Tente tanggal 5 Januari 1946, pemuda dan pelajar di kota Bima melakukan perampasan senjata dari balatentara Jepang di Nggaro Lumbo, Rabandompu, Lawatta, Pelabuhan dan lain - lain. 7)

Akibatnya Jepang semakin giat menggeledah dan mengumpulkan senjata rakyat. Tanggal 10 Januari 1945 pemimpin API, M. Thayib Abdullah dan Ishaka Abdullah dan lain - lain ditangkap Jepang.

B. PERLAWANAN FISIK MENGUSIR NICA.

Setelah balatentara Jepang dapat melumpuhkan kekuatan rakyat dan berhasil mempengaruhi beberapa orang pemimpin yang berpengaruh, pada tanggal 31 Desember 1945 jam 16.00 dengan mudah NICA mendarat di Sumbawa Barat. Pendaratannya dikawal oleh tentara Jepang atas perintah tentara Sekutu. Keesokan harinya, 1 Januari 1946, tidak saja mereka rayakan sebagai tahun baru tetapi juga sebagai hari kemenangan. 8)

Sesuatu yang sangat menguntungkan NICA pada waktu itu ialah bantuan balatentara Jepang yang sudah lebih dahulu melumpuhkan perlawanan rakyat, bantuan dari Sekutu dan hasil diplomasi yang gemilang dapat melunakkan hati Sultan Sumbawa, M. Kaharuddin. Hal ini terbukti ketika pasukan NICA memasuki kota Sum-

bawa besar tidak mendapat halangan sedikit pun juga. Bahkan beberapa hari setelah pendaratan NICA mulai mengadakan penangkapan - penangkapan.

Selanjutnya pendaratan NICA ditujukan ke daerah Bima. Karena Sultan Bima yang selalu ragu dan suasana Bima yang agak berbeda dengan Sumbawa Barat, pendaratan didahului dengan perundingan antara pihak Sultan dengan pimpinan tentara Australia bertempat di atas kapal perang Australia "Kortenaar" di Teluk Bima. Perundingan dilakukan selama tiga kali berturut - turut.

Acara perundingan satu - satunya ialah mengenai pendaratan NICA. Dalam perundingan pertama Kesultanan Bima diwakili oleh A.D.Talu, M. Hasan dan Lantip. Ketiganya masing - masing dari unsur pemerintah dan KNI. Di kapal mereka diterima oleh Mayor Lynch dan Seisterland, seorang juru bahasa wanita. Pembicaraan tidak berlangsung lama, karena ketiga anggota delegasi menolak pendaratan NICA. 9)

Berselang beberapa hari kemudian berlangsung perundingan yang kedua. Dari pihak kesultanan Bima diwakili oleh M. Hasan, Lantip, Nasaruddin (Tureli Nggampo) dan Sirajuddin (Tureli Bolo). Perundingan kedua ini pun mengalami kegagalan sebab dari pihak Kesultanan Bima tetap menolak kehadiran NICA.

Sehingga karena itu perlu diadakan perundingan yang ketiga. Pada perundingan sekali ini yang hadir Sultan sendiri didampingi oleh M. Hasan, A.D.Talu dan M. Jafar. Perundingan yang ketiga ini pun gagal pula tidak mendapat kemajuan sedikit pun. Masing-masing pihak tetap pada pendirian semula. Karena perundingan menemui jalan buntu, maka Lynch minta kepada Sultan agar beliau dapat menerima kunjungan Brigadir Jenderal Byke, panglima balatentara Australia ke istana esok harinya tanggal 2 Januari 1946. Atas permintaan Lynch itu, Sultan tidak keberatan.

Sebelum perkunjungan itu atas usul A.D.Talu diadakan pertemuan di istana yang dihadiri oleh semua wakil lapisan masyarakat, kecuali Putera Abdulkahir, pemimpin TKR. Pertemuan itu dipimpin oleh Sultan dan A.D.Talu. Karena rapat tidak sependapat maka keputusan diserahkan kepada Sultan, untuk menentukan sikap yang sebaik - baiknya untuk menghadapi Jenderal Byke. Maka Sultan memutuskan :

1. Jika NICA mendarat beliau akan meletakkan jabatan.
 2. Beliau akan menjemput Jenderal Byke bersama - sama dengan Jeneli Bolo, Jeneli RasanaE, Rato RasanaE dan Rato Bolo. 10)
- Di kapal Sultan dipertemukan dengan Kolonel Israil, bekas

Asisten Residen **Afdeeling** Sumbawa dan Sumba. Pertemuan itu banyak memberi pengaruh terhadap sikap Sultan selanjutnya. Kehadiran Brigadir Jenderal Byke di istana diperlakukan sebagai sahabat dan baik sekali. Dengan perantaraan Sultan, Jenderal Byke menerima surat dari KNI Daerah Bima yang berisi pernyataan menolak kehadiran NICA di Bima.

Menyadari suasana sepenuhnya, Brigadir Jenderal Byke tidak mengomentari isi surat itu, tetapi secara di bawah tangan memberikan sepucuk surat yang berisi penyerahan kekuasaan penuh kepada Sultan Bima untuk memelihara keamanan dan ketertiban daerah Bima. Berdasarkan kekuasaan itu Sultan Bima memerintahkan supaya kesatuan - kesatuan pemuda membubarkan diri dan supaya senjata dikumpulkan dan diserahkan kepada pemerintah.

KNI daerah Bima menolak perintah itu dan mengeluarkan komando kepada seluruh kesatuan API di seluruh wilayah Bima agar bersiap - siap menghadapi Belanda. Akibat kedua perintah yang bertentangan itu rakyat menjadi bingung dan perpecahan antara pemimpin rakyat semakin bertambah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang saatnya sangat diperlukan untuk menghadapi musuh - musuh revolusi.

Sementara rakyat dalam kebingungan itu pada tanggal 3 Januari 1946 Brigadir Jenderal Byke mengeluarkan perintah agar semua pelopor yang membunuh serdadu Jepang selambat - lambat nya tanggal 4 Januari 1946 harus sudah ditangkap dan dihukum berat dan semua senjata yang dicuri dan dirampas dari balatentara Jepang harus diserahkan selambat - lambat nya sampai tanggal 4 Januari 1946 sore. 11)

Atas dasar perintah Sultan Bima dan Brigadir Jenderal Byke, Jepang semakin giat melakukan penangkapan atas pemuda - pemuda dan pemimpin mereka. Karena merasa tidak aman, pada tanggal 6 Januari 1946 markas pusat API dipindahkan ke Tente. Tanggal 10 Januari 1946 markas tersebut diserbu Jepang. Pimpinannya M. Thayeb Abdullah, Ishaka Abdullah, Abdullah Amin, Ahmad Daeng Ame dan Saleh Bakry ditawan. Sedangkan pemimpin TKR Putera Abdulkahir, Ismail Abdullah dan Hasan Azis ditawan sendiri oleh Sultan di istana. Semua senjatanya dirampas dan diserahkan kepada Jepang. 12)

Sisanya yang tidak tertangkap melarikan diri di antaranya ada pula yang siap - siap melarikan diri ke pulau Jawa dengan maksud untuk meneruskan perjuangan mereka di sana.

Setelah semua kekuatan perjuangan rakyat dihancurkan, pada tanggal 12 Januari 1946 dengan mudah pasukan Sekutu mengada-

kan pendaratan di pelabuhan Bima. Seluruh pasukan pendaratan itu berjumlah 150 orang tentara dan sipil. 13) Ikut dalam pendaratan itu NICA yang dipimpin oleh Meiders, komandan KNIL.

Dengan direbutnya seluruh pulau Sumbawa, maka kedudukan NICA di Nusa Tenggara Barat semakin kuat. Namun demikian pendaratannya di pulau Lombok masih ditunda beberapa bulan lagi sejak penaklukan seluruh Sumbawa. Sekutu rupanya ingin menyelesaikan tugasnya sebaik - baiknya tanpa meninggalkan korban. Sehingga sementara Lombok ditunggu agak tenang atau sampai tiba waktunya matang untuk diduduki. Maka untuk mematangkan situasi Sekutu memberi tekanan dan kekuatan kepada Jepang untuk mengamankan situasi yang baik bagi pendaratannya

Kecuali Lombok Timur, kekuasaan di Lombok berada di tangan Jepang. Pimpinan pemerintahan pulau Lombok, Daerah Bagian Lombok Barat dan Lombok Tengah sudah dalam genggaman Jepang pula. Sejak itu dapat dikatakan pusat perlawanan rakyat terdapat di Lombok Timur. Kegiatan pemuda masih dapat dilaksanakan dengan leluasa. Rapat - rapat untuk meningkatkan moril perjuangan sering diadakan secara terbuka. Setelah berbagai usaha tidak berhasil memaksa Mamiq Padelah, Kepala Daerah Bagian Lombok Timur menyerahkan kekuasaan kepada Jepang, maka pimpinan balatentara Jepang di Lendang Marang mengajak Mamiq Padelah berunding. Kemudian setelah ternyata di dalam perundingan Mamiq Padelah tetap tidak mau menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jepang dan pula tidak bersedia menghentikan gangguan rakyat terhadap Jepang, beliau ditahan. 14)

Tindakan pembesar Jepang tersebut segera dibalas oleh para pemuda dengan menculik dan menahan Uno San, seorang pembesar Jepang di markas BKR. Uno San baru dilepaskan setelah Mamiq Padelah dibebaskan. Namun setelah itu tekanan Jepang dan aktivitas para pemimpin yang sudah dirangkul Jepang semakin meningkat. Mereka menghasut dan memberi janji yang muluk-muluk agar para pemuda menghentikan kegiatannya dan berbalik melawan dan memboikot pemerintah RI Lombok Timur. Dan akibatnya memang membekas. Semakin dekat waktunya NICA mendarat, semangat rakyat semakin mundur. Sejak akhir Pebruari 1946 semangat perjuangan rakyat semakin menurun. Terutama di Lombok Barat dan di Lombok Tengah. Sedangkan musuh sudah bertambah dekat. Sumbawa dan Bali masing - masing sudah diduduki NICA. Kedudukan Lombok sudah terjepit. Hubungan dengan dunia luar terputus. Seluruh pintu keluar dikuasai oleh balatentara Jepang.

Maka untuk membangkitkan semangat perjuangan kembali, Putrajab dan kawan - kawan menghubungi pemimpin pemuda di seluruh Lombok dan merencanakan pertemuan di Sakra pada tanggal 13 Maret 1946. Tetapi sebelumnya rencana ini diketahui oleh Jepang yang berusaha menggagalkannya. Di tiap-tiap jalan masuk ke lokasi rapat umum dijaga oleh Polisi Jepang dan memerintahkan setiap orang yang akan hadir supaya kembali. Mamiq Mustiarep, Kepala Distrik Sakra yang diharapkan akan menjadi pelindung rapat umum tersebut, sejak pagi menghilang dibawa pergi oleh Raden Nuna Nuraksa.

Kegagalan itu menimbulkan akibat yang fatal bagi jalannya perjuangan selanjutnya. Bagi pemuda-pemuda yang semula sudah mempunyai semangat perjuangan yang tinggi merasa terhina dan dalam dirinya timbul semangat patriotisme yang berkobar - kobor. Sebaliknya bagi pemuda yang semangatnya sudah mulai menurun, semakin kecewa dan meragukan kemampuan pejuang-pejuang RI. Jurang perpecahan di kalangan rakyat dan para pemimpin yang pro NICA dengan yang anti NICA semakin menganga. Apalagi sebagian besar rakyat belum memahami arti dan hekekat kemerdekaan itu sendiri. Apa yang diharapkan dari kemerdekaan itu sendiri semakin kabur. Hal ini bukan karena tiadanya penerangan dari pemuda - pemuda pejuang tetapi oleh karena segala hasil usaha mereka dinetralkan oleh musuh - musuh revolusi. Situasi yang demikian itu lahiriah apatisme, pesimisme, cemohan dan pengkhianatan terhadap usaha dan kemampuan pemerintah RI yang masih teguh memegang prinsip.

Para patriot bangsa menyadari semuanya itu. Kepercayaan rakyat harus ditumbuhkan kembali, semangat perjuangan yang telah lesu harus disegarkan dengan memperlihatkan *suprise* yang membanggakan. Di bawah pimpinan Sayid Saleh pemuda-pemuda merencanakan penyerangan kota Selong pada tanggal 18 Maret 1946. Markas Jepang di Selong akan diserang dari segala jurusan. Pimpinan penyerangan dari dalam kota dipimpin oleh Hasan, Nuraksi, Derah, dan Haji Muhammad. Tetapi rencana ini pun dapat dibocorkan oleh kaki tangan NICA. Pada malam itu seluruh kota Selong dijaga oleh Jepang. Pasukan rakyat yang di dalam kota tidak dapat bergerak dan pula tidak dapat segera memberikan informasi kepada pasukan rakyat yang dari luar kota. Sayid Saleh yang memimpin pasukan dari luar kota itu telah terlanjur mendekati kota dan berjumpa dengan dua orang tentara Jepang. Seorang di antara tentara itu terbunuh dan seorang dapat melarikan diri. Pasukan penyerbu itu mengundurkan diri.

Sementara itu di luar dugaan para pemuda, agen - agen NICA dan kaki tangan Jepang mempersiapkan teror kontra revolusi. Suatu gerombolan rakyat yang dihasut oleh mereka menyerbu rumah-rumah suku bangsa Bali yang terletak di pinggir selatan kota Selong pada jam 23.00 menjelang tengah malam. Peristiwa ini sangat menghina pemerintah RI Lombok Timur yang justeru pada saat itu sedang berusaha menggalang persatuan seluruh rakyat. Walaupun para pemimpin dari suku bangsa Bali yang duduk di KNI dan BKR menyadari sepenuhnya mengenai musuh - musuh revolusi, tetapi karena paniknya seluruh suku bangsa Bali yang ada di kota Selong tidak dapat ditahan boyongan ke Lombok Barat dan semakin menambah keretakan persatuan bangsa.

Keluar peristiwa pelemparan rumah-rumah orang suku bangsa Bali itu diisukan dan dibesar - besarkan sebagai peristiwa dan pengusiran suku bangsa Bali secara besar-besaran. Di Lombok seolah - olah telah terjadi gerakan ABD (Anti Bali dan Jawa). Gerakan ABD (gerakan Anti Bali Djawa) adalah suatu gerakan semu yang diissuekan sebagai benar adanya oleh kaki tangan Jepang dan NICA. Menurut salah seorang informan yang menciptakan fitnah ini ialah Ocida, seorang orang opsir Jepang yang pada zaman Hindia Belanda dia bertindak sebagai mata - mata yang menyamar sebagai pengusaha toko Miyora di Cakranegara.

Ditunjang oleh kondisi komunikasi yang jelek pada saat itu, issue itu diterima oleh penduduk Lombok suku bangsa Bali yang tinggal di sekitar kota Mataram dan Cakranegara sebagai benar. Di kedua kota itu terjadi ketegangan sosial dan prasangka sosial dan meluas ke masalah agama dan sukuisme. Asyik dengan urusan sukuisme itu, permusuhan dengan NICA dilupakan. Timbul pendapat sekelompok masyarakat dari pada berkelahi antara suku maka lebih baik diperintah oleh bangsa asing, NICA. Sebenarnya situasi yang demikian inilah yang ingin diciptakan pihak - pihak yang tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia untuk melancarkan penderatan dan pendudukan pemerintahan NICA di Lombok.

Bersamaan dengan itu pada tanggal 18 Maret 1946 tentara Sekutu dibawah pimpinan Pitter Kamm mendarat di Lombok melalui pelabuhan Ampenan. Tanggal 19 Maret 1946 Pitter Kamm mengundang semua unsur pimpinan dan pemerintahan di daerah Lombok untuk menghadiri rapat yang diadakannya di Mataram. Pitter Kamm meminta supaya semua kekuasaan pemerintahan diserahkan kepadanya. Karena permintaannya ditolak oleh pemimpin BKR dan KNI maka pada hari itu juga pemimpin perjuangan mulai ditangkap.

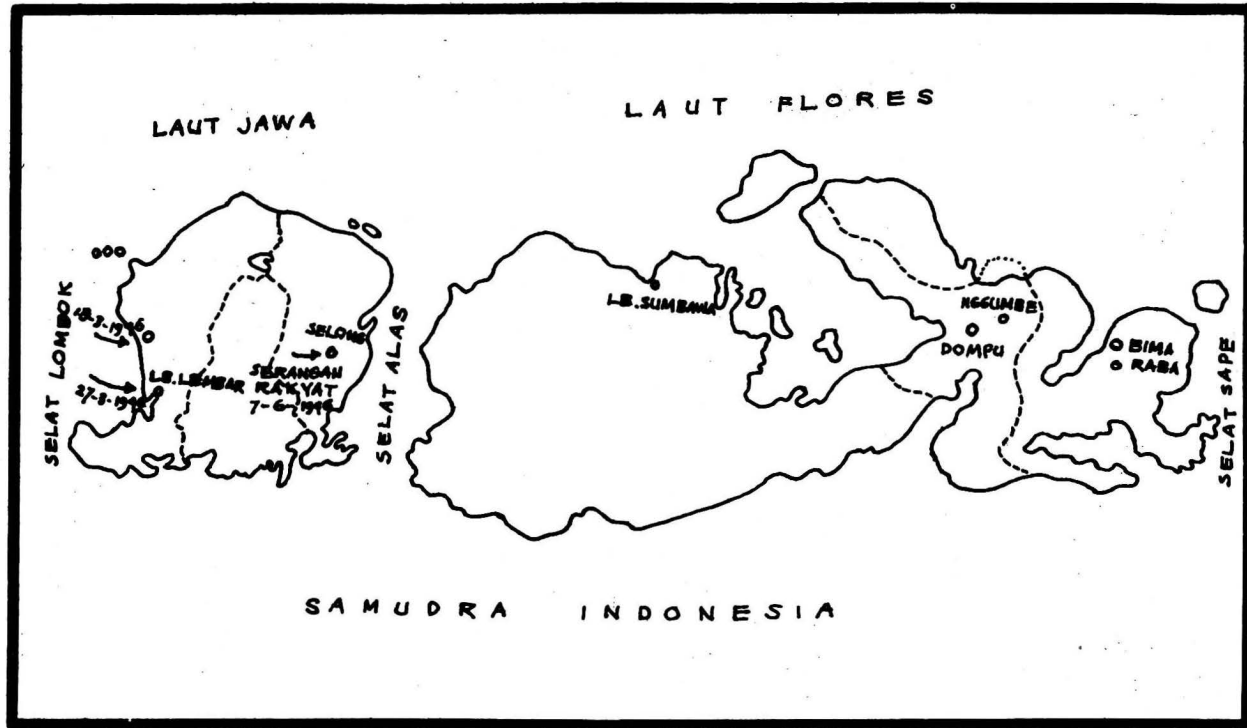
Pada hari pertama itu yang ditangkap antara lain : Mamiq Padelah, Kepala Pemerintah Lombok Timur dan Mas Amo Ketua BKR Lombok Timur. Berselang beberapa hari ditangkap pula Su-
cpto, dr. Ketut Nuriye, I Gusti Made Mudre, Made Gelgel, Rasyidi R. Mujiman, Hasan, Lalu Tohir, Made Raken, Aceh Harta, Rawi-
sah, Yusuf Thoyib Napis, Mamiq Ripaah, R. Rekso dan lain - lain.
Di Lombok Barat ditangkap pula Hasmo Suwignjo, Made Putu Wirya, D.A.Komenit, Wayan Ruma, Sukardi, Kusalam Wardi, Ramli, R. Suwoco, Made Retig, I G Ng Makertia, Hanafiah Saleh Sungkar, Daeng Dul, Hamzah Karim, Sayid Akhmad Alkaf, Nancik Sumantri dan lain - lain. 15)

Pada saat - saat yang demikian propaganda pihak NICA dan para pendukungnya makin diperhebat. Orang - orang yang ditang-
kap dan ditahan mereka cap sebagai kaum ekstrimis dan teroris. Nama baik mereka dirusak di mata rakyat, sebagai usaha mereka untuk memutar balik kebenaran. Sementara itu mereka yang pro NICA sibuk mempersiapkan pendaratan NICA.

Pada tanggal 27 Maret 1946, tentara NICA mendarat di Lom-
bok, melalui pelabuhan Lebar. Bendera merah putih biru berkibar untuk pertama kali di Lembar yang membangkitkan kegairahan dan kebanggaan bagi mereka yang pro NICA. Sebaliknya pengi-
baran bendera itu merupakan titik awal penekanan dan penindasan bagi patriot - patriot bangsa. Berbagai - macam larangan mulai dikeluarkan. Rakyat dilarang menggunakan salam merdeka, dila-
rang mengibarkan bendera Merah Putih, dilarang menggunakan lencana Merah Putih. Semua senjata api harus diserahkan kepada NICA.

Tetapi pemuda - pemuda masih tetap menyusun kekuatan dan merencanakan penyerangan terhadap setiap kedudukan NICA. Ada pula di antaranya yang berusaha menyingkir ke Jawa dengan maksud untuk meminta bantuan personal dan senjata tetapi ter-
tangkap sebelum sampai.

Pendaratan Nica di P. Lombok dan P. Sumbawa



CATATAN

1. a. Wawancara dengan Mamiq Ripaah, tanggal 18 Oktober 1979.
- b. Wawancara dengan L. Imbang, tanggal 16 September 1979.
- c. Wawancara dengan Abdurrahman S.H., tanggal 10 Oktober 1979.
- 1a. Pasukan Basmi. Basmi bukan singkatan tetapi adalah nama pasukan perjuangan yang berpusat di Pringgasela (Lombok Timur). Wilayah operasinya meliputi desa Pringgasela, Aikmel, Lenek, Kalijaga, Mamben dan lain - lain. Pasukan Basmi didirikan oleh pejuang - pejuang Pringgasela di bawah pimpinan Sayid Saleh yang dibantu oleh Lalu Jaya, Abdurrahim, Rawisah, Bapak Isna dan lain-lain.
(Bahasa Indonesia : basmi = musnah). Pasukan Basmi artinya pasukan **Pemusnah**. Sesuai dengan namanya, pasukan Basmi di bawah pimpinan Sayid Saleh adalah salah satu pasukan yang paling agresif, aktif menyerang kedudukan Jepang dalam usaha membela dan menegakkan kemerdekaan R.I. serta berusaha sekuat tenaga menolak pendaratan NICA di pulau Lombok.
2. Wawancara dengan L. Thohir Burdasari, tanggal 15 Nopember 1979.
3. Hasan, *op.cit.* halaman 7.
4. Ratsu, *op.cit.* halaman 3.
5. Surat Perintah Bala Tentara Nippon di Sumbawa, tanggal 18 Desember 1945, No. 2/12/BTNP.
- 5a. Gelarang berasal dari bahasa Bima artinya Kepala Desa, lurah. Menurut struktur organisasi pemerintahan di landschap Bima, seluruh wilayah dibagi atas kejenelian (Indonesia : Kedistrikan) yang dipimpin oleh seorang jeneli (= kepala distrik). Selanjutnya tiap - tiap kejenelian dibagi atas beberapa buah kegelarangan (= desa) yang dipimpin oleh seorang gelarang (= kepala desa, lurah). Kegelarangan merupakan suatu kesatuan wilayah yang terkecil dalam wilayah landschap (= kesultanan) Bima.
6. Abdulmajid Yusri, Uraian Singkat Kejadian Oi Maci - Sape (catatan).
7. Wawancara dengan M. Jafar Aryn, tanggal 12 September 1979.
8. Wawancara dengan L. Mala, tanggal 16 September 1979.
9. Wawancara dengan A.D.Talu, tanggal 12 September 1979.
10. Wawancara dengan A.D.Talu, tanggal 12 September 1979.
11. Panitia Hari Pahlawan ke XXXIII Daerah Tingkat II Bima, Selayang Pandang Sejarah Perjuangan Rakyat Bima (1908 - 1950), Bima, 1978, halaman 53.
12. H.M.Thayeb Abdullah, Riwayat Perjuangan Mempertahankan Proklamasi 17 - 8 - 1945 di Daerah Bima dan Dompu, halaman 3.
13. a. *Ibid*, halaman 3.
- b. Wawancara dengan H.M.Thayeb Abdullah, tanggal 11 September 1979.
14. Wawancara dengan Mamiq Padellah, tanggal 18 Oktober 1979.
15. a. Hasan, *op.cit.* halaman 11.
- b. Wawancara dengan Hamzah Karim, tanggal 17 Nopember 1979.
- c. Wawancara dengan Aci Harta, tanggal 8 September 1979.

BAB IV

PEMBENTUKAN NIT

A. PEMINDAHAN KEKUASAAN

Dengan tertangkapnya sebagian besar pimpinan pemerintahan RI dan pimpinan berbagai badan perjuangan di Lombok sejak tanggal 19 Maret 1945, maka berakhirilah kekuasaan RI di Nusa Tenggara Barat. Pendaratan NICA yang menyusul kemudian terjadi pada tanggal 27 Maret 1946 di Lombok lengkap dengan staf pemerintahannya.

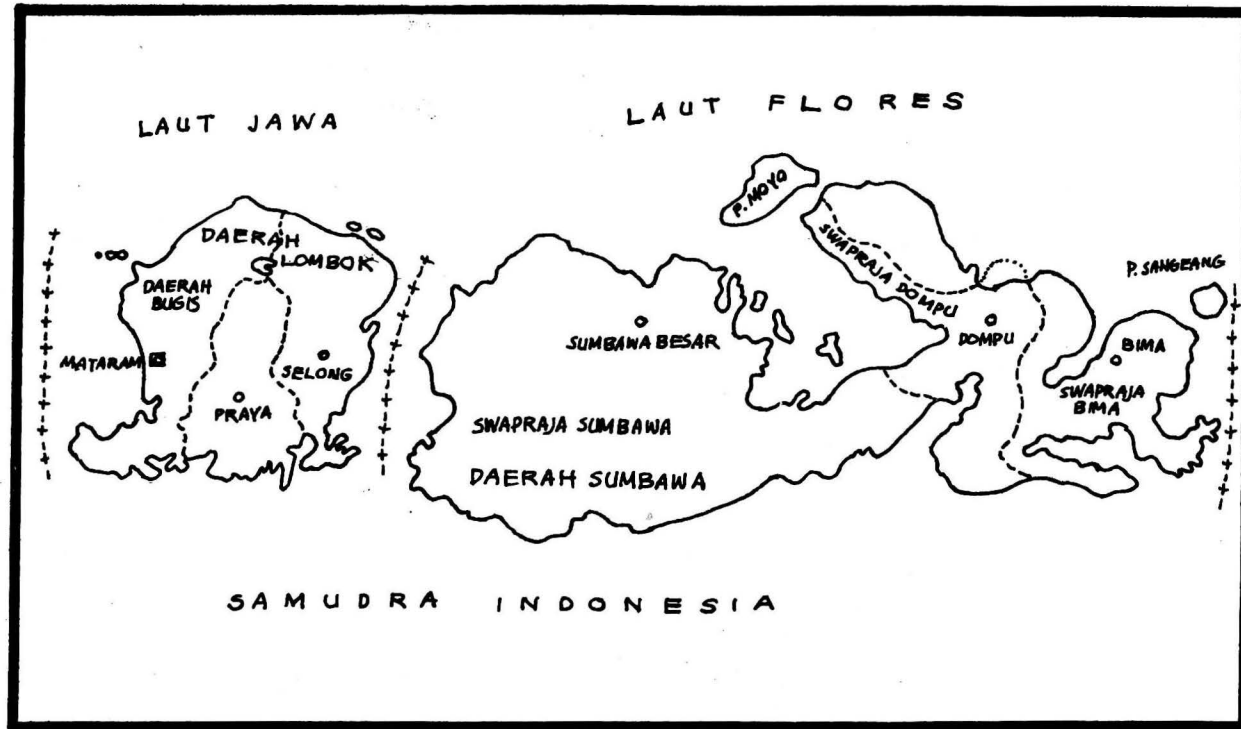
Organisasi dan tata pemerintahan segera diatur berdasarkan maksud Pemerintah Belanda dengan dalih yang akan menyerahkan kepada penduduk untuk memikirkan bentuk pemerintahan di Indonesia sebagai yang diinginkan. Pemerintah Belanda hanya akan menyelenggarakan saja.

Pemerintahan Daerah Lombok beserta aparatnya jalan terus. Hanya pejabat - pejabat saja yang diganti dengan pejabat-pejabat yang setia kepada Belanda. Kepala Daerah Lombok tetap dijabat oleh Raden Nuna Nuraksa. Kepala Pemerintah Setempat (KPS) Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing dijabat oleh Lalu Darwisah, Lalu Wirantanus dan Lalu Mahnep. Pulau Lombok dimasukkan ke dalam Keresidenan Bali dan Lombok dengan Residennya Overste Ter Meulen, C.C.O.A.M.A.C.B. (**Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affair Branch**) yang berkedudukan di Denpasar. 1) Asisten Residen Lombok dijabat oleh Lapree merangkap Kontrolur Lombok Barat. Sedangkan Kontrolur Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing dijabat oleh Van Baal dan Linner.

Pada bulan Juni 1946 dibentuk pula **Lombok Raad** yang dipimpin oleh Raden Nuna Nuraksa. Anggota - anggota Dewan diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Pemerintah setempat dan Asisten Residen. Tugas Dewan sebagai penasehat pemerintah tentang segala sesuatu yang akan dijalankan. 2)

Pulau Sumbawa dikembalikan ke **Afdeeling Sumbawa** dan Sumba dalam lingkungan Keresidenan Timor dan Daerah Taklukannya. Residenya W.C. Schuller yang berkedudukan di Kupang. Asisten Residen **Afdeeling Sumbawa** dan Sumba berkedudukan di Sumbawabesar. Di tiap - tiap Swapraja duduk seorang kontrolur Belanda.

P. LOMBOK DAN P. SUMBAWA ZAMAN PENDUDUKAN NICA/NIT (1945-1949)



Sebelum status Dompu dikembalikan kepada status Kesultanan di pulau Sumbawa hanya terdapat dua buah Daerah Swapraja, Sumbawa dan Bima. Kedua Daerah Swapraja itu pada tahun 1946 mengadakan suatu ikatan federasi yang diketuai oleh Sultan M. Salahuddin. Pada tahun 1947 anggota federasi menjadi tiga daerah Swapraja dengan diakuinya kembali Dompu sebagai Daerah Kesultanan.

Di tiap - tiap Swapraja didirikan sebuah Dewan yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Swapraja atas persetujuan Asisten Residen dan para Kontrolur. Dewan diberi hak dan tugas memberikan nasehat kepada Kepala Swapraja tentang segala tindakan yang akan dijalankan. 3)

Sementara itu pergolakan jalan terus. Belanda berusaha memperkecil daerah Republik Indonesia dengan mendirikan negara - negara boneka. Pada tanggal 16 Juli 1946 Dr H.J.van Mook memimpin Konperensi Malino (dekat kota Makasar). 4) Pada konperensi tersebut hadir wakil - wakil dari berbagai daerah di Timur Besar. Dari pulau Lombok hadir Lalu Mahnep dan Lalu Srinata, sedangkan dari pulau Sumbawa ditunjuk untuk hadir M. Kaharuddin (Sultan Sumbawa).

Dalam konperensi itu diputuskan bahwa negara Indonesia harus berbentuk Negara Serikat yang terdiri dari negara - negara bagian dan sebelum negara federal terbentuk, harus ada masa peralihan dan selama itu kedaulatan tetap ada di tangan Belanda.

Hasil Konperensi Malino dibawa ke Konperensi Denpasar yang diselenggarakan dari tanggal 8 sampai 18 Desember 1946. Konperensi Denpasar ini merupakan lanjutan dari Konperensi Malino. Jumlah wakil - wakil daerah bertambah. Dari Lombok hadir Lalu Srinata, Lalu Mahnep, Lalu Abdurrahman, Raden Nuna Nuraksa, dan I Gusti Bagus Oka. Dari Sumbawa hadir pula di Konperensi Denpasar : Moh. Kaharuddin, Abdulmutalib Daeng Talu dan Lalu Hasan Mustami. 5)

Konperensi Denpasar menghasilkan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946 dengan Presidennya yang pertama Cokorde Gde Raka Sukawati yang berkedudukan di Makasar. Semua wakil yang menghadiri Konperensi Denpasar dilantik menjadi anggota DPRS NIT. 6) Kabinet I NIT dilantik pada tanggal 10 Januari 1947 dengan Perdana Menteri Najamuddin Daeng Malewa. 7)

Setelah NIT kemudian berturut-turut didirikan negara-negara boneka lainnya yang semakin memperkecil wilayah RI.

Tindakan Belanda yang demikian itu disambut oleh para pejuang dengan perasaan kecewa. Apalagi Belanda secara terus menerus mendatangkan divisi - divisinya ke Indonesia dari Negeri Belanda. Karena itu mereka terus menentang dengan berbagai cara sesuai dengan situasi. Di Bima Idris M. Jafar dan kawan-kawan meletakkan jabatan dan mengadakan gerakan non kooperator. Rakyat memboikot uang NICA. Mereka menolak uang NICA sebagai alat pembayaran. Pejuang - pejuang yang masih bebas berusaha membebaskan teman - temannya yang di dalam tahanan.

B. GERAKAN PEMBERSIHAN OLEH NICA.

Di daerah Bima dan di Lombok tuntutan pembebasan itu semakin keras kepada Pemerintah. Di Bima demonstrasi - demonstrasi dilancarkan. Kaum wanita pun tidak ketinggalan dalam kegiatan demonstrasi ini. Dengan dipelopori oleh Siti Hawa Thayeb dan kawan - kawan, mereka mengadakan demonstrasi menuntut kepada Sultan Bima agar tawanan - tawanan segera dibebaskan. Akhirnya Sri Sultan pun membebaskan seluruh tawanan yang ada. Setelah dibebaskan ada yang memilih jalan non kooperator dan ada pula yang kooperator. 8)

Di Lombok tindakan pemerintah lebih keras. Karena menurut info masih ada senjata yang disembunyikan rakyat maka sejak penangkapan 19 Pebruari 1946 pembersihan dilakukan terus menerus. Pembersihan yang diadakan pada bulan April 1946 oleh Gajah Merah (MP) telah menimbulkan keresahan. Penangkapan tidak lagi hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga meluas kepada murid - murid remaja.

Maka jangankan pembebasan, aksi pembersihan saja tidak dapat diharapkan akan berhenti dalam waktu yang singkat. Jumlah antara yang dibebaskan dengan yang ditangkap kemudian tidak sepadan. Aksi balasan pun segera direncanakan. Dalam pertemuan yang diadakan secara rahasia di Dasan Otak Aik Pancor di bawah pimpinan Jumhur Hakim, Mamiq Muhammad dan Haji Misbah mereka sepakat akan segera mengangkat senjata terhadap NICA. Kontak dengan Jawa dan Bali pun diadakan untuk memperoleh senjata.

Seluruh sisa kekuatan yang masih setia kepada RI dihimpun dalam Badan Perjuangan Rakyat Indonesia (BPRI). BPRI dibentuk pada tanggal 11 Mei 1946 dan dipimpin oleh Mamiq Muhammad, Jumhur Hakim, Sayid Saleh, Haji Misbah, Siun dan lain-lain.

Sebagai basis pertahanan ditetapkan Pringgasela, Lendangnangka dan Timbanuh.

Dalam aksinya BPRI berusaha mengeluarkan para tahanan melalui keluarga yang bersangkutan, mengadakan sabotase dan propaganda yang membangkitkan semangat rakyat yang telah mulai lesu. Tiap - tiap anggota pimpinan BPRI masing - masing membentuk pasukan dan bertanggung jawab kepada pimpinan BPRI.

Dikeluarkannya beberapa tokoh pejuang yang ditahan seperti Hasmo Suwignjo, R. Mujiman dan Mamiq Padelah menambah semangat dan kekuatan moril di garis depan. Aksi - aksi pelakat dan pengibaran bendera Merah Putih diadakan di Masbagik oleh Abdul Manan dan kawan - kawan dan di kota Mataram oleh para siswa seperti N. Tugur, Gendera, Muslihin, Mukhtar dan lain - lain di pimpin oleh R. Mujiman dalam koordinasi barisan Banteng Hitam. Situasi menjadi panas kembali. NICA mengorganisasi demonstrasi anti Banteng Hitam. Peserta - peserta dikerahkan dari rakyat petani yang buta politik melalui Kepala Distrik dan Kepala Desa yang setia kepada NICA. Mata - mata NICA semakin giat bekerja.

Dalam situasi yang demikian itu BPRI merencanakan penyerangan tangsi militer NICA di Selong. Rencana penyerangan tanggal 3 Juni 1946 gagal karena dapat diketahui lebih dahulu oleh musuh. Rencana yang kedua pada tanggal 7 Juni 1946. Pasukan penyerang dibagi atas dua bagian. Pasukan yang dipimpin oleh Sayid Salim, Amaq Alisah, Muhammad Syah dan Maidin akan menyerang Selong dari utara. Penyerangan dari sebelah selatan dipimpin oleh Sayid Saleh dan Jumhur Hakim. Hampir semua pasukan yang melakukan penyerangan berasal dari luar kota. Pada jam yang telah ditentukan pasukan - pasukan tersebut berkumpul di Mbungbasari 2 km di sebelah selatan Selong. Pasukan yang dari Pringgasela dan Lendangnangka di bawah pimpinan Sayid Saleh, Abdullah, Bapak Dollah dan Jumhur Hakim bergabung menjadi satu komando dengan pasukan - pasukan yang berasal dari Masbagik dan Danger di bawah pimpinan Haji Misbah dan Tuan Guru Haji Mahsun yang diperkuat pula oleh pasukan Tuan Guru Haji Faesal dari Pancor dan pasukan Lalu Muchtar dari Dasan Lekong.

Dengan bersenjatakan keris, pedang, tombak, bambu runcing dan sepucuk pistol komando yang dipegang oleh Sayid Saleh seluruh pasukan menyerbu tangsi militer NICA pada jam 24.00 mereka menyerbu sambil membaca takbir dan shalawat. Dalam perang bersusah yang segera terjadi di dalam tangsi ketika itu pim-

pinan penyerbu Sayid Saleh, Tuan Guru Haji Faesal dan Abdullah gugur, pihak NICA menderita delapan orang meninggal. Pertempuran berlangsung kurang lebih 15 menit, kemudian para penyerang mengundurkan diri secara teratur setelah tembakan bunga api menerangi sekitar tangsi.

Ketiga pahlawan yang gugur itu dimakamkan di kota Selong oleh siswa Nahdhatul Wathan Pancor secara sederhana sekali. Baik kawan maupun lawan tidak ada yang menghadiri pemakamannya oleh situasi yang sangat gawat.

Karena peristiwa penyerangan itu pada tanggal 8 Juni 1946 seluruh kekuatan bersenjata NICA di kota Selong disiagakan penuh. Penangkapan - penangkapan atas orang yang dicurigai dilakukan sejak pagi hari. Menjelang tengah hari gelombang demonstran NICA yang mengutuk serangan semalam memenuhi kota Selong. Sementara mayat para pejuang masih tergeletak tanpa rawatan. Barulah setelah sore hari jenazah para pejuang dimakamkan di Selong oleh para siswa madrasah Nahdhatul Wathan Pancor.

Pada hari itu seluruh kekuatan militer dan polisi NICA yang ada di Lombok Barat dan Lombok Tengah dikerahkan melakukan pembersihan di seluruh Lombok Timur. Hampir seluruh anggota pasukan BPRI yang ada di desa Masbagik, Pringgasele, Lenek, Lendangangka, Dasan Lekong, Pancor Selong, Rumbuk, Teaban Kelayu, Tanjung dan lain - lain ditangkap hari itu. Beberapa pimpinan perjuangan yang baru saja dikeluarkan ditangkap lagi, diantaranya termasuk Mamiq Padelah. Seluruhnya dianggap ekstrimis tanpa kecuali. Dalam beberapa hari saja segala unsur perlawanan di Lombok sudah dapat dibersihkan. Untunglah rahasia tetap terpelihara sehingga usaha penangkapan dan pengusutan selanjutnya Belanda mengalami kesulitan.

Setelah diadakan penyeleksian, yang dianggap mempunyai kesafahan yang berat dipindahkan ke penjara Mataram, selanjutnya ke penjara Denpasar. Empat puluh di antaranya dijatuhi hukuman antara dua sampai 15 tahun penjara oleh Pengadilan Militer Belanda di Denpasar. Sebagian menjalankan hukuman di Ambon. Selebihnya sejumlah 80 orang dibebaskan setelah ditahan antara dua minggu sampai enam bulan.

Pergerakan di bawah tanah yang dipimpin oleh anggota TKR yang sengaja diselundupkan dari Jawa ke Sumbawa juga segera dapat dibersihkan NICA. Sebelum sempat mereka melakukan operasi gerakan mereka tercium musuh yang disusul dengan penangkapan dan penahanan terhadap anggotanya. Keenam TKR yang dari Jawa itu, Letda Paiman, Kopral Seram Malik (Petrus) dan

Kopral Yosep Babo Rake dan kawan - kawannya seperjuangan yang menyusun kekuatan di bawah tanah seperti Saguni, Lalu Mala, Sarilan Umar, Mangandar Alam, Haji M. Jambek, Daud Abdullah, Darma Hasan, Indermawan dan Indarjaya tertangkap semua. Seluruhnya yang ditangkap dan ditahan dalam aksi pembersihan 3 Januari 1947 berjumlah 107 (Seratus tujuh) orang.

Setelah ditahan beberapa hari lamanya mereka dibebaskan lagi kecuali pemimpin - pemimpin mereka. Oleh Pengadilan Militer di Kupang mereka dijatuhi hukuman penjara antara 2½ tahun sampai 12 tahun. Mereka semua menjalankan hukuman di pulau Timor.

Sekalipun semua perlawanan fisik di Nusa Tenggara Barat dapat dipatahkan dan dihancurkan dengan mudah oleh NICA, tetapi semuanya itu telah menimbulkan kesadaran di pihak Belanda bahwa situasi di Nusa Tenggara Barat telah jauh berbeda dengan sebelum Perang Dunia II. Hasyrat merdeka tidak saja tumbuh di Jawa dan Sumatera tetapi juga di Nusa Tenggara Barat. Hanya karena persenjataan yang sangat minim saja menyebabkan perlawanan dan gerakan mereka mudah dipatahkan. Maka itu Belanda pun semakin bertindak lebih longgar dalam pemerintahan.

Pada awal tahun 1947 di daerah pulau Sumbawa diadakan pula sebuah Dewan yang dinamakan Dewan Pulau Sumbawa. Dewan ini dilantik pada tanggal 27 Pebruari 1947. 9) Anggotanya diambil dari anggota Dewan Kerajaan masing-masing sesuai dengan besarnya kerajaan dan banyaknya penduduk. Meskipun Dewan ini hanya bersifat badan penasehat tetapi penting artinya sebagai badan penyalur aspirasi rakyat dan merupakan suatu peluang bagi memungkinkannya masuknya orang - orang yang berhaluan republiken.

Pada tahun 1947 itu juga, semua hak dan wewenang **Hoofd van Plaatselijk Bestuur** (HPB) di dalam ketiga Swapraja di daerah Sumbawa diserahkan ke dalam tangan **Zelfbestuurder** yang dijabat oleh M. Salahuddin, Sultan Bima.

Sementara itu tahanan politik juga berangsur - angsur dikeluarkan. Tanpa melepaskan prinsip mereka bergerak di berbagai bidang kehidupan dan berusaha memelopori bagi tercapainya cita - cita perjuangan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan hidup berdampingan dengan segenap bangsa - bangsa di dunia.

C. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.

1. Tata Pemerintahan

Sejak terbentuknya NIT pada tanggal 24 Desember 1946, tata pemerintahan semakin teratur dan keadaan semakin tenang. Berbagai usaha bagi kemakmuran masyarakat mulai diusahakan yang perlu mendapat pelayanan sebaik - baiknya. Beberapa dinas/instansi baru dibentuk yang memerlukan pegawai pula. Para pemuda terpelajar berbondong - bondong masuk menjadi pegawai negeri mengisi lowongan yang tersedia.

1. Tata Pemerintahan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pulau Lombok dan pulau Sumbawa masuk propinsi Sunda Kecil. Propinsi Sunda Kecil meliputi bekas wilayah Keresidenan Bali dan Lombok dan Keresidenan Timor dan Daerah Takluknya dengan ibu kota Singaraja. Gubernur yang pertama diangkat oleh Pemerintah Pusat ialah Mr. I Gusti Ketut Puja. Komite Nasional Indonesia Pusat Sunda Kecil diketuai oleh Ida Bagus Putera Manuaba.

Sementara belum diatur, susunan pemerintahan di pulau Lombok dan di pulau Sumbawa tetap berlaku seperti semasa Zaman Peralihan, sebelum pemerintahan Republik berlaku di kedua daerah tersebut. Pulau Lombok dibagi atas tiga daerah bagian masing - masing Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Tiap - tiap daerah bagian dibagi atas distrik, desa dan keliangan. Kepala daerah Lombok tetap dijabat oleh Raden Nuna Nuraksa. Kepala Daerah Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur masing - masing dijabat oleh Lalu Darwisah, Lalu Srinta kemudian diganti oleh Lalu Wirentanus dan Mamiq Padelah.

Pulau Sumbawa terdiri dari dua buah Daerah Swapraja, Swapraja Sumbawa dengan Kepala Swapraja Sultan Moh. Kaharuddin dan Swapraja Bima Dompou dengan Kepala Swapraja Sultan M. Salahuddin. Swapraja Sumbawa dibagi atas kedemungan dan kampung (Kelurahan). Swapraja Bima dan Dompou selanjutnya dibagi atas Kejenelian dan Gelarang.

Kemudian setelah kekuasaan NICA dan terbentuknya Negara Indonesia Timur pada tanggal 24 Desember 1946, pulau Lombok dan pulau Sumbawa masuk dalam lingkungan administrasi peme-

rintahan Komisariat Daerah Selatan yang meliputi bekas Propinsi Sunda Kecil atau bekas Daerah Keresidenan Timor dan Daerah Takluknya dan Keresidenan Bali dan Lombok. Dalam Undang-Undang pembentukannya yang termuat dalam Lembaran Hindia Belanda (Staatsblad) No.143 tahun 1946 dinyatakan bahwa pulau Bali dan pulau Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor dan kepulauannya masing - masing menjadi daerah yang otonom. Kesultanan Sumbawa dan Kesultanan Bima - Dompu tergabung dalam federasi pulau Sumbawa. Ketua Federasi dijabat oleh Sultan M. Salahuddin. Pada tahun 1947 Kesultanan Dompu yang sejak tahun 1934 digabung dengan Kerajaan Bima, diberi berdiri lagi yang tergabung dalam federasi pulau Sumbawa.

Berdasarkan ketentuan ini maka daerah-daerah Swapraja bersangkutan menyerahkan sebagian kekuasaan dan beberapa macam urusan Swapraja dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Dewan Raja - raja pada tanggal 23 Agustus 1948. Kepada rakyat diberi hak untuk mengatur pemerintahan. Berdasarkan ketentuan itu untuk tiap Swapraja dibentuk Dewan Swapraja dan untuk pulau Sumbawa dibentuk Sumbawa Eiland Raad (Dewan Pulau Sumbawa) yang anggotanya diambil dari anggota - anggota Raad Kerajaan. Anggota - anggota Dewan Swapraja diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Swapraja masing - masing. Dewan Pulau bertugas sebagai badan penasehat kepada Dewan Raja - raja. Dewan Swapraja bertugas memberi nasehat kepada Kepala Swapraja.

Sumbawa Raad (Dewan Swapraja Sumbawa) pertama kali diketuai oleh dr. Ariotejo kemudian diganti oleh L. Padoesoeng. Badan eksekutif (Majelis Pemerintahan) Kesultanan Sumbawa terdiri dari Datu Ranga, Dea Kalibela dan Dea Dipati masing - masing dijabat oleh Abdulmajid Daeng Matutu, Lalu Manjawakang dan Haji Abdullah L. Tunruang. Tiga anggota lainnya masing-masing : L. Hasan Mustami, Dea Ngeru, L. Damhuji Husein, Dea Longan dan Haji Muhammad Amin, Dea Qadli. Lain pula di Swapraja Bima pada masa pendudukan NICA. Susunan pemerintahan berbeda dengan sewaktu pendudukan Jepang. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif Sultan dibantu oleh suatu Dewan Pemerintahan yang anggotanya terdiri dari lima orang :

- a. Tureli Nggampo, sebagai koordinator (Urusan Pemerintahan), Nazaruddin.
- b. Tureli Bolo, anggota (Urusan Kehakiman), A.D.Talu.
- c. Tureli Woha, anggota (Urusan Keuangan), Ahmad.

- d. **Tureli Sekuru**, anggota (Urusan Kemakmuran), **M. Hasyim**.
- e. **Tureli Parado**, anggota (Urusan Dekonstrasi), **Abidin Ishak**.

Dewan di atas dibentuk menurut hukum dan adat dengan Sk Pemerintah Kesultanan Bima - Dompu tanggal 18 - 2 - 1948 No.13. Surat Keputusan tersebut diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Pemerintah Kesultanan Bima tanggal 15 - 11 - 1947 No. 117 berhubungan dengan keluarnya Sk Residen Timor dan pulau - pulau nya tanggal 12 - 9 - 1947 No. 1A yang memisahkan Kerajaan Dompu dari Kerajaan Bima. Di bidang urusan agama, Sultan Bima dibantu oleh Badan Hukum Syara' yang dibentuk dengan Sk Pemerintah Kesultanan Bima tanggal 4 Mei 1947 No. 42. Badan Hukum Syara' terdiri dari tujuh orang anggota : Imam, penghulu, lebe dalam, khatib tua Bima, khatib Karoto Bima, khatib lawili Bima dan khatib toi Bima. Tugas dan wewenang Badan Hukum Syara' ialah mengurus dan memutuskan segala Hukum Syara' di Kesultanan Bima. Tugas dan wewenang itu meliputi : Urusan Umum, Kehakiman, Keuangan (Zakat dan lain - lain), Pendidikan, Pembangunan, Penerangan dan Sosial.

Semua pejabat adat, selain mendapat gaji juga mendapat tanah sawah. Agak berbeda dengan susunan pemerintahan di Bima, sejak berdirinya kembali Kesultanan Dompu pada tahun 1947, kekuasaan tertinggi dipegang oleh **Wd.Zelfbestuurder** yang dijabat oleh **M. T. Sirajuddin**. Dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif beliau dibantu oleh **Majelis Hadan** yang anggota - anggotanya terdiri dari :

- a. **Raja Bicara** (Perdana Menteri).
- b. **Raja RasanaE** (Menteri Urusan Umum).
- c. **Rato Parenta** (Menteri Urusan Pemerintahan).
- d. **Rato Renda** (Menteri Urusan Pertahanan).

Di bidang agama beliau dibantu oleh **Majelis Syara'iah** yang dikepalai oleh seorang Qadli atau kadang - kadang dikepalai oleh **Wd. Zelfbestuurder** sendiri.

Di bidang legislatif **Wd.Zelfbestuurder** didampingi oleh Dewan Swapraja yang anggota - anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Swapraja. Tugas Dewan ialah sebagai Badan Penasehat. Di samping **Wd.Zelfbestuurder** terdapat pula seorang **Controleur** dari orang Belanda yang menjabat **Hoofd Plaatselijk Bestuur**.

Pada tanggal 23 Agustus 1948 Undang - Undang Federasi Pulau Sumbawa ditetapkan kembali. Berdasarkan Undang - Undang yang baru fungsinya diperluas dengan diberi hak ikut membuat Peraturan Daerah (medewet gevend). Pendemokrasian pemerintahan pun dimulai secara bertahap. Pada tanggal 11 Desember 1948 Dewan Raja - raja Daerah Pulau Sumbawa mengeluarkan Surat Keputusan No. 30 mengenai Peraturan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pulau Sumbawa. Sumbawa Eiland Raad dibubarkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Pulau Sumbawa beranggotakan 21 orang masing - masing delapan orang wakil Bima, enam orang wakil Sumbawa, tiga orang wakil Dompu, dan empat orang wakil golongan minoritas. Kecuali wakil golongan minoritas dipilih secara bertingkat melalui kiesmanen. Anggota - anggota DPR Pulau Sumbawa dilantik pada tanggal 18 Pebruari 1949. Bersamaan dengan itu pula semua anggota Raad Bima, Dompu dan Sumbawa diberhentikan dengan hormat diganti oleh anggota - anggota hasil pemilihan.

Selanjutnya di bidang eksekutif pun terdapat perubahan besar. Pada tanggal 26 Maret 1949 kekuasaan Asisten Residen diserahkan kepada Ketua Dewan Raja - raja (Kepala Daerah), Sultan Moh. Salahuddin. Penyerahan dilakukan di Sumbawa Besar oleh Mr. S. Binol. Menteri Sosial NIT atas nama Menteri Dalam Negeri NIT.

Sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NIT tanggal 24 Pebruari 1948 No. Bz.1/3/31 telah pula diserahkan kekuasaan Hoofd Plaatselijk Bestuur (HPB) kepada tiap-tiap Kepala Swapraja di pulau Sumbawa.

Di pulau Lombok sejak terbentuknya Daerah Lombok pada tahun 1946, selain Pemerintah NCA menetapkan Kepala Daerah dan Kepala Pemerintah juga dibentuk Lombok Eiland Raad (Dewan Lombok) yang anggota - anggotanya diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Daerah bersama Asisten Residen. Lombok Eiland Raad pertamakali diketuai oleh Raden Nuna Nuraksa yang merangkap sebagai Kepala Daerah Lombok. Pulau Lombok dibagi atas tiga ressort afdeeling yang masing-masing diperintah oleh Kepala Pemerintah.

Tahun 1949 Lombok Eiland Raad dirombak menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lombok yang anggota - anggotanya dipilih secara bertingkat. Kemudian untuk membantu Kepala Daerah Lombok dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dibentuk pula

Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Kekuasaan Asisten Residen pun diserahkan kepada Kepala Daerah. Sejak itu baik di pulau Sumbawa maupun di pulau Lombok berakhirlah kekuasaan Belanda. Di pulau Lombok dan pulau Sumbawa hanya tinggal seorang pegawai Belanda sebagai Sekretaris Daerah.

2. Bidang Ekonomi.

Sebagai daerah agraris, Nusa Tenggara Barat dalam bidang produksi industri sangat tergantung kepada dunia luar. Lebih-lebih ketika ekonomi Belanda diganti oleh Jepang. Jepang yang melaksanakan ekonomi perang, telah mengarahkan segala dana dan daya untuk kepentingan perang. Prasarana ekonomi sebagian besar rusak atau hancur. Segala perusahaan dan perdagangan di tangan Jepang. Jepang menjalankan monopoli dalam segala bidang usaha. Rakyat Indonesia di perusahaan Jepang hanya menjadi pelayan dan buruh kasar.

Pada waktu Jepang kalah dan masyarakat Indonesia yang merdeka, telah menerima warisan keadaan ekonomi yang kacau balau. Dari keadaan itulah bangsa Indonesia mulai bertolak. Tetapi sebelum sempat mereka bangun datang pula tantangan dari NICA. Pemerintah RI Nusa Tenggara Barat yang mencoba mengumpulkan dana dengan membentuk Bank di bawah pimpinan I Nengah Metra gagal.

NICA yang sangat memahami situasi dan kondisi masyarakat yang sedang parah demikian itu, mempergunakan ekonomi sebagai alat politiknya. Ejekan yang pertama tentang kemampuan bangsa Indonesia di bidang teknologi yang dilemparkan ke dalam masyarakat, menimbulkan rasa rendah diri tentang kemampuan RI di bidang ekonomi dan teknik. Kemerosotan nilai uang waktu itu menimbulkan harapan baru bagi kemajuan ekonomi yang akan dibawa oleh NICA.

Dan sejak NICA menginjakkan kakinya di mana-mana di seluruh Nusa Tenggara Barat, maka yang pertama - tama dilakukannya ialah mengadakan move ekonomi dengan menampakkan kemakmuran di bawah Pemerintahan NICA. Kesan yang pertama sepanjang jalan dari tempat pendaratannya sampai kota tujuan di pulau Lombok NICA menghambur - hamburkan mata uang receh, roti dan permen. 11)

Beberapa minggu kemudian pasar dibanjiri dengan barang-barang kebutuhan pokok (pakaian dan alat - alat rumah tangga).

Sebagai alat pembayaran yang sah uang Belanda (Hindia Belanda dan *De Javasche Bank*). Penukaran uang Jepang dilaksanakan secara berangsur - angsur. Tiap Rp.100,- Jepang ditukar dengan uang f 0,03 Hindia Belanda. Di samping itu masih diperkenankan uang kepeng sebagai alat pembayaran yang sah. F 1,- sama dengan 400 kepeng. Kecuali di Bima dalam beberapa bulan pada awal pemerintahan Belanda, uang Belanda diboikot oleh masyarakat atas anjuran para pejuang yang menjalankan aksi non koope-ratif. Di beberapa tempat uang Belanda ditolak sebagai alat pem-bayaran yang sah. 12) Setelah Sultan turun tangan keadaan men-jadi normal kembali.

Keadaan ekonomi pun mulai lancar. Hampir seluruh perda-gangan dikuasai oleh orang - orang Belanda. Orang - orang Cina dan Arab bangkit kembali dan memegang posisi penting dalam setiap sektor perdagangan. Orang - orang Indonesia kebanyakan bertindak sebagai tengkulak. Beberapa di antaranya mencoba ber-diri sendiri secara kecil - kecilan di bidang hasil bumi dan peter-nakan. Ada pula yang langsung memperdagangkan hasil bumi ke luar pulau dengan mempergunakan perahu. Ekspor dan impor ramai kembali. Pengangkutan interinsuler dan ke luar negeri Singa pura dan Hongkong diselenggarakan oleh KPM (**Koninklijke Pakét Vaart Maatschappij**). KPM diberi hak monopoli atas penga-kuan interinsuler dan internasional. Begitu pula hubungan darat antara kota mulai lancar dan menimbulkan pemerataan hasil yang mendatangkan kemakmuran bagi seluruh wilayah. Situasi yang demikian itu memberikan gairah kepada para petani untuk melipat gandakan hasil produksinya. Tetapi pemerintah tidak dapat men-gatur dan mengendalikan harga. Ternyata harga hasil pertanian tidak seimbang dengan harga barang industri. Hal itu menyubur-kan tumbuhnya ijonisme yang mendatangkan kesengsaraan ke-pada petani miskin. Membanjirnya barang kebutuhan hidup di pasar dengan harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga barang hasil pertanian telah mengakibatkan pengeluaran yang ber lebihan dari kemampuan. Apalagi para petani pada umumnya ber-belanja ketika panen baru selesai. Harga pertanian mereka turun dan harga barang di kota naik. Sehingga timbul berbagai spekulasi oleh para pedagang yang sangat menguntungkan tetapi membawa penderitaan kepada rakyat banyak.

Hasil pertanian yang sudah terkumpul dijual ke luar daerah, terutama beras yang hampir setiap tahun menyebabkan kelaparan di desa - desa kritis. Walaupun pemerintah menganjurkan supaya rakyat di daerah kritis mendirikan lumbung bibit, tetapi karena

rakyat belum matang berorganisasi, usaha mereka selalu gagal dan pemerintah turun tangan dengan memberi pinjaman bibit yang dikembalikan sehabis panen. Demikianlah nasib para petani yang selalu bergulat dengan kesulitan hidup. Perkembangan ekonomi rakyat sangat statis dan kian tahun bertambah sulit oleh perkembangan kebutuhan yang dipengaruhi oleh perkembangan dunia dan tuntutan hidup mereka yang semakin berkembang pula.

Sistem pemungutan pajak yang semakin intensif dan meningkat merupakan salah satu yang menjerumuskan rakyat, sebab waktu pemungutannya selalu baru sehabis panen, ketika harga padi masih rendah.

Kaum modal yang pada umumnya orang Cina melepaskan modalnya melalui tengkulak - tengkulak bumiputera yang berkeliraran di desa - desa. Semua jenis hasil pertanian dan peternakan dikumpulkan dan diexport oleh pedagang - pedagang Cina. Barang-barang ekspor yang utama dari pulau Lombok ialah beras, disusul dengan hasil palawija, tembakau, kedelai, kacang tanah, bawang merah dan bawang putih. Hasil peternakan ialah sapi dan kerbau. Sedangkan dari pulau Sumbawa banyak diexport kerbau, kemudian menyusul bawang merah dan garam.

3. Bidang Sosial Budaya.

a. Perubahan Sosial.

Berbagai tekanan hidup yang ditimbulkan oleh situasi perang telah mendorong masyarakat untuk mengubah cara berfikir dan bertindak. Latihan kemiliteran yang didapat oleh pemuda dalam berbagai kesatuan Seinendan, Heiho, Keibodan, Peta dan lain-lain telah menumbuhkan harga diri, disiplin serta kepercayaan kepada diri sendiri. Dari kalangan rakyat jelata yang buta huruf telah mengenal cara baru melalui pengalamannya dalam romusha. Tindakan Jepang yang keras dan kejam dan tindakannya dalam usaha monopoli atas padi dan kapas, semuanya telah membongkar sendi-sendi kehidupan masyarakat yang sangat mendasar.

Ikatan sosial yang lama menjadi longgar dan mulai timbul kesadaran bahwa kemajuan hanya diperoleh melalui pendidikan dan kerja. Cara - cara hidup yang serba magis tradisional mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Sampai masyarakat yang paling primitif sekalipun tampak gejala berontak menguasai alam. Kemajuan - kemajuan itu juga diperoleh akibat terbukanya isolasi dengan dunia luar.

Dalam periode awal kemerdekaan Indonesia perubahan sosial itu terus berlanjut. Mobilitas horizontal maupun mobilitas vertikal berlangsung dengan cepatnya. Penyebaran kekuasaan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia, menimbulkan lowongan bagi orang-orang Indonesia untuk menduduki jabatan - jabatan penting dalam pemerintahan.

Meskipun tampuk pemerintahan dalam setiap tingkatan dari Kepala Daerah sampai kepada Kepala Desa masih dipegang oleh orang - orang bangsawan, tetapi karena banyaknya lowongan, memberi kesempatan bagi anak - anak rakyat biasa menjadi pegawai. Karena banyaknya dari golongan inilah kelak ia mempengaruhi corak pemerintahan dan masyarakat dalam perkembangannya

b. Perkembangan Seni Budaya.

Pada Zaman Jepang aktivitas kesenian tradisional sementara terhenti disebabkan oleh situasi perang yang sedang berkecamuk dan fasilitas yang serba sulit. Kedudukannya diisi dengan seni drama kontemporer yang berfungsi sebagai alat propaganda bagi memenangkan Perang Asia Timur Raya. Kesenian pada Zaman Jepang banyak didukung oleh guru dan murid - murid sekolah. Mereka tergabung dalam grup drama yang mengadakan pementasan keliling sampai ke desa - desa. Isinya mengobar - ngobarkan semangat anti Inggris dan Amerika.

Di sekolah anak - anak diajar bahasa Jepang dan diceriterakan dengan dongeng - dongeng Jepang. Nyanyian - nyanyian demikian pula. Kebanyakan diajarkan lagu - lagu mars perjuangan melawan Sekutu dan lagu - lagu Jepang sendiri. Anak - anak dididik berfikir dan bertindak secara Jepang.

Perkembangan bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Selain diajarkan di tiap tingkat sekolah, juga menjadi bahasa pergaulan umum di kalangan orang - orang yang sudah menenyam pendidikan sekolah. Lebih - lebih setelah kemerdekaan perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat. Peranan bahasa daerah semakin terdesak. Bahasa Jepang selain dilarang tetapi juga tidak memikat hati rakyat. Bahasa Jepang tidak lagi diajarkan di sekolah. Kedudukannya sebagai bahasa asing digantikan oleh bahasa Inggris. Apalagi hurufnya serba rumit.

Setelah Pemerintah Belanda, bahasa Belanda menempati tempat kedua. Bahasa Belanda diajarkan pada tiap tingkat sekolah menengah. Di sekolah rakyat bahasa Belanda diajarkan mulai dari kelas VI. Kedudukan drama kontemporer diganti oleh Manila Opera di bawah pimpinan Tuan Nathen berkebangsaan Filipina.

Dimungkinkan oleh sarana dan fasilitas yang mudah didapat kesenian tradisional pun tumbuh dan berkembang kembali seperti sebelum Perang Dunia II. Pertumbuhan dan perkembangannya seirama dengan perkembangan kehidupan adat istiadat masyarakat. Memang sejak awal pertumbuhannya kesenian tradisional tunjang menunjang dengan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Hidupnya kembali tradisi - tradisi yang berhubungan dengan krisis rites dan rituil di kalangan masyarakat baik yang Islam maupun Hindu telah menghidupkan kembali kesenian-kesenian tradisional. Pada waktu itu hampir tidak ada upacara adat atau keramaian tanpa kesenian. Sekurang - kurangnya seni tembang di Lombok, lawas dan sekeco di Sumbawa, hadrah dan rawa Mbojo di Sumbawa Tengah dan Sumbawa Timur.

Kesenian tradisional yang selama Jepang sementara terpendam oleh berbagai faktor terutama faktor ekonomi, setelah merdeka berkembang kembali. Di Lombok terdapat seni tari, seni rupa seni pedalangan, seni tembang dan seni drama tradisional. Di pulau Sumbawa selain sekeco, lawas juga terdapat bedede, rawa Mbojo, Mpisi, Nu'a, Silu, Kalero, Lenggo, Toja, Kanja, Sere, Mpaa Manca, Mpaa Kantao dan sebagainya.

Di daerah Bima dan Dompu perkembangan kesenian dikendalikan oleh istana dengan menyediakan tanah adat bagi seniman dari berbagai jenis kesenian. Kesenian itu dipergunakan untuk meramaikan upacara dan keramaian di istana yang berhubungan dengan adat atau hari raya agama Islam.

Di Sumbawa Barat dan di daerah Lombok, kecuali seni tembang, kesenian dipelihara oleh sekelompok orang - orang yang mempunyai hobby yang sama. Seorang di antaranya yang paling mampu menjadi penanggung jawab atas terpeliharanya alat - alat dan terselenggaranya latihan - latihan yang kontinyu.

c. Bidang Pendidikan.

Selama pendudukan Jepang di Nusa Tenggara Barat mutu pendidikan merosot. Untuk memudahkan penyelenggaraan dan pengawasan semua pendidikan tingkat sekolah dasar, kecuali yang letaknya terpencil dijadikan Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun. Penyebaran tersebut telah menghapuskan diskriminasi di bidang pendidikan.

Jenis - jenis sekolah yang ada terdiri dari Sekolah Umum :

- 1) Sekolah Desa 3 tahun
- 2) Sekolah Rakyat 6 tahun (Kokumin Gakko)

3) Sekolah Menengah 3 tahun (Cu Gakko)

Sekolah Vak :

1) Sekolah Guru 2 tahun (Syoto Syihan Gakko)

2) Sekolah Guru 4 tahun (Guto Syihan Gakko)

Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan kepada keperluan Perang Asia Timur Raya. Guru - guru dilatih dalam **Hakko Iciu** (Kemakmuran Bersama) bertempat di Selong, Mata-ram, Sumbawa Besar dan Raba Bima. Selama di dalam latihan mereka digembleng mental dan fisik terutama penggembelangan mental ideologis. Sekembalinya mereka diharuskan mengembalikan ilmu dan ketrampilan yang diperolehnya.

Alat - alat sekolah sangat minim. Sehingga mutu pelajaran sangat rendah. Kebanyakan anak - anak menerima gembelangan mental dan fisik. Murid - murid diajarkan baris - berbaris dan melaksanakan **kinrohosi** (kerja bakti). Memperbaiki jalan - jalan dan membersihkan tempat - tempat ibadah. Juga mereka dilatih bercocok tanam di ladang dan di sawah.

Setiap hari mereka menyanyikan lagu kebangsaan Jepang **Kimigayo** dan lagu - lagu perjuangan yang menanamkan semangat Jepang (**Nippon Seisyin**). Untuk kesegaran jasmani mereka diharuskan **taiso** setiap hari. Aba - abanya dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang menduduki tempat kedua setelah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selain disebagai mata pelajaran juga dipakai sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas III. Bahasa Jepang diajarkan di Sekolah Rakyat mulai kelas IV.

Sekolah - sekolah yang diselenggarakan oleh badan swasta seperti **Chung Hwa Chung Hwi** bagi penampungan anak-anak Cina diperbolehkan berdiri terus dengan syarat harus tunduk kepada peraturan - peraturan yang ditetapkan Pemerintah Jepang. Waktu itu sekolah - sekolah Cina terdapat di Ampenan, Masbagik, Cakra-gara, Praya, Labuhan Haji, Sumbawa Besar dan Bima.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang kepada bangsa Indonesia, sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan bagi pembentukan manusia Indonesia yang utuh selamat dan berbahagia lahir dan batin. Usaha pendidikan didasarkan kepada kebangsaan Indonesia yang luas. Pengajaran bertujuan memberikan segala ilmu pengetahuan dan kepandaian yang berguna bagi hidup lahir batin agar kelak murid-murid menjadi warganegara dan anggota masyarakat yang hidup dengan dasar kekeluargaan.

Mata pelajaran bahasa Jepang dihapus. Satu - satunya bahasa yang diajarkan di SR ialah bahasa Indonesia. Di Sekolah Mene-

ngah Pertama selain bahasa Indonesia diajarkan juga bahasa Inggris. Tetapi sementara itu Belanda berkuasa lagi di Nusa Tenggara Barat. Semenjak pertengahan tahun 1946 struktur kurikulum di rubah lagi.

Diskriminasi di bidang pendidikan diadakan kembali. E L S (*Eropeshe Lagere School*) dibuka di Mataram dan di Raba Bima. Cu Gakko di Mataram diubah menjadi MULO 4 tahun, Sekolah Guru 4 tahun dan 2 tahun masing - masing berubah menjadi *Normaalschool* dan OVO. Di tiap tingkat sekolah bahasa Belanda diajarkan. Di Sekolah Rakyat bahasa Belanda mulai diajarkan dari kelas IV. Bahasa Belanda menduduki tempat kedua setelah bahasa Indonesia. Jumlah sekolah tetap. Alat-alat sekolah berangsur angsur dilengkapi. Di samping itu pasar - pasar dibanjiri dengan alat - alat kebutuhan sekolah. Di sekolah Menengah alat - alat tulis dibagi secara gratis. Hanya di Sekolah Mulo murid - murid membayar uang sekolah berdasarkan penghasilan orang tua/wali murid minimal f 3,-.

Di sekolah - sekolah guru murid - murid mendapat ikatan dinas.

Di seluruh Nusa Tenggara Barat waktu itu hanya terdapat sebuah Mulo di Mataram dan dua *Normaalschool* masing - masing di Mataram dan di Raba Bima. Murid - murid yang menamatkan Mulo dapat melanjutkan pelajaran dengan ikatan dinas ke *Kweek-school* di Makasar dan AMS di Makasar atau di Jakarta.

Sejak Zaman Jepang terasa sekolah sangat kurang. Pada Zaman NICA lebih lagi. Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak - anak mereka semakin tinggi. Maka tiap tahun tidak sedikit anak - anak yang ditolak masuk dalam tiap tingkat sekolah.

Meskipun demikian pemerintah tidak berusaha membangun gedung sekolah baru. Terpaksalah murid - murid kelas IV, V dan VI belajar di waktu sore. Setiap tahun terdapat angka **drop out** yang tinggi. Karena produksi tenaga guru dengan penambahan kelas tidak seimbang terjadi kekurangan guru yang menyolok. Pengajaran di sekolah cenderung mengutamakan pelajaran berhitung dari pada pelajaran bahasa dan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ujian masuk sekolah pertama cukup hanya diuji bahasa Indonesia dan berhitung.

d. Agama dan Kepercayaan.

Pada Zaman Jepang syiar agama seolah - olah padam karena rakyat selalu diliputi keraguan dan ketakutan. Tidak ada dha'i yang berani mengumpulkan orang banyak untuk menyelenggara-

kan pengajian. Berbagai situasi yang mempersulit keadaan waktu itu, sulitnya transportasi, gentingnya suasana selalu menghantui masyarakat berbuat dan bertindak bagi kepentingan agamanya.

Sekolah - sekolah agama diawasi dengan ketat dan harus tunduk kepada peraturan dan ketentuan pemerintah. Sehingga karena itu murid - murid madrasah Kediri di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Muhammad Hafidz sementara membubarkan diri.

Aktivitas umat Hindu dan Budha juga selama Jepang berkuasa sangat berkurang. Segala upacara diusahakan sesederhana mungkin. Tidak saja karena suasana perang yang selalu genting tetapi juga sarana dan fasilitas yang menunjang terlaksananya upacara sulit didapat.

Penyerahan Jepang kepada Sekutu disambut oleh masyarakat dengan hati lega. Proklamasi Kemerdekaan RI walaupun terlambat diterima oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat, telah mendatangkan udara dan suasana baru dalam setiap aspek kehidupan.

Syar agama mulai tampak cerah kembali. Walaupun kemerdekaan dan kebebasan itu hanya dikecap dalam beberapa bulan saja, tetapi pemerintah Belanda hampir tidak pernah menghiraukan masalah agama. Meskipun NICA mengetahui bahwa tokoh - tokoh pejuang adalah kebanyakan dari golongan agama, tetapi agama sebagai dogma dan ritual tidak pernah dipersoalkan. Sehingga agama berkembang terus. Madrasah - madrasah dan pondok pesantren yang terkenal di Lombok terdapat di Pancor, Praya, Kediri dan Bengkel. Di pulau Sumbawa sekolah - sekolah agama dikembangkan dan dibina oleh Badan Syar'iah dan organisasi Muhammadiyah, Al - Irsyad dan Ikatan Qaum Muslimin (IQAM) Bima.

Kelompok - kelompok pengajian orang - orang tua yang diselenggarakan oleh pemimpin agama (Tuan Guru) di desa - desa mulai berkembang kembali. Dakwah agama Islam hidup kembali dan tempat - tempat ibadah mulai dikenal.

Sementara itu upacara - upacara adat yang berhubungan dengan kepercayaan berkembang pula. Tempat - tempat pemujaan (Pedewaan dan Kemali') ramai oleh orang - orang Islam Waktu Telu yang menyelenggarakan pemujaan. Melalui dewa dan roh leluhur mereka meminta sesuatu hajad. Penganut Islam Waktu Telu terpencar di berbagai desa di pulau Lombok. Mereka selalu mempertahankan tradisi nenek moyang dan menyerahkan segala urusan ibadah kepada Kiyai mereka. Di samping mereka percaya kepada Allah dan Muhammad pesuruhNya, juga mereka masih percaya kepada kekuatan ghaib, roh dan beberapa jenis makhluk supernatural.

Mereka sangat fanatik memegang tradisi dan kurang menyukai perubahan atau pembaharuan. Setelah kemerdekaan mereka menjadi sasaran dakwah yang dilancarkan oleh para ulama. Di antaranya terkenal nama - nama : Tuan Guru Haji Haris, Tuan Guru Haji Zainuddin, Tuan Guru Haji Muhammad Hafidz, Tuan Guru Haji Faesal, Tuan Guru Haji Umar, Tuan Guru Haji Fadil, Tuan Guru Haji Ibrahim, Tuan Guru Haji M. Saleh Hambali dan Datu Guru atau Raden Haji Muhammad Hukum. Hasilnya tidak sedikit di antara mereka yang mengaku taubat dan melaksanakan syareat agama Islam dengan taat. Akibat perkembangan pendidikan umum dan pendidikan agama, kedudukan agama Islam Waktu Telu semakin terjepit. Ia terancam dari luar dan dari dalam. Dari luar oleh dha'i - dha'i yang gigih, dari dalam oleh penganut - penganut muda yang bersekolah di kota dan tinggal menumpang di keluarga - keluarga penganut Islam Waktu Lima. Pada umumnya mereka menjadi pemeluk Islam Waktu Lima yang taat dan sekembalinya ke desanya mereka menjadi pelopor - pelopor penyempurnaan agama Islam Waktu Telu ke dalam Islam Waktu Lima.

Di samping mereka yang secara ikhlas menyempurnakan agama mereka, ada pula yang menolak dan menentang penyempurnaan yang demikian itu. Dengan dipimpin oleh Kepala-kepala adat dan Kiyai/Guru mereka bertahan dalam kepercayaannya. Sesungguhnya yang mereka segani terhadap perubahan itu bukanlah penyempurnaan agama itu sendiri tetapi akibat dari penyempurnaan itu. Menyempurnakan agama berarti berubahnya adat istiadat pula. Masyarakat yang tadinya bersifat kharismatis dan tradisional aristokratis, akan berubah menjadi masyarakat yang demokratis. Ini berarti suatu kerugian bagi golongan pemimpin adat dan pemimpin - pemimpin agama (Kiyai/Guru dan Pemangku) yang selama ini mempunyai hak prioritas dan hak istimewa dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka akan kehilangan pengaruh dan akan kehilangan sebagian dari nilai materi yang diperolehnya dari masyarakat. Tokoh - tokoh Waktu Telu pada masa itu antara lain : Mamiq Ocet Salim, Mamiq Murthi, Kiyai Minggim, Datu Puterawati, Raden Sigeti, Amaq Jumadi dan lain - lain.

Pemeluk animis dan budha-budhi juga tidak luput dari sasaran dakwah. Atas jasa Lalu Darwisah, Kepala Pemerintahan Setempat Lombok Barat yang didukung oleh guru - guru agama pemeluk animis di Tawun dan Pengantap berhasil diislamkan. Di daerah-daerah tersebut segera dibangun rumah - rumah ibadat sebagai pusat pengajian dan berbagai aktivitas ibadah lainnya. Tempat pemujaan lama seperti Kemali' dan Pedewaan ditutup. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama dilarang.

Di daerah Bima antara ulama Islam dan Zending bergiat mengembangkan agama di kalangan penduduk Donggo yang masih memeluk agama berhala (Fethisme). Kegiatan ini sesungguhnya sudah mulai sejak sebelum Perang Dunia II. Setelah perang pecah aktivitas itu terhenti sementara. Dalam beberapa tahun sejak selesainya Perang Dunia II penyembah-penyembah berhala di daerah Donggo hampir seluruhnya telah memeluk agama Nasrani terdapat di desa Mbawi dan sedikit di desa Rora.

Sejak itu orang - orang Donggo tidak lagi dapat mempertahankan diri dari isolemennya. Akibat komunikasi yang semakin lancar dengan dunia luar dan adanya kompetisi yang sehat dari dua agama besar mempercepat rakyat Donggo menjadi pemeluk - pemeluk agama yang taat. Antara kedua pemeluk agama di atas terdapat kerukunan yang ditunjang oleh kesatuan budaya dan wilayah leluhur yang sama.

CATATAN

1. Sunda Kecil, Kementrian Penerangan, Jakarta, 1953, halaman 44.
2. Wawancara dengan Mamiq Ripaah, tanggal 18 Oktober 1979.
3. Sunda Kecil, *op.cit.* halaman 138.
4. Drs. C.S.T.Kansil S.H., dkk, *op.cit.* halaman 138
5. Propinsi Sulawesi, Kementarian Penerangan, Jakarta, 1953, halaman 75 - 76.
6. *I b i d*, halaman 123.
7. *I b i d*, halaman 124.
8. Panitia Hari Pahlawan ke XXXIII Daerah Tingkat II Bima, *op.cit.* halaman 57.
9. Propinsi Sulawesi, *op.cit.* halaman 131.
10. Team Penyusunan Monografi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Monografi Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jilid II, Mataram, tahun 1975, halaman 866.
11. Wawancara dengan Bernadus, tanggal 20 September 1979.
12. H.M.Thayeb Abdullah, Detik Nadi Perjuangan Kemerdekaan RI di Bima dan Dompu.

BAB V

KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)

Kestabilan Pemerintah Belanda yang sudah dibinanya melalui pejabat - pejabat bumiputera memberikan kesempatan bagi Belanda untuk memusatkan perhatian dan kekuatannya bagi pengurangan Republik Indonesia. Pertentangan politik yang terjadi di tubuh RI antara golongan yang pro dan yang anti persetujuan Renville, rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang dan Pembentukan Negara Indonesia Serikat, yang mencapai puncaknya dengan Pemberontakan PKI di Madiun (1948), telah memberikan optimisme bagi Belanda dalam mencapai tujuannya.

Hanya alasan penyerbuan ke wilayah RI masih perlu dibangun dan dimatangkan. Dan karena telah didahului oleh iktikad yang kurang baik maka segala usaha perundingan yang diadakan antara Belanda dan RI dibawah pengawasan KTN selalu gagal karena perbedaan prinsip. Dalam perundingan Belanda mengemukakan hal - hal yang tidak mungkin dapat diterima oleh RI.

Masalah pokoknya adalah : 1)

1. Perbedaan penafsiran mengenai garis van Mook sebagai garis demarkasi antara daerah - daerah yang termasuk daerah Republik dengan daerah - daerah yang diduduki Belanda.
2. Pembentukan Pemerintah interim Negara Indonesia Serikat.

Meskipun RI selalu berusaha mengalah dan KTN berusaha sekeras - kerasnya bagi penyesuaian prinsip namun selalu mencapai jalan buntu. Belanda merobek - robek Persetujuan Renville dan menyerbu Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Presiden dan Wakil Presiden RI beserta beberapa pembesar lainnya ditawan.

Tindakan Agresi Belanda ke II itu menimbulkan reaksi dan protes di seluruh Indonesia bahkan dunia. Di dalam negeri Kabinet Pasundan dan Kabinet N I T di bawah pimpinan Mr.A.A.Gde Agung meletakkan jabatannya sebagai protes. 2) Negara - negara Asia dan PBB mengadakan tindakan, menyerukan agar diadakan gencatan senjata dan agar Belanda mengakui kedaulatan Negara Indonesia Serikat. Tindakan Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur dan reaksi dunia di atas sangat mengejutkan Pemerintah Belanda.

Perhitungan Belanda akan mendapat dukungan luas ternyata meleset. Pemerintah Belanda sadar bahwa segala kekuatan dan ketenangan politik yang diciptakannya melalui kepalsuan dan kekerasan hanyalah semu belaka.

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB.

Berita penyerbuan Belanda terhadap RI sangat melukai perasaan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tindakan protes yang dilancarkan oleh Kabinet A.A.Gde Agung disambut dengan perasaan lega dan mendorong masyarakat melalui wakil - wakilnya yang duduk di Parlemen NIT semakin berani dan terbuka. Duduk dalam Parlemen NIT dari NTB waktu itu Lalu Srinata, Lalu Mahnep, R.N.Nuraksa, A.D.Talu, Sultan M. Kaharuddin, Lalu Hasan Mustami, Lalu Abdurrahman dan I Gusti Bagus Oka.

Bersama - sama rekan - rekan seperjuangan dari Indonesia Timur mereka semakin berani menyuarakan persatuan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Melihat ini Belanda pun semakin longgar dan memberikan hak otonomi seluas-luasnya bagi daerah-daerah di Negara Indonesia Timur.

Anggota Dewan Swapraja dan Dewan Pulau Sumbawa yang diangkat dan ditunjuk oleh Pemerintah pada tanggal 1 Januari 1949 diberhentikan diganti oleh anggota Dewan hasil pilihan rakyat secara bertingkat.

Seperti di pulau Sumbawa di pulau Lombok pun demikian pula. Di antara anggota Dewan Pulau hasil pilihan rakyat ini banyak pula yang berjiwa republikan. Sehingga baik di DPR Pulau maupun di dalam Parlemen NIT suara anggotanya semakin seirama. Mereka secara terang - terangan menuntut Negara Indonesia yang berdaulat penuh. Antara daerah dan NIT pengaruh mempengaruhi. Perjuangan DPR Pulau pun semakin berani membawa aspirasi rakyat yang sebenarnya. Karena ini jugalah yang mendorong Pemerintah Belanda semakin cepat menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Pemerintah Daerah Pulau. Pada tanggal 26 Maret 1949 di pulau Sumbawa kekuasaan Asisten Residen diserahkan kepada Dewan Raja - raja dan kekuasaan Asisten Residen di pulau Lombok diserahkan kepada Lalu Durahman, Kepala Daerah Lombok. Sejak itu di tiap pulau hanya tinggal seorang pejabat Belanda sebagai Sekretaris Daerah.

Situasi yang demikian itu memberi arah dan warna kepada pendirian wakil - wakil NIT yang duduk di dalam BFO (Bije-

komst voor Federaal Overleg) sewaktu menghadiri Konperensi Inter Indonesia yang diselenggarakan tanggal 19 Juli 1949 di Yogyakarta dan diakhiri 2 Agustus 1949. Hal itu terlihat pada keputusan yang dihasilkan oleh konperensi itu : 4)

1. Bendera Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah Sang Merah Putih.
2. Bahasa resmi RIS ialah Bahasa Indonesia.
3. Lagu Kebangsaan RIS ialah lagu Indonesia Raya.

Seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat yang mencintai kemerdekaan menyambut hasil konperensi itu dengan perasaan gembira. Mereka semakin giat menyalurkan aspirasi mereka bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui para pemimpin mereka yang duduk di DPR maupun pemerintah.

B. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN

1. Sosial Ekonomi, Kebudayaan dan Agama/Kepercayaan.

Keadaan yang aman dan terselurnya aspirasi rakyat melalui badan eksekutif maupun legislatif menambah kegairahan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Perdagangan berjalan semakin maju dan ramai. Berbagai hasil pertanian (beras, palawija) dan hasil peternakan diekspor ke luar daerah dan luar negeri (Singapura dan Hongkong). Lalu lintas dan komunikasi yang lancar memudahkan usaha impor dan ekspor. Dari Luar Negeri diimpor barang - barang kelontong dan berbagai jenis barang hasil industri yang membanjiri pasar. Perdagangan sedikit demi sedikit pindah dari tangan pengusaha Belanda ke dalam tangan orang - orang Cina, Arab dan India. Perusahaan Belanda seperti, Jacobson van den Berg, Geo Wehry dan Reiss & Co melepaskan hak monopolinya atas impor dan ekspor.

Pergeseran ekonomi dan kekuasaan pemerintah yang demikian itu menimbulkan mobilitas vertikal dan horizontal. Golongan-golongan yang pada masa sebelumnya dalam sistem pemerintahan Jepang dan Nica memiliki status sosial yang rendah, karena adanya pergeseran kekuasaan tiba - tiba muncul memegang posisi penting. Sebaliknya sebagian dari golongan kooperator turun atau tidak mendapat kedudukan, tergeser ke luar menjadi penonton biasa. Hanya bentuk perubahan ini tidak merata bagi semua daerah. Di pulau Sumbawa secara keseluruhan status bangsawan merosot dan dilampaui oleh golongan intelektual, 5) tetapi di pu-

lau Lombok status bangsawan masih tetap dapat dipertahankan, karena kebetulan juga hampir sebagian besar kaum intelektual berasal dari antara mereka.

Mereka masih sempat mendapatkan hak prioritas dalam setiap jabatan desa. Tetapi yang menyolok sesudah kemerdekaan golongan rakyat biasa mulai mengejar ketinggalannya dengan terbukanya kesempatan lebar untuk memperoleh pendidikan bagi anak - anak mereka.

Kaum wanita pun mulai naik statusnya. Walaupun mereka belum memegang kedudukan penting, tetapi di antaranya sudah ada yang menjadi pegawai di kantor. Dalam setiap kegiatan sosial mereka selalu diikutsertakan.

Karena majunya perdagangan di masyarakat timbul golongan pedagang kecil dan tengkulak yang menjadi perantara prosedur dengan pedagang besar di kota - kota. Berbagai kebutuhan masyarakat menimbulkan golongan baru pula seperti tukang dan buruh yang menjual jasanya bagi kepentingan masyarakat yang memerlukan.

Mereka datang dari desa dan menetap di kota yang menimbulkan mobilitas horizontal. Nasib mereka di kota tidak semuanya baik, yang menimbulkan masalah sosial. Penduduk kota semakin padat dan di antaranya ada yang menjadi pengemis dan gelandangan dengan gubuk - gubuk liar atau tidur di emper toko.

Meningkatnya kesehatan masyarakat juga telah menimbulkan masalah kepadatan penduduk. Tanah pertanian semakin sempit. Hasilnya tidak cukup untuk makanan setahun. Akibatnya keamanan di desa terancam. Yang putus asa meninggalkan desa dan mereka berkumpul di kota Mataram, Ampenan dan Cakranegara menjadi gelandangan dan pengemis.

Untuk mengurangi kepadatan penduduk Pemerintah Daerah di Lombok membuka daerah transmigrasi di Kesambik Jengker (Lombok Utara). Tetapi di samping itu untuk mengisi berbagai jabatan pemerintahan didatangkan pula pegawai dari luar daerah.

Seirama dengan kehidupan ekonomi dan keamanan yang semakin mantap kehidupan kebudayaan tumbuh dan bergairah kembali. Tidak ada upacara yang tidak disertai dengan kesenian, sekurang - kurangnya seni tembang. Antara adat dan kesenian dukung mendukung dan hidup secara harmonis. Hanya perkembangannya sangat statis tradisional, baik jenisnya maupun versinya.

Kesadaran masyarakat terhadap arti pendidikan juga semakin tinggi.

Setiap tahun banyak anak usia sekolah yang tidak tertampung di SD. Demikian pula lulusan sekolah rendah 6 tahun hanya sebagian kecil saja yang dapat ditampung di sekolah lanjutan. Di pulau Lombok dan pulau Sumbawa hanya terdapat sebuah SMP 4 tahun dan dua buah SGB 4 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan guru, pemerintah terpaksa membuka Kursus Guru KPKPKB di tiap - tiap ibu kota Daerah Bagian. Dibandingkan dengan zaman sebelumnya pendidikan bertambah maju. Fasilitas pendidikan pun memadai. Di sekolah lanjutan pertama murid - murid dibagikan alat-alat tulis secara gratis.

Bagi anak - anak yang mampu setamatnya dari SD pergi melanjutkan pelajaran ke Jawa atau ke Makasar dan Kupang. Demikian juga anak - anak lulusan SMP melanjutkannya ke luar daerah. Bagi mereka yang tidak melanjutkan dapat diterima menjadi pegawai di kantor - kantor. Hanya waktu itu persentase lulusan sangat kecil. 6)

Di bidang agama/kepercayaan, menjelang akhir revolusi menampakkan kemajuan pula. Madrasah Ibtidaiyah dan Pondok Pesantren berkembang dengan pesat. Pusat Pondok Pesantren yang terkenal Pancor, Praya, Kediri dan Bengkel. Di pulau Sumbawa pendidikan agama diselenggarakan oleh Badan/Majelis Syar'iyah. Dakwah pun semakin pesat. Hampir di tiap desa berkembang pengajian rutin bagi orang tua yang dipimpin oleh Tuan Guru mereka. 7)

Tetapi di satu pihak Islam Waktu Telu di Lombok yang merasa terancam oleh kepesatan agama Islam Waktu Lima mencoba bertahan dengan berbagai dalih yang menimbulkan kemarahan para pemuka Islam Waktu Lima. Maka tidak jarang pemerintah turun tangan apabila pertentangan antara kedua golongan sudah memuncak sampai mengancam ketentraman masyarakat. Kedudukan golongan Islam Waktu Lima sangat kuat, di samping jumlah mereka yang banyak juga hampir semua jabatan pemerintah dari atas sampai ke desa - desa di tangan orang - orang Islam Waktu Lima.

Kedudukan golongan Islam Waktu Telu semakin terjepit. Di tempat - tempat di mana penguasa desanya bersikap fanatik seperti di Kuripan (Lombok Barat) golongan Waktu Lima diberi perlindungan untuk menyisihkan dan melarang memakai kuburan yang sama. Padahal kuburan tersebut adalah milik bersama sejak leluhur mereka. Di Kedistrikan Jonggat, Kepala Distriknya Raden Haji Moh. Hukum mengumpulkan semua Kiyai Waktu Telu di wilayahnya dan memaksa mereka agar menjalankan syareat agama Islam secara benar sesuai dengan hadist dan Qur'an. Mereka di-

perintahkan berpuasa dan menikahkan seseorang sesuai dengan syariat agama Islam. Karena tetap bertahan, terjadilah kekerasan yang menimbulkan protes dari penganut - penganut mereka yang setia. Tindakan mereka dianggap melawan pemerintah. Mereka ditangkap dan dipenjarakan beberapa minggu lamanya. Penganut Islam Waktu Telu pada umumnya adalah orang - orang yang belum benar - benar memahami seluk - beluk agama. Seluruh urusan ibadah diserahkan sepenuhnya kepada Kiyai mereka. Penganut Islam Waktu Telu yang bukan keturunan Kiyai dilarang belajar mengaji dan sembahyang. 8)

Penganut Islam Waktu Telu ini tersebar hampir di seluruh pulau Lombok. Yang terbanyak dan terkuat terdapat di Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Pringgabaya, Kedistrikan Narmada, Kedistrikan Gerung, Kedistrikan Jonggat, Kedistrikan Masbagik. Dari segi pelaksanaan ibadah, mereka dibagi atas tiga golongan, masing - masing kelompok Tanjung Bayan, Kelompok Pujut dan Kelompok Rembitan.

2. Kepartaian.

Kehidupan partai yang sudah mulai bersemi di zaman Hindia Belanda layu dan terkulai di zaman Jepang. Bibit - bibit dari beberapa partai itu sudah timbul sebelum penjajahan Jepang, akan tetapi terpaksa tidak menampakkan diri dalam zaman pemerintahan Jepang di Indonesia.

Baik Jepang maupun Belanda bertindak keras terhadap komunis dan partai - partai politik yang menghendaki kemerdekaan sesempurna - sempurnanya. 9) Pagi - pagi Jepang sudah mengeluarkan larangan rapat - rapat dan kegiatan - kegiatan politik. Barulah setelah Proklamasi Kemerdekaan, antara tahun 1945 (kejatuhan Jepang) dan pendaratan Nica (Januari 1946) timbul kembali organisasi yang bersifat sosial/politik. Lebih - lebih setelah keluarganya Maklumat No. X pada bulan Nopember 1945 bibit-bibit partai itu bersemi kembali. Di antaranya yang bersifat lokal seperti PUIL (Persatuan Ulama Islam Lombok) yang didirikan oleh Saleh Sungkar dan Persatuan Umat Hindu yang didirikan oleh Suwela dan I Gusti Made Kanta di pulau Lombok. Kedua organisasi politik ini bubar sejak pendaratan Nica di pulau Lombok pada tahun 1946.

Di Bima atas inisiatif tokoh - tokoh pendidikan di bawah pimpinan Sujito, Pemimpin Pengajaran Bima, dalam rapatnya tanggal 15 Desember 1945 yang dihadiri oleh $\pm$ 59 orang guru - guru berhasil membentuk Sarekat Guru Republik Indonesia (SGRI) Bima.

Pengurusnya terdiri dari Ketua : Dollah Ahmad, Ketua II : R. Lan-tip, Penulis : P. Sukarno, Bendahara : Yusuf, Pembantu I, II, III, masing - masing : Jafar, M. Thayeb dan Idris. SGRI Bima bertujuan untuk menegakkan Indonesia Merdeka.

Di samping itu didirikan pula Persatuan Tani Indonesia. Di Sumbawa Besar berdiri Persatuan Pegawai Sumbawa (PPS) di bawah pimpinan Lalu Mala. Setelah KNI Daerah Sumbawa terbentuk PPS dibubarkan. Sedangkan SGRI dan Persatuan Tani Indonesia di daerah Bima lumpuh kembali sejak pendaratan Nica 19 Januari 1946.

Sementara kegiatan politik terhenti sampai berdirinya Ikatan Qaum Muslimin (IQAM) Bima pada tahun 1948. Partai politik ini bersifat lokal yang didirikan oleh M. Saleh Bakry, H. Usman Abidin dan M. Idris Jafar. Partai ini berhaluan kompromis namun tetap berpegang prinsip tercapainya Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Partai ini semakin kuat setelah M. Thayeb Abdullah dan kawan - kawannya kembali dari Kupang dan membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). API mengorganisasi kegiatan pemuda dan melancarkan demonstrasi - demonstrasi yang menghasilkan resolusi - resolusi anti NTT. Usahanya yang lain mendirikan majallah Progresip Surya. Pemimpin Redaksinya M. Thayeb Abdullah sendiri yang dibantu oleh Dollah Ahmad dan Amin Zainal. Karena situasi politik yang semakin hangat Progresip Surya hanya sempat terbit dua nomor setelah itu tidak terbit lagi.

3. Bidang Pers.

Jumlah prosentase buta huruf yang besar tidak mendorong dan mendukung perkembangan pers di pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Atas inisiatip Pemerintah Daerah di Lombok pada tahun 1947 telah diusahakan surat kabar Suara Rinjani memuat tentang pemerintahan dan segala kebijaksanaannya sesuai dengan sifatnya yang kooperatif suaranya meneur dan mencela tindakan para pejuang yang republikan. Penyebarannya sekitar pulau Lombok terbatas pada pejabat - pejabat tertentu saja. Bagi mereka yang dapat tulis baca minat bacanya sangat kurang. Keadaan yang sama meliputi pulau Sumbawa juga. Di daerah Bima juga ada usaha menerbitkan Majallah Progresip Surya, tetapi ini pun kurang mendapat sambutan masyarakat. Dan mati sampai penerbitan yang kedua. Majallah Progresip Surya menyelenggarakan pembangunan politik, ekonomi, sosial, pengetahuan dan kebudayaan. Terbitnya tersendat - sendat. No. 1 Agustus 1949. No. 2 Nopember 1949. Setelah itu tidak terbit lagi. Majallah tersebut diusahakan oleh

para pemuda bekas pejuang di Tente - Bima.

Pimpinan Redaksi	
Pimpinan Umum	: M. Thayib Abdullah.
Wakil Pimpinan Umum	: Amin Zainal.
Sekretaris Redaksi	: M. Nurdin Yasin.
Tata Usaha	: Abdullah Amin.
Alamat / T.U.	: Lapangan Hijau, Tente - Bima.
Badan Penerbit Pancasila.	
Pengurusnya terdiri dari	:
Ketua	: M. Thayib Abdullah.
Wakil Ketua	: M. Nurdin Yasin.
Penulis	: Amin Zainal.
Bendaharawan	: Ahmad Usman.
Pembantu	: H. A. Wahab.
	H. A. Rahim Afandi.
	Abdullah Amin.

Selain yang diusahakan oleh Pemerintah Pulau Lombok untuk menyalurkan aspirasi rakyat atas inisiatip beberapa tokoh masyarakat pada tahun 1945 menerbitkan Majalah Rinjani dalam bentuk stensilan. Pimpinan redaksinya dipegang oleh T.K.Tibuludji. Majallah ini dibagi - bagikan secara gratis kepada pemuka - pemuka masyarakat. Karena di sudut bawah majallah itu selalu terdapat tulisan yang berbunyi "Maha Radika" telah menimbulkan kecurigaan pemerintah. Pemerintah menafsirkan Maha Radika berarti merdeka yang sangat membahayakan kestabilan keamanan. Majallah Rinjani hanya sempat hidup setahun kemudian ditutup oleh Pemerintah. 10)

Setahun kemudian sejak majalah Rinjani ditutup, timbul lagi majalah mingguan Lombok Baru. Majalah ini berhaluan nasionalis Pimpinan redaksinya, masing - masing Ketua I : J.A.Lesikh, Ketua II : Anwar Beck. Wartawannya antara lain : Eroplan. Yang berlangsung : guru, pemuka masyarakat dan pegawai negeri dengan uang langganan tiap bulan f 0,05 (lima sen). Majalah ini dapat bertahan sampai tahun 1949. Di samping itu pemerintah telah mengizinkan masuk brosur - brosur atau majalah yang pro Nica semacam Mas Slamet dan sebagainya yang diberikan secara gratis pada kantor - kantor dan sekolah - sekolah. Ada pula masuk ke pulau Lombok dan pulau Sumbawa majalah Merdeka dan koran Siasat dan Shim Po. Majalah Panji Masyarakat dan majalah Pustaka juga masuk di Lombok. Yang berlangganan orang - orang tertentu.

Jumlahnya tidak seberapa terbatas kepada orang - orang tertentu. 11)

4. Bidang Kepemudaan.

Penghancuran inisiatif secara total yang diikuti oleh kebijaksanaan Belanda mempengaruhi dan menguasai tokoh - tokoh tua sungguh - sungguh membuat para pemuda tidak dapat bangkit dari kehancurannya. Sifat masyarakat yang kharismatis ditumbuhkan. Hubungan dengan dunia luar terutama RI ditutup serapat-rapatnya. Langkanya koran sebagai alat komunikasi menyebabkan pemuda - pemuda putus hubungan.

Setiap aktivitas para pemuda bekas pejuang selalu diawasi dengan seksama dari tingkat daerah sampai tingkat desa. Pemimpin - pemimpin pemerintahan seluruhnya adalah tokoh - tokoh tua yang feodalistis. Suara pemuda kurang dihiraukan. Namun demikian gerakan di bawah tanah selalu ada yang menjalin kerjasama dengan teman - temannya yang memilih jalan kooperator.

Di daerah Bima bekas - bekas pejuang sekeluarganya dari penjara pada tahun 1947 ada yang memilih jalan kooperator dan non kooperator. Mereka yang non kooperator meneruskan perjuangan di bawah tanah.

Mereka membentuk perkumpulan - perkumpulan sosial yang berjiwa politik. Di Raba dr. Sajiman mendirikan perkumpulan "Sepak Bola Gembira". Sambil berlatih anggota - anggotanya digembleng mental ideologis untuk meneruskan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Di Tente M. Saleh Bakry, M. Thayib Abdullah, M. Nur Husein dan Abdullah Amin mendirikan perkumpulan "Usaha Kayu Api" (UKA) yang bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan dan kebudayaan. Kata API yang diselipkan dalam nama perkumpulan ini, dimaksudkan untuk mengkonsolidasi perjuangan API lebih lanjut untuk merongrong pemerintahan Nica. Maksud perkumpulan ini tercium oleh pemerintah dan API dibubarkan. 12)

Beberapa di antara anggotanya M. Thayib Abdullah, M. Nur Husein, Ilyas dan Yaman Ibrahim merantau ke Kupang dan di sana mereka membentuk API tetapi kemudian dilarang oleh pemerintah Ilyas ditangkap dan ditahan atas tuduhan menghasut pemuda Kupang hendak berontak kepada Belanda. Sementara itu M. Saleh Bakry, H. Usman Abidin dan M. Idris Jafar mendirikan partai politik IKAM (Ikatan Kaum Muslimin). 13) IKAM memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia, menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan Negara RI serta menentang dan menolak

pengotakan daerah Nusantara dalam negara - negara bagian.

Menjelang berlangsungnya KMB di Den Haag, IKAM mengirim kawat kepada Ketua Delegasi RI agar tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI. Sekembalinya dari Kupang M. Thayib Abdul lah bergabung dengan IKAN dan membentuk Angkatan Pemuda Ikam (API). Organisasi ini melancarkan kegiatan demonstrasi-demonstrasi dan rapat - rapat umum yang menghasilkan resolusi-resolusi anti NTT.

Guru - guru dihimpun dalam suatu organisasi "Persatuan Guru Bima". Ketika Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 20 s/d 25 Desember 1949 IKAM Bima mengirim utusan yang terdiri dari enam orang, masing-masing H. Usman Abidin (Ketua Partai), M. Idris Jafar (Wakil Ketua), M. Saleh Bakry (Sekretaris), H. A. Rahman Idris (Penasehat), M. Thayib Abdullah (Ketua Pemuda) dan Putera Abdulkahir (Peninjau). Pada kesempatan itu M. Thayib Abdullah menyampaikan laporan kepada Pemerintah RI tentang usaha dan kegiatan kaum republik di Bima melalui GRISK (Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil) dengan perantaraan I.G.Raka.

5. Bidang Kewanitaan.

Kebijaksanaan Pemerintah Jepang di bidang kewanitaan telah menghambat pertumbuhan organisasi wanita dari pada mestinya. Berbagai macam organisasi kewanitaan lokal yang ada dihim-pun dalam satu organisasi wanita yang disebut Fujinkai. Karena sifatnya yang serba terpimpin, aktivitas Fujinkai terbatas hanya sekedar mengurus dapur umum dan pertemuan - pertemuan yang jarang sekali diadakan. Fujinkai di Lombok merupakan peleburan dari beberapa buah organisasi wanita yang bersifat lokal seperti Persatuan Isteri Lombok (PIL), Rukun Agawe Santoso (RAS) dan Kaum Wanita Sadar (KWS). Kebanyakan anggotanya adalah isteri pegawai dan guru - guru wanita. Di antaranya Salaham A, Salamah B, NY. Sukoco, Ny. Purnomo, Ny. Taher, Ny. Purwadi, B. Ridwah, B. Misbah, Rumesah dan lain - lain. 14)

Setelah merdeka pada tahun 1945 dibentuk PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Tetapi sejak pendaratan Nica sampai penyerahan kedaulatan PERWARI tidak aktif lagi. Namun demikian dalam masa penahanan para pejuang di Bima, beberapa orang isteri pejuang di bawah pimpinan St. Hawa mengadakan demonstrasi bagi pembebasan suami mereka dan menyelenggarakan dapur umum bagi para tawanan. Mereka kebanyakan berasal dari anggota Aisyiah dan simpatisan Muhammadiyah.

C. PELAKSANAAN HASIL KMB DI DAERAH.

Antara harap dan cemas masyarakat dan tokoh - tokoh Pemerintah Daerah menunggu - nunggu hasil Konperensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus s/d 2 September 1949. Tokoh - tokoh daerah yang berasal dari bekas pejuang mengharap KMB sukses sesuai dengan tujuan Konperensi yang akan dapat menyelesaikan persengketaan antara Indonesia secepat - lekasnya dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat. Sedangkan tokoh - tokoh yang berjiwa kompromis dan kooperatif selalu cemas akan kehilangan hak dan kedudukan dan mengharap - harap agar KMB gagal.

Tetapi kemudian setelah pokok - pokok hasil KMB diumumkan dan diratifikasi oleh Dewan - Dewan Perwakilan Negara/Daerah Bagian BFO semua pihak merasa puas. Pokok - pokok persetujuan KMB itu meliputi penyerahan dan waktu penyerahan kedaulatan, penangguhan penyerahan Irian Barat, pembentukan Uni Indonesia - Nederland, penarikan kapal - kapal perang Belanda kecuali beberapa korvet yang akan diserahkan kepada RIS, penarikan mundur KL dari Indonesia dan melebur KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang berintikan TNI. 15)

Penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 diikuti secara seksama oleh seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintah daerah. Pelaksanaan persetujuan KMB di daerah Lombok dan Sumbawa berjalan dengan lancar tanpa halangan. Kelancaran ini disebabkan karena praktis sejak penyerahan kekuasaan Asisten Residen kepada tiap - tiap Kepala Daerah Pulau pada awal tahun 1949, kekuasaan Belanda di pulau Lombok dan pulau Sumbawa sudah tidak ada lagi. KL dan KNIL sejak beberapa bulan sebelum KMB sudah ditarik dari pulau Lombok dan pulau Sumbawa. 16)

PENUTUP

Dengan mencoba menyusun tahap - tahap Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia (Revolusi Fisik 1945 - 1949) Daerah Nusa Tenggara Barat secara khronologis, maka kami berusaha untuk mendapat suatu gambaran tentang garis besar Sejarah Revolusi Fisik 1945 - 1949 di Daerah Nusa Tenggara Barat. Garis besar itu kira - kira berjalan sebagai berikut :

A. KEADAAN DI NUSA TENGGARA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945).

Antara penyerahan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dengan pendaratan Jepang di Nusa Tenggara terdapat perbedaan waktu (8 Maret 1942 - Mei 1942 di Lombok, 8 Maret 1942 - 17 Juli 1942 di pulau Sumbawa) yang menimbulkan kevakuman kekuasaan pemerintahan. Untuk mengisi kevakuman pemerintah itu maka atas inisiatip pejabat pribumi di pulau Lombok dibentuk pemerintahan dengan Presiden Mamiq Wiranom dengan Kepala Sekretariatnya Lalu Srinata dan I Gusti Bagus Ngurah. Di tiap - tiap onderafdeeling memerintah seorang Kepala Pemerintah. Kekuasaan Pemerintah di pulau Sumbawa diambil alih oleh Sultan Moh. Kaharuddin di Sumbawa Barat dan Sultan M. Salahuddin di Sumbawa Timur dan Tengah.

Segera setelah pendaratan Jepang di Lombok pada bulan Mei 1942 dan di pulau Sumbawa pada bulan Juli 1942 pemerintahan sementara itu dihapus dan Pemerintah Balatentara Jepang menyusun tata pemerintahan baru yang struktur/organisasinya tidak jauh berbeda dengan struktur/organisasi pemerintahan di Zaman Hindia Belanda. Pulau Lombok dan pulau Sumbawa dimasukkan ke dalam wilayah Sunda Kecil syu sebagai penjelmaan dari penggabungan Keresidenan Bali - Lombok dan Keresidenan Timor dan daerah takluknya. Sunda Kecil syu masuk ke dalam wilayah kekuasaan Armada Selatan Kedua. Pulau Lombok dan pulau Sumbawa masing - masing merupakan **Ken**. Selanjutnya tiap - tiap **Ken** dibagi atas **Bun Ken**, **Gun** dan **Son**. Pulau Lombok dan pulau Sumbawa seluruhnya terbagi menjadi lima buah **Bun Ken**, masing-masing Lombok Barat **Bun Ken**, Lombok Tengah **Bun Ken**, Lombok Timur **Bun Ken**, Sumbawa **Bun Ken**, dan Bima **Bun Ken** (yang meliputi Bima dan Dompu). Dinas/Jawatan tingkat **Ken** dan **Bun Ken** pun dibentuk pula. Baik **Ken Kanrikan** dan **Bun Ken Kanrikan** maupun Kepala Dinas/Jawatan dijabat oleh pejabat bangsa Je-

pang. Sedangkan **gunco** dan **sonco** dijabat oleh pribumi. Khusus bagi daerah pulau Sumbawa, pemerintahan kesultanan Sumbawa dan kesultanan Bima - Dompu berjalan terus di samping pemerintahan Bun Ken Kanrikan.

Terpengaruh oleh situasi perang yang sedang berkecamuk keadaan sosial ekonomi di zaman Jepang sangat buruk. Kebijakan-kebijakan Jepang di bidang ekonomi merupakan kebijaksanaan "perampokan". Seluruh sektor ekonomi dikuasai dan diawasi dengan keras oleh Jepang. Dengan dalih untuk memenangkan Perang Asia Timur, Jepang mengumpulkan hasil pertanian, peternakan dan perikanan. Padi dan ternak rakyat dibeli dengan harga yang rendah. Sedangkan akibat pengaruh musim dan dikerahkan-nya rakyat bagi pembangunan pusat - pusat pertahanan Jepang produksi pertanian menurun. Jepang juga menjalankan monopoli atas usaha perkapasan, jarak dan rami.

Akibatnya kesehatan dan kesejahteraan rakyat sangat merosot. Rakyat kekurangan makanan dan pakaian. Distribusi makanan dan pakaian dilakukan dengan mempergunakan kupon yang diawasi dengan ketat. Penjualan beras antar desa tanpa izin dilarang. Karena blokade Amerika Serikat impor dan ekspor mundur. Perhubungan di darat maupun di laut lumpuh. Untuk pengangkutan darat orang mempergunakan dokar, cikir, auto arang, sepeda ban buntu dan kuda. Untuk pengangkutan pantai dipergunakan orang sampan bercadik dan perahu layar.

Di bidang sosial budaya menampakkan kemunduran pula. Untuk memudahkan pengawasan semua pendidikan tingkat Sekolah Dasar kecuali yang letaknya terpencil dijadikan Sekolah Rakyat 6 tahun. Akibatnya sekolah - sekolah kekurangan guru, sarana dan prasarana. Maka untuk memenuhi kebutuhan guru, Jepang membuka tiga buah Sekolah Guru 2 tahun dan sebuah Sekolah Guru 4 tahun untuk pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Di sekolah murid - murid digembleng fisik dan mentalnya. Mereka diisi dengan semangat Jepang dan menjauhkan rasa rendah diri. Mereka diajarkan bahasa Jepang, lagu - lagu Jepang dan diharuskan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang **Kimigayo** dan **Seikire** pada upacara bendera. Dengan kepala gundul mereka diharuskan belajar baris - berbaris dan **taiso**. Sekolah - sekolah swasta pun diharuskan sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan kurikulum sekolah negeri.

Seperti pendidikan, kebudayaan pun merosot. Aktivitas kesenian berkurang karena sarana dan fasilitas penunjang sulit di dapat. Juga karena rakyat selalu ketakutan berkumpul dan bera-

mai - ramai. Kedudukan kesenian tradisional didesak oleh sandi-wara yang dipergunakan sebagai alat propaganda Jepang.

Di bidang sosial terjadi perubahan nilai - nilai sosial yang ditimbulkan oleh adanya kontak dengan pengaruh luar. Pada waktu itu walaupun sedikit telah terjadi mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal yang ikut menimbulkan perubahan - perubahan nilai sosial di masyarakat.

Perang Dunia II dengan pemerintah Jepang yang kejam sebagai salah satu unsurnya telah pula mempengaruhi kehidupan keagamaan. Adanya larangan berserikat dan berkumpul menimbulkan keraguan dan ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengadakan ceramah - ceramah pengajian agama. Mata - mata Jepang berkeliaran di mana - mana. Masyarakat semakin menjadi takut karena zaman itu setiap orang mudah sekali terjerumus ke dalam fitnah. Syi'ar agama pudar sama sekali. Pengetahuan masyarakat tentang dunia luar pun semakin gelap. Hubungan komunikasi dengan dunia luar dapat dikatakan putus sama sekali. Radio -radio disegel. Koran - koran yang diperbolehkan hanyalah yang memihak pemerintah. Di antaranya **Bali Shimbun, Kan Po, Asia Raya** dan lain - lain.

Sementara itu pemerintah Jepang sangat giat melancarkan propaganda bagi memenangkan Perang Asia Timur Raya. Melalui Gerakan Tiga A (Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia) Jepang mencoba hendak menarik simpati dan partisipasi masyarakat sebesar - besarnya dengan mempergunakan kesenian sebagai media komunikasinya.

Perkumpulan - perkumpulan wanita lokal seperti PIL (Persatuan Isteri Lombok), RAS, KWS dan lain - lain dilebur dan dihim-punnya ke dalam **Fujinkai** (organisasi wanita): Aktivitasnya menyelenggarakan pertemuan - pertemuan dan dapur umum. Anggotanya terbatas pada wanita terpelajar dan isteri pegawai.

Para pemuda dihimpun dalam berbagai organisasi **Seinendan, Keibodan, Heiho**, Putera, Peta dan lain - lain. Tokoh - tokoh tua dihimpun di dalam **Ken Koku Dosi Kai**. Rakyat biasa dikerahkan mula - mula melalui Kepala Distrik, kemudian secara paksa untuk mensukseskan pembangunan pusat - pusat pertahanan Jepang yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Nusa Tenggara Barat. Di antara **romusya** ini banyak yang menjadi sakit oleh malaria dan kekurangan makanan.

B. KEADAAN DI NUSA TENGGARA BARAT SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN.

Berita Proklamasi terlambat diketahui di Nusa Tenggara Barat. Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh Jepang kepada pejabat-pejabat Indonesia sama sekali tidak menyadari apa sesungguhnya yang telah terjadi. Pemerintah hanya menjelaskan bahwa antara Jepang dan Sekutu sudah damai. Berita Proklamasi 17 Agustus 1945 pertama kali di Lombok diketahui dari berita yang dibawa oleh para tawanan politik yang tiba di Lombok dari Surabaya pada akhir Agustus 1945. Kemudian berita itu disusul pula dengan kedatangan pemuda - pemuda pelajar asal Bima yang sengaja diutus oleh Ketua KNI dan Gubernur Sunda Kecil ke pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Para pemimpin pun menyadari bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan Sunda Kecil telah menjadi sebuah propinsi dengan Gubernurnya Mr. I Ketut Puja yang diangkat oleh Presiden RI pada tanggal 22 September 1945.

KNI pun segera terbentuk di tiap - tiap daerah. KNI Daerah Lombok terbentuk pada tanggal 8 Oktober 1945, KNI Daerah Sumbawa pada awal Oktober 1945 dan KNI Daerah Bima terbentuk pada tanggal 18 Oktober 1945. Pembentukan KNI Daerah Bima didahului dengan terbentuknya Panitia Persiapan KNI Daerah Tente pada tanggal 24 September 1945 atas inisiatif para pemuda di bawah pimpinan M. Saleh Bakry dan M. Thayib Abdullah.

Dalam usaha KNI menegakkan kemerdekaan RI badan-badan perjuangan seperti BKR, API, TKR, Barisan Angkatan Muda dan lain - lain. Usaha yang paling mendesak mengibarkan Sang Merah Putih secara resmi yang disertai rapat umum. Demikianlah KNI di tiap - tiap daerah berhasil mengibarkan Bendera Kebangsaan secara resmi. Di Lombok tanggal 15 Oktober 1945 dan di Bima tanggal 31 Oktober 1945.

Kepada semua Kantor dan Sekolah diperintahkan agar mengibarkan bendera setiap hari kerja. Lencana Merah Putih harus tersemat pada setiap dada warga negara dan menyampaikan merdeka sebagai salam pertemuan.

Dengan suratnya tanggal 22 Nopember 1945 Sultan M. Salahuddin menyatakan Kerajaannya berdiri di dalam lingkungan Pemerintahan Republik Indonesia dan menyatakan Kerajaan Bima adalah daerah istimewa. Hal ini sesuai dengan kedudukan Kesultanan Sumbawa terhadap RI yang berdasarkan surat Gubernur Sunda Kecil tanggal 9 Oktober 1945 No. B 2/1/1 adalah daerah istimewa.

Demikianlah semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945 telah menjalar sampai ke pelosok - pelosok. Selama itu Jepang bersikap pasif. Dan hampir seluruhnya dikonsinyasi dengan berpusat di Lendang Marang untuk di Lombok dan Lape - Lopok untuk di pulau Sumbawa.

Tetapi kemudian setelah pada bulan Nopember 1945 tentara Sekutu di bawah pimpinan Blamey memberikan kekuasaan kepada balatentara Jepang untuk memelihara ketertiban dan keamanan, mereka pun bangkit kembali dan mengambil kekuasaan pemerintahan dari tangan bangsa Indonesia.

Kecuali kekuasaan pemerintahan di Lombok Timur dan Bima - Dompu, seluruh kekuasaan di Nusa Tenggara Barat dapat dikuasai kembali oleh Jepang. Antara kekuasaan RI yang tidak mau menyerah dengan kekuasaan Jepang timbul ketegangan - ketegangan yang membangkitkan kemarahan rakyat yang patriotik. Padi di tempat - tempat penimbunan padi dirampas oleh rakyat.

Sementara itu Sekutu terus menekan Jepang agar memelihara keamanan dan keselamatan semua rakyat seluruhnya. Sekutu tidak menghendaki adanya pemerintahan yang dipegang oleh bangsa Indonesia. Dengan alasan itu Jepang meminta kembali kekuasaan pemerintahan di tangannya. Ketika pada tanggal 27 Nopember 1945 Wakatsuki dan Jenderal Tanaka gagal meminta kekuasaan itu kepada Sultan Bima atas halangan KNI daerah Bima, maka pada 29 Nopember 1945 secara Sepihak Jepang memberlakukan lagi kekuasaan pemerintahan **Kaigun Minseibu** di Bima. Seruan Jepang itu tidak mendapat sambutan dari bekas - bekas pegawai Jepang.

Situasi pun semakin panas. Dalam perjalanan dari Sumbawa Besar putera Sultan Bima, Abdulkahir, Nazaruddin (wazir-) dan Amin Daeng Emo (Jeneli Dompu) ditahan oleh Jepang di Lopok. Mereka dipaksa menanda-tangani Surat Sumpah Setia kepada Jepang pada tanggal 4 Desember 1945. Sejak itu pimpinan perjuangan terpecah - pecah. Abdulkahir berbalik haluan, kebanyakan memihak Jepang.

Di Lombok para pejuang semakin memperkuat solidaritas antara berbagai badan perjuangan dan meningkatkan perjuangan. Rapat para pemimpin badan perjuangan yang diadakan pada tanggal 5 Desember 1945 di Dasan Tengah Lombok Tengah memutuskan bahwa dalam keadaan bagaimana dan apa pun akibatnya kekuasaan pemerintahan tidak akan diserahkan kepada Jepang. Karena ini Jepang menculik Mamiq Padelah, Kepala Pemerintah Lombok Timur tetapi kemudian dilepas kembali setelah salah se-

orang pemuka Jepang ditahan para pemuda.

Sikap Jepang pun semakin angkuh sehingga insiden - insiden dan bentrokan fisik tidak dapat dihindarkan lagi. Pos - pos Jepang mulai diganggu dan diserbu oleh para pejuang. Bentrokan - bentrokan itu diawali dengan peristiwa pertempuran antara Jepang dengan rakyat Sesela pada akhir Nopember 1945 yang menjatuhkan korban di pihak rakyat antara lain H. Abdulhadi dan kawan-kawan. Pada tanggal 11 Desember 1945 di bawah pimpinan Sayid Saleh, lebih kurang 85 orang pasukan BASMI menyerbu markas Jepang di Brangpanas, Lombok Timur. Pertempuran Wanasaba Lombok Timur 17 Desember 1945. Awal Januari 1946 markas Jepang di Labuhan Haji Lombok Timur diserbu pula.

Pos dan markas Jepang di pulau Sumbawa pun tidak luput dari serangan rakyat karena keangkuhannya yang dengan kekerasan telah berani menggeledah dan merampas senjata rakyat. Tanggal 29 Desember 1945 pos Jepang di Sape - Bima dikepung oleh rakyat yang dipimpin oleh Mustamin Abdurrahman. Kemudian baru ditinggalkan keesokan harinya setelah ada perintah dari Sultan Bima. Beberapa di antara rakyat yang melakukan pengepungan ditangkap atas perintah Sultan. Tanggal 4 Januari 1946 Sultan Bima memerintahkan agar Barisan Pemuda dan semua kelasykaran bubar.

Tindakan Jepang yang didukung oleh Sultan Bima sama sekali tidak menggetarkan rakyat. Malah para pejuang semakin menggiatkan usahanya. Pada tanggal 5 Januari 1946 terjadi serang menyerang antara pemuda Tente dengan Jepang. Di kota Bima para pemuda dan pelajar Sekolah Pertanian di bawah gurunya M. Jafar Amyn merampas senjata Jepang. Akibatnya Jepang semakin giat menggeledah dan mengumpulkan senjata rakyat. Tanggal 10 Januari 1946 pemimpin API M. Thayeb Abdullah, Ishaka Abdullah dan lain - lain ditangkap Jepang.

Demikianlah seluruh perlawanan rakyat dilumpuhkan oleh Jepang. Maka pada tanggal 31 Desember 1945 Nica mendarat di Kesultanan Sumbawa. Tanggal 12 Januari 1946 Nica mendarat di Bima, Sang Merah Putih diganti si Tiga Warna. Tanggal 14 Januari 1946 penangkapan dilancarkan atas para pejuang. Dalam beberapa hari saja hampir semua pemimpin perjuangan di daerah Bima, Dompu tertangkap. Sisanya yang berusaha melarikan diri ke Jawa, tertangkap di Teluk Sumbawa.

Di Lombok setelah kaki tangan Nica dan Jepang berhasil menghancurkan persatuan rakyat dengan menimbulkan insiden antara suku bangsa Sasak dengan suku bangsa Bali, Sekutu pun

mendarat di bawah pimpinan Pitter Kamm pada tanggal 18 Maret 1946. Pada tanggal 19 Maret 1946 semua pemimpin diundang menghadiri pertemuan di Mataram. Karena para pemimpin perjuangan tetap pada pendiriannya untuk tidak menyerahkan kekuasaan kepada Nica maka mereka pun ditangkap dan dipenjarakan.

Setelah penangkapan selesai, Nica pun mendarat di Lombok pada tanggal 27 Maret 1946 melalui Labuhan Lembar. Sejak kekuasaan Nica rakyat dilarang mengibarkan bendera Merah Putih dan dilarang memakai lencana Merah putih. Semua senjata harus diserahkan kepada Nica.

Seluruh kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Nica. Namun pejabat - pejabat Indonesia yang setia tetap memegang jabatannya. Asisten Residen dan Kontrolur kedudukannya sebagai penasihat. Sementara itu tentara Nica terus menerus mengadakan pembersihan terhadap kaum pejuang yang dicapnya sebagai teroris dan ekstremis. Untuk mengacaukan pemerintahan Nica di Lombok timbul gerakan di bawah tanah yang menamakan dirinya Kucing Hitam, Banteng Hitam dan lain-lain. Seluruh sisa kekuatan yang setia pada tanggal 11 Mei 1946 dihimpun ke dalam Badan Perjuangan Rakyat Indonesia (BPRI) yang dipimpin oleh Mamiq Muhammad dan kawan - kawan. Mereka giat mengadakan propaganda menggelorakan kembali semangat perjuangan rakyat.

Pada tanggal 8 Juni 1946 BPRI menyerang tangsi militer di Selong. Dalam penyerangan itu di pihak pejuang gugur antara lain Sayid Saleh, Tuan Guru Haji Muhammad Faesal dan Abdullah. Dari pihak Nica delapan orang prajuritnya.

Akibat penyerbuan itu pada tanggal 8 Juni itu juga Nica mengadakan aksi pembersihan besar-besaran yang didahului dengan demonstrasi anti - revolusi di Selong yang dikerahkan oleh kaki tangan pemerintah Nica. Seluruh kekuatan polisi dan militer bergerak serentak sehingga pada hari itu hampir semua pemimpin perjuangan dapat ditangkap.

Pemimpin - pemimpin yang baru saja dilepaskan ditangkap lagi. Seluruhnya dianggap ekstremis tanpa kecuali.

Sejak itu keadaan menjadi tenang yang memungkinkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih stabil.

Di bagian lain di Indonesia situasi tetap panas. Letnan Gubernur Jendral H.J.van Mook berusaha hendak mendirikan NIT untuk menentang RI. Untuk itu pada tanggal 16 Juli 1946 van Mook menyelenggarakan Konperensi Malino yang dilanjutkan dengan Konperensi Denpasar yang berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 18 Desember 1946. Dari Nusa Tenggara Barat hadir dalam Konpe-

rensi Denpasar itu Lalu Srinata, Lalu Mahnep, Lalu Abdurrahman, I Gusti Bagus Oka, M. Kaharuddin, Lalu Hasan Mustamin, dan A.D.Talu.

Konperensi Denpasar menghasilkan Negara Indonesia Timur yang terbentuk pada tanggal 24 Desember 1946 dengan Residen-nya yang pertama Cokorde Gde Raka Sukawati. Sejak itu Lombok dan Sumbawa masuk NIT.

Pulau Lombok dibagi atas tiga *ressort afdeeling* dan pulau Sumbawa terdiri dari tiga buah *Swapraja* yang tergabung dalam sebuah federasi pulau Sumbawa. Kedua daerah tersebut masing - masing dinyatakan sebagai daerah otonom. Di tiap - tiap pulau diadakan **Eiland Raad** yang anggota - anggotanya diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Pemerintah / Kepala *Swapraja* setempat.

Di samping itu Belanda berusaha memperbaiki keadaan ekonomi dengan membanjiri pasar dengan barang - barang import. Ekspor pun maju kembali. Harga uang pun semakin stabil sejak didevaluasikannya uang Jepang tiap f 100,- Jepang menjadi f 0,03 Nica. Hubungan dan komunikasi bertambah lancar. Perkembangan sosial budaya semakin mantap. Diskriminasi di bidang pendidikan diadakan kembali. Bahasa Belanda diajarkan di tiap tingkat sekolah. Di SR bahasa Belanda diajar mulai dari kelas IV.

Sarana dan fasilitas belajar tercukupi. Minat bersekolah di kalangan anak - anak semakin meningkat sehingga timbul masalah kekurangan gedung dan guru.

Agama pun demikian pula. Dakwah - dakwah semakin berkembang. Sehingga timbul masalah Waktu Telu yang menjadi sasaran dakwah. Mereka selalu bertahan pada ajaran nenek moyang yang dipimpin oleh pemuka-pemuka adat dan agama mereka yang fanatik. Meskipun demikian jumlah Waktu Telu semakin merosot, masuk ke dalam agama Islam Waktu Lima.

Untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan Belanda mengekang pers. Setiap pers yang mencoba menentang pemerintah dilarang. Di samping itu pemerintah pun mengeluarkan Surat Kabar resmi seperti **Suara Rinjani** dan dengan mengizinkan masuknya koran - koran, brosur dan majalah yang anti Republik Indonesia atau yang pro Belanda atau yang netral.

Setiap gerakan yang berbau politik ditekan. Sehingga segala usaha kepemudaan, kewanitaan dan kepartaian tidak dapat berjalan dengan wajar. Namun demikian pada pertengahan tahun 1948 di daerah Bima berdiri partai IQAM (Ikatan Qaum Muslimin Bima). Mereka mengadakan propaganda secara rahasia dan menjalankan sabotase atas usaha - usaha Pemerintah Belanda.

Tetapi menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan, aktivitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan mulai tumbuh dan berkembang kembali dengan wajar. Melalui jalur pemerintahan dan DPR mereka mulai berjuang mengeluarkan pendapat. Tindakan Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri NIT dan sepak terjang aliran progresif di parlemen NIT telah memberikan dorongan dan inspirasi bagi rakyat yang patriotik untuk menuntut kedaulatan dan Negara Kesatuan RI. Pejabat - pejabat yang pro Nica pun semakin tersisih. Belanda pun secara berangsur - angsur menyerahkan kedaulatan. Tentara KL dan KNIL ditarik pula. Sehingga sampai penyerahan kedaulatan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa hanya tinggal dua orang Belanda saja yang memegang peranan masing - masing sebagai Sekretaris Daerah Pulau.

Maka sewaktu pelaksanaan persetujuan KMB di daerah Nusa Tenggara Barat berjalan dengan lancar tiada kesulitan.

CATATAN

1. Kolonel Nugroho Notosusanto, Ikhtisar Sejarah RI (1945 - sekarang), Jakarta, 1971, halaman 30.
2. Radik Utoyo Sudirdjo dkk, Lima Tahun Perang Kemerdekaan 1945 - 1949, Jakarta, halaman 272.
3. *Ibid*, halaman 139.
4. Radik Utoyo Sudirdjo dkk, *op.cit.* halaman 294.
5. Sartono Karthodirdjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 194.
6. Wawancara dengan H. M. Yamin, tanggal 18 September 1979.
7. Wawancara dengan Haji Akbar, tanggal 9 Desember 1979.
8. Wawancara dengan Kiyai Minggim, tanggal 25 Agustus 1979.
9. Prof. Dr. Ismail Suny S.H., M.C.L., Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta, 1977, halaman 56.
10. Wawancara dengan Ratmawa, tanggal 29 Desember 1979.
11. Wawancara dengan R. Suyatim, tanggal 25 Desember 1979.
12. Panitia Hari Pahlawan ke XXXIII Daerah Tingkat II Bima, *op.cit.* halaman 57.
13. *Ibid*, halaman 57.
14. Wawancara dengan Nyonya H. Salamah Suyatim, tanggal 25 Desember 1979.
15. Kolonel Drs. Nugroho Notosusanto, *op.cit.* halaman 43.
16. a. Wawancara dengan Mamiq Ripaah, tanggal 18 Oktober 1979.
b. Wawancara dengan A.D.Talu, tanggal 12 September 1979.

=====ns=====

DAFTAR ARTI KATA (GLOSARIUM)

Cibono	: Badan yang disertai urusan palawija di Zaman Jepang.
Cikutai Honbu	: Kantor Pusat Jepang di tingkat Bun Ken.
Cou Seinen Kurensyo	: Pusat Latihan Seinendan.
Daidanco	: Perwira.
Dai Toa	: Perang Suci.
Datu Ranga	: Menteri Urusan Umum.
Dea Dipati	: Menteri Urusan Perang.
Dea Kalibelah	: Menteri Urusan Kehakiman.
Dea Longan	: Nama kesatuan jabatan adat di Kesultanan Sumbawa.
Dea Qadli	: Penghulu Istana, Hakim Agama Islam.
G u n	: Distrik.
Gun co	: Kepala Distrik, Camat.
Gun Kaisatsu Tai	: Polisi Bala Tentara Nippon di tingkat Kecamatan.
Gunseikanbu	: Pemerintahan Angkatan Darat.
Guto Sihan Gakko	: Sekolah Guru 4 Tahun.
Hakko Iciu	: Kemakmuran bersama.
H e i h o	: Pembantu tentara.
H e i t a i	: T e n t a r a .
Higasi Sumbawa Tjikutai co	: Panglima Sumbawa Timur.
Islam Waktu Telu	: Suatu golongan agama Islam di pulau Lombok yang menyerahkan urusan ibadahnya kepada kiyai atau pemimpin agama mereka.
Kedemungan	: Kedistrikan, Kecamatan.
Keibodan	: Pembantu Polisi.
Kaigun	: Angkatan Laut.
Kejenelian	: Kedistrikan, Kecamatan.
Kemali'	: Tempat suci, tempat angker.
Ken kanrikan	: Kepala Daerah.
Ken Koku Dasi Kai	: Sumber Darah Rakyat.
Khatib Karoto	: Pembantu imam istana.
Khatib Lawali	: Pembantu Qadli.
Khatib Toi	: Pembantu Lebe Dalam.

Kimigayo	: Lagu Kebangsaan Jepang.
Kinrohosi	: Kerja bakti.
Kiyai	: Guru, pemimpin agama.
Lebe Dalam	: Pejabat agama yang disertai urusan zakat dan amal kebajikan.
Minseibu	: Pemerintahan Angkatan Laut.
Mitsui, Mitsui Bussan	: Badan Urusan Bahan Makanan, Badan Perbekalan.
Kaisha	: Kebangkitan Anak Negeri, nama Badan Pendidikan Agama Islam di Lombok Timur, lahir tahun 1937.
Nahdhatul Wathan	: Badan Usaha Perkapasan.
Nanko	: Undang - undang.
Osamu seire	: Menteri Perdagangan.
Rato Renda	: Angkatan Darat.
Rikugun	: Tenaga kerja sukarela, barisan kerja paksa.
Romusya	: Desa.
Son	: Nama perusahaan yang disertai Jepang untuk mengurus perdagangan ternak.
Taiwan Taikutsang	: Senam.
Taiso	: Menteri.
Tureli	: Wazir, Perdana Menteri, Menteri Utama.
Tureli Nggampo	

DAFTAR KATA DAN ISTILAH

A.

AFNEI
agama berhala
agraria
animisme
API
Asisten Distrik
Asisten Residen

B.

Badan Hukum Syara'
Badan Hukum Syar'iah
Banteng Hitam
BASMI
BBI
BFO
BKR
BPRI
Budha budhi
Bun Ken

C

C.C.O.A.M.A.C.A.B.
Cibono,
Cikutai Honbu
Cou Seinen Kurensyo

D.

daerah kultural
Daidanco
Dai Toa
Datu Ranga
Dea Dipati

Dea Qadli
Dea Kalibelah
Dea Longo
depresi ekonomi
Dewan Pulau Sumbawa
Divide et impera
Dha'i
Donggo

F.

Federasi

G.

Gerakan Tiga A
GRISK
Gun
Gun co
Gun Keisatsu Tai
Gunseikanbu
Guto Sihan Gakko

H.

Hakko Iciu
Heiho
Heitai
Higasi Sumbawa Cikutai co,
HPB,
Hukum adat

I.

ijonisme
IQAM
Islam Waktu Telu
isolasi

K.

kampung
kebijaksanaan perampokan
kedemungan
Keibodan
Kaigun
Kejenelian
Kemali'
Ken kanrikan
Kepala Distrik
Ken Koku Dasi Kai
Khatib Karoto
Khatib Lawi li
Khatib Tua
Khatib Toi
Kimigayo
kinrohosi
Kooperator
Komite Nasional Indonesia
Konperensi Denpasar
Konperensi Malino
Konsinyasi
Kontrolur
KNI
KPM
KTN
Kucing Hitam
KWS
Kiyai

L.

Lebe Dalam
Lombok Eiland Raad
lambung bibit

M.

Majelis Hadat
minoritas

Minseibu
Mitsui
mobilitas horizontal
mobilitas vertikal

N.

Nahdhatul Wathan
Nanko
NICA
Nippon Seisyin
NIT
Non kooperatif
Non kooperator

O.

onder afdeeling
Osamu seire
otonom

P.

Penetrasi perdagangan
PERWARI
PETA
PIB
PIL
PMI
Presiden
PUIL

R.

Raja Bicara
Raja Parenta
Raja RasanaE
RAS
Ratu Renda
ressort afdeeling
Rikugun
Romusya

S.

Sasak
SEAC
Seinendan
Spekulasi
Son
Sumbawa Eiland Raad
Sumbawa Raad
Sumber darah rakyat
Sun co
Sunda Kecil su
Suto Sihan Gakko
Swapraja
Syukai Gi In

T.

Taiwan Taikutsang
taiso
TKR
Tenno Haika
Tureli
Tureli Nggampo

Z.

zending.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdullah, H.M.Thayeb, **Detik Nadi Perjuangan Kemerdekaan RI di Bima dan Dompu** (manuskrip).
2. Abdullah, H.M.Thayeb, **Riwayat Perjuangan Mempertahankan Proklamasi 17-8-1945 di daerah Bima-Dompu sejak dari tanggal 17-8-1945 s/d 27-12-1945** (manuskrip).
3. Amin, Ahmad, **Sejarah Bima**, Kantor Kebudayaan Bima, 1971.
4. Assegaff, Drs. Ja'far, **Bunga Rampai Sejarah Media Massa**, Mecon Press, Jakarta, 1978.
5. Djajusman, **Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL)**, Angkasa, Bandung, 1978.
6. Gunseikanbu, **Buku Pengumpulan Undang - undang**, Kokumin Tosyokoku (Balai Pustaka), Jakarta, 2604.
7. Harahap, Zainabun, **I Gusti Ngurah Rai**, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, 1968.
8. Hasan, **Sejarah Singkat Perjuangan Rakyat Lombok**, (manuskrip), 1979.
9. Imran, Drs. Amrin, **Perebutan - Perebutan Kekuasaan Menegakkan Republik Indonesia (1945)**, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, 1967.
10. Kansil, Drs.C.S.T., S.H., **Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 1968.
11. Margono, **Ikhtisar Sejarah Pergerakan Nasional (1908 - 1945)**, Pusat Sejarah ABRI, 1971.
12. Notosusanto, Kolonel Drs. Nugroho, **Ikhtisar Sejarah RI (1945 - sekarang)**, Pusat Sejarah ABRI, 1971.
13. Notosusanto, Nugroho, **Naskah Proklamasi Yang Otentik Dan Rumusan Pancasila Yang Otentik**, Pusat Sejarah ABRI, 1976.
14. Notosusanto, Nugroho, **Pertempuran Surabaya**, Lembaga Sejarah Hankam, 1968.
15. Panitia Hari Pahlawan Ke XXXIII Daerah Bima, **Selayang Pandang Sejarah Perjuangan Rakyat Bima (1908 - 1950)**, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Bima 1978.
16. Penyarikan, Drs. Ktut Sudiri, S.H., **Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai**, Proyek Biografi Pahlawan Nasional Dep. P dan K, 1976.
17. Propinsi Sulawesi, **Kementrian Penerangan**, 1953.
18. Rum, Muhammad, **Bunga Rampai dari Sejarah I**, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.
19. Rum, Muhammad, **Penculikan Proklamasi dan Penilaian Sejarah**, Penerbit Huda-Jakarta dan Ramadhani Semarang, 1970.
20. Ratsu (R. Sugimin), **Hati Yang Membara** (manuskrip).
21. Salim, Drs. Makmun, **Ikhtisar Sejarah Perang Dunia II**, Pusat Sejarah ABRI, 1971.
22. Sartono Kartodirdjo dkk, **Sejarah Nasional Indonesia**, Dept. P dan K, 1976.
23. Sudirjo, Radik Utoyo dkk, **Lima Tahun Perang Kemerdekaan**, Alda Jakarta.
24. Suherli, Drs. Tanu, **Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia**, Pusat Sejarah ABRI, 1971.
25. Suny, Prof. Dr. Ismail, S.H., M.C.L., **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif**, Aksara Baru, Jakarta, 1977.
26. Tim Penelitian dan Pencatatan Sejarah Daerah NTB, **Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat**, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1978/1979.
27. Tim Penyusunan Monografi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I NTB, **Monografi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat**, Jilid I dan II, Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, 1975.

===== ★ =====

DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	N a m a	Umur	Alamat	Pekerjaan		Aktivitas/Pengalaman Kerja
1.	Abdullah, H.M.Thayeb.	63 tahun	Bima	Pensiunan Negeri	Pegawai	Aktivitas Muhammadiyah, Persatuan Pemuda Islam; Anggota Legium Veteran RI.
2.	Abdulmajid, L.Manja.	71 tahun	Sumbawa Besar	Pensiunan Negeri	Pegawai	Bekas PETA, Panitera Pengadilan Negeri Swapraja Sumbawa.
3.	Abdurrahim S.H.	53 tahun	Mataram	Staf Ahli NTB.	Gubernur	Anggota Legium Veteran RI, Guru SGA, Sekwilda Prop. NTB, Staf Ahli Gubernur NTB.
4.	Djaja, Lalu	60 tahun	Mataram	Pensiunan Negeri	Pegawai	Guru SD, anggota Veteran RI, guru SGB, Kepala Pendidikan Olahraga Daerah Lombok, Kepala Dinas PDK NTB, Swasta.
5.	Akbar, Haji	67 tahun	Kuripan	Tani		Bekas pegawai Mitsui Bussan Kaisha (MBK), Guru Ngaji.
6.	Akmaluddin, Haji	63 tahun	Labuapi	Tani		Bekas anggota Rikugun, tani.
7.	Burdasari, L.Thohir	56 tahun	Mataram	Pensiunan Negeri.	Pegawai	Guru SD, Peg. Penmas, Staf Ahli Bupati, Kep. Kantor Daerah Ditjen Pemuda NTB, Kepala Dinas PDK Prop. NTB, anggota Veteran RI.
8.	Harta, Aci	56 tahun	Mataram	Swasta		Guru SD, Swasta, Anggota Legium Veteran RI.

9.	Ibnu, Ibrahim	55 tahun	Dompu	Kepala SD.	Anggauta PGRI, Korpri, Golkar, Pengurus Muhammadiyah, Bekas Pejuang Kemerdekaan RI.
10.	Imbang, Lalu	74 tahun	Sumbawa Besar	Pensiunan Kepala SD.	Guru SD, Kepala SD, Pernah menjadi anggauta Anshor.
11.	Ja'far, H.Idris M.	76 tahun	Bima	Pensiunan Pegawai Negeri.	Pegawai Kontrolur Bima, Jeneli, KPS Lombok Timur, Aktivis Muhammadiyah, Bekas anggauta Syukai Gi In Sunda Kecil.
12.	Karim, Hamzah	62 tahun	Ampenan	Swasta	Anggauta NU, Bekas anggauta DPR RI
13.	Makerthia, I Gusti Ngurah	53 tahun	Mataram	Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Dep. P dan K NTB.	Guru SMP, Guru SMEA, Kakabin Pujursus, Bekas Pejuang Kemerdekaan RI.
14.	Mala, Lalu	73 tahun	Sumbawa Besar	Pensiunan Pegawai Negeri.	Panitera Pengadilan Swapraja Sumbawa, Demung, Pegawai Kabupaten Sumbawa.
15.	Miji	56 tahun	Praya	Kepala Seksi Pend. Dasar.	Guru SD, Kep.Inspeksi SD, Kep.Kabin SD Kabupaten.
16.	Minggim, Kiyai	56 tahun	Tego	Kiyai	Kiyai Waktu Telu.
17.	Moh.Hijaz, Haji	66 tahun	Mataram	Pensiunan Pegawai Negeri	Pegawai Kantor Distrik, Pegawai Kantor Penerangan Lombok Barat, Anggauta Legium Veteran RI.

18.	Mustami, L.M.Zain	73 tahun	Sumbawa Besar	Pensiunan Negeri	Pegawai	Pegawai Kantor Kontrolir, Panitera Pengadilan Swapraja Sumbawa, Kepala Rumah Tangga Istana Sumbawa Pegawai Kabupaten Sumbawa.
19.	Mustirin, A	61 tahun	Tanjung Teros	Tani		Tani, Bekas Pejuang Kemerdekaan RI.
20.	Nbu, M.Saleh	71 tahun	Bima	Pensiunan Negeri	Pegawai	Pegawai Negeri, Bekas Pejuang.
21.	Padelah, Mamiq	79 tahun	Dasan Lekong	Tani		Kepala Desa, Aktivist PNI, Anggauta Angkatan 45, Bekas Kepala Pemerintah Lombok Timur, Bekas Anggauta Badan Propaganda Jepang, Bekas Anggauta Syukai Gi In Sunda Kecil.
22.	Popy, M.Saleh	58 tahun	Dompu	Tukang Jahit		Anggauta Heiho, Pejuang Kemerdekaan RI.
23.	Ratmawa	56 tahun	Mataram	Anggauta DPRD Tingkat I NTB		Wartawan, Anggauta DPR, Aktivist PNI.
24.	Ripaah, Mamiq	78 tahun	Tanjung	Pensiunan Negeri	Pegawai	Guru SD, Sedahan Distrik, Assisten Distrik, Anggauta DPD Daerah Lombok, Kepala Daerah Lombok, Anggauta BPH Gubernur Tk. I NTB Anggauta Legium Veteran RI.
25.	Ratsu		Sumbawa Besar	Swasta		TKR, Swasta, Pengarang.
26.	Suyatim, R.	63 tahun	Mataram	Swasta		Pegawai KPM, Swasta, Anggauta Legium Veteran RI.
27.	Suyatim, Ny.H.Salamah	61 tahun	Mataram	Pensiunan Negeri	Pegawai	Guru SR, Peg. Penmas, Anggauta DPRD Prop. NTB, Anggauta Perwari, Aisyiah.

28.	Syahrudin, Haji	51 tahun	Seganteng	Swasta	Bekas Heiho, Swasta.
29.	Talu, A.D.	68 tahun	Bima	Pensiunan Pegawai Negeri	Pegawai Swapraja Bima, Jeneli, Tureli Anggauta Parlemen NIT.
30.	Yakim, H.M.	55 tahun	Mataram	Kep.Bid.Penmas Kanwil Dep. P dan K Prop. NTB.	Guru SR, Peg. Penmas, Anggauta DPD Kab. Lombok Timur, Masyumi, NWDI, Korpri, Golkar.

LAMPIRAN :

Salinan

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
JL. CAKALANG 6, MATARAM**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

No. : 505/C.II/Sp.

Tentang

**PENGANGKATAN ANGGAUTA TEAM PROYEK INVENTARISASI
DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
TH. 1979/1980.**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

MEMBACA :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal : 21 Mei 1979, Nomor : 082/P/1979, tentang pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun : 1979/1980.
2. Daftar Isian Proyek (DIP) tanggal 27 Maret 1979, Nomor : 02/XXIII/3/79, untuk Proyek tersebut di atas.
3. Pola Penelitian, Kerangka laporan dan Petunjuk Pelaksanaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah tahun 1979/1980.

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk kelancaran jalannya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah tahun 1979/1980 perlu dibentuk suatu Team Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa agar pelaksanaan Proyek tersebut dapat segera dimulai, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Team Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 1979/1980.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14, tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Pedoman Umum Pelaksanaan Proyek Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978.

MEMUTUSKAN

Dengan membatalkan Keputusan kami, tanggal 22 Juli 1978, Nomor : 412/C.II/Sp.

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Membentuk Team Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat 1979/1980.

KEDUA :

Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 3, dengan jabatan dalam Team seperti pada lajur 4, lampiran Surat Keputusan ini, sebagai anggota Team Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat, tahun 1979/1980.

KETIGA :

Target Team adalah menyusun 5 (lima) naskah Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat meliputi :

1. Sejarah Daerah : Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) 1945 - 1949.
2. Geografi Budaya Daerah : Aspek Geografi Dalam Wilayah Pembangunan Desa.
3. Adat - Istiadat Daerah : Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Desa.
4. Ceritera Rakyat Daerah : Tokoh Mitologis dan Legendaris.
5. Permainan Rakyat Daerah.

KEEMPAT :

Segala biaya yang diperlukan untuk itu dibebankan pada anggaran Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 1979/1980, yang dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja dengan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 1979/1980.

KELIMA :

Jika kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM :

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut,
terhitung mulai tanggal : 1 APRIL 1979.

Ditetapkan di : M a t a r a m
T a n g g a l : 6 Juli 1979.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Nusa Tenggara Barat
Pejabat yang mewakili. x)

Cap ttd.

(Djohansjah)
Nip : 130003625

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Dep. P & K.
up. Pemimpin Proyek Pengendalian Proyek - Proyek, Kotak pos 479 Jkt.
 2. Direktur Jenderal Kebudayaan Dep. P & K up. Pemimpin Proyek IDKD, Jalan
Cilacap 4 Jakarta.
 3. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Prop. Nusa Tenggara Barat di Mataram.
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Mataram di Mataram.
 5. Kepala Kantor Kas Negara di Mataram.
 6. Pemimpin Bank Indonesia Cabang Mataram di Mataram.
 7. Kepala Kanwil Direktorat Anggaran Denpasar di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Tengah dan
Lombok Barat.
 9. Kepala Bidang PSK Kanwil Dep P&K Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
 10. Kepala Bidang Kesenian Kanwil Dep. P&K Propinsi NTB.
 11. Kepala SMA Negeri Ampenan di Ampenan.
 12. Kepala Sub Bagian Pengendalian, Kanwil Dep. P&K Propinsi NTB.
 13. Masing - masing anggauta Team Proyek IDKD NTB tahun 1979/1980.
 14. A r s i p.-
- x). Berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Kantor Wilayah Dep. P&K Propinsi NTB
tanggal 6 Juli 1979, Nomor : 2306/I.20.1/C.79.

Salinan sesuai dengan aslinya
yang menyalin,

ttd

(Djoko Sumpeno B.A.)
Nip : 130685130.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, No.505/C.II/Sp.**

**Tentang : PENGANGKATAN ANGGAUTA TEAM PROYEK INVEN-
TARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1979/1980.**

No.	Bidang	Nama Anggota Team	Jab.dlm.Team	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sejarah Daerah.	1. Lalu Wacana BA. 2. Drs.Abd.Wahab H.I 3. Drs.Lalu Ahmad Muhidin. 4. Djoko Sumpeno BA.	Ketua/Anggota Anggota Anggota Anggota	Sdr. Lalu Wacana BA bertindak sebagai Ketua/Koordinator Team.
2.	Geografi Budaya.	1. Drs.Yacub Ali 2. Drs.Amin Said 3. Imran H.T. BA.	Ketua/Anggota Anggota Anggota	
3.	Adat Istiadat.	1. M.Ali BD. BcHK. 2. Ahmad Mujur BA. 3. Ayib Rosidi BA. 4. Ahmad Husni BA.	Ketua/Anggota Anggota Anggota Anggota	
4.	Ceritera Rakyat.	1. I Nengah Kayun BA. 2. Dinullah Rayes 3. Mahrip 4. Arsyad Muhamad	Ketua/Anggota Anggota Anggota Anggota	
5.	Permainan Rakyat.	1. Umar Siradz 2. Dra.Sri Yaningsih 3. Lalu Gde Superman	Ketua/Anggota Anggota Anggota	

Mataram, 6 Juli 1979.-
Kepala Kantor Wilayah Dep. P&K Prop. NTB.
Pejabat yang mewakili x)

Cap ttd.

(Djohansjah)
Nip : 130003625

x). Berdasarkan surat penunjukan Kepala Kanwil
Dep. P&K Prop. NTB, tgl. 6 Juli 1979 No.: 2306/I.20.1/C.79.-

S. JARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945 - 1949) D.A.

Perpustakaan
Jenderal K.

959.

L

s